

LEMBAGA PENELITIAN
SMERU
RESEARCH INSTITUTE

MENUJU KEBIJAKAN PROMASYARAKAT MISKIN
MELALUI PENELITIAN

LAPORAN PENELITIAN

**Mencari Jalan Keluar dari Kemiskinan
di Jawa Timur, Maluku Utara,
dan Timor Barat**

Ruly Marianti

JULI 2009

LAPORAN PENELITIAN

**MENCARI JALAN KELUAR DARI KEMISKINAN
DI JAWA TIMUR, MALUKU UTARA,
DAN TIMOR BARAT**

Ruly Marianti

Editor:
Justin Sodo

**Lembaga Penelitian SMERU
Jakarta
Juli 2009**

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan Lembaga Penelitian SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, mohon hubungi kami di nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat sur-el smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

Marianti, Ruly

Mencari Jalan Keluar dari Kemiskinan di Jawa Timur, Maluku Utara, dan Timor Barat / Ruly Marianti. -- Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2009.

x, 52 p. ; 30 cm. -- (Laporan Penelitian SMERU, Juli 2009)

ISBN: 978-979-3872-67-4

1. Kemiskinan

I. SMERU

362.5 / DDC 21

ABSTRAK

Mencari Jalan Keluar dari Kemiskinan di Jawa Timur, Maluku Utara, dan Timor Barat

Ruly Marianti

Studi ini menggali pemahaman masyarakat tentang kondisi kesejahteraan mereka dan pengalaman yang terkait dengan naik-turunnya kesejahteraan. Laporan ini ditulis berdasarkan berbagai laporan yang dihasilkan dalam dua studi *Keluar dari Kemiskinan* yang dilakukan SMERU. Fokus utama studi tersebut adalah pada kelompok *mover*, yakni kelompok yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya, baik yang berhasil keluar dari kemiskinan maupun yang belum. Laporan ini membandingkan *mover* di tiga daerah, yakni Jawa Timur, Maluku Utara, dan Timor Barat untuk mengetahui karakteristik *mover* dan bagaimana proses peningkatan kesejahteraan terjadi.

Untuk setiap wilayah dipilih lima komunitas penelitian yang mencakup daerah pedesaan dan (semi) perkotaan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan metode kuantitatif (survei rumah tangga) dan kualitatif (diskusi kelompok terfokus, wawancara sejarah hidup laki-laki dan perempuan, wawancara dengan pemimpin/tokoh masyarakat, dan observasi).

Ditemukan beberapa pola proses peningkatan kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan, yaitu mengerjakan pekerjaan yang sama tetapi memiliki penghasilan yang lebih besar; mengerjakan pekerjaan lain dengan penghasilan yang lebih besar atau stabil; memiliki beberapa sumber pendapatan; dan memiliki gaji tetap (sebagai pegawai negeri sipil atau karyawan). Sementara itu, peningkatan kesejahteraan dipengaruhi oleh kapasitas individu atau rumah tangga, kapasitas komunitas, dan konteks lokal serta regional. Oleh karena itu, ketiga elemen ini perlu menjadi titik awal dalam pembuatan kebijakan dan program pembangunan.

Kata kunci: Dinamika kemiskinan, mobilitas kesejahteraan, Jawa Timur, Maluku Utara, Timor Barat

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR KOTAK	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	v
RANGKUMAN EKSEKUTIF	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Dua Studi Keluar dari Kemiskinan di Indonesia	1
1.2. Temuan Beberapa Studi Lain tentang Upaya Keluar dari Kemiskinan	3
1.3. Struktur Laporan	7
II. KONTEKS REGIONAL DAN LOKAL	8
2.1 Konteks Regional: Jawa Timur, Maluku Utara, dan Timor Barat	8
2.2 Konteks Lokal: Komunitas-komunitas yang Diteliti	11
III. MEREKA YANG MAMPU KELUAR DARI KEMISKINAN: MENGIDENTIFIKASI KARAKTERISTIK <i>MOVER</i>	17
3.1 Memahami Mereka yang Mampu Keluar dari Kemiskinan	17
3.2 Aspek Demografis	17
3.3 Aspek Ekonomi	20
3.4 Aspek Psikologis dan Sosial	21
3.5 Aspek Kesehatan	22
3.6 Identifikasi Kelompok <i>Mover</i>	23
IV. BERBAGAI JALAN KELUAR DARI KEMISKINAN: FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH DAN PROSESNYA	30
4.1 Memahami Jalan Keluar dari Kemiskinan	30
4.2 Faktor-Faktor yang Meningkatkan Kesejahteraan menurut Kelompok-kelompok Transisi: Perspektif dari Bawah	30
4.3 Mengidentifikasi Proses Keluar dari Kemiskinan	33
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	44
5.1 Kesimpulan	44
5.2 Rekomendasi Kebijakan	47
DAFTAR ACUAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Ringkasan Jumlah Kegiatan Pengumpulan Data dalam Studi MOP1 dan MOP2	2
Tabel 2.	Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (Juta Rupiah), 2001–2004	9
Tabel 3.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (%), 2001–2004	9
Tabel 4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto/PDRB per Kapita (%), 2001–2004	9
Tabel 5.	Kondisi Ketenagakerjaan di Tiga Wilayah, 2002 dan 2004	10
Tabel 6.	Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kemiskinan Manusia di Tiga Wilayah, 2002	10
Tabel 7.	Kondisi Kemiskinan di Tiga Wilayah, 2002	11
Tabel 8.	Beberapa Indeks Mobilitas di 15 Komunitas di Jawa Timur, Maluku Utara, dan Timor Barat	14
Tabel 9.	Peringkat Lima Belas Komunitas Berdasarkan Indeks-indeks Mobilitas	15
Tabel 10.	Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin	18
Tabel 11.	Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Transisi di Tiga Wilayah	18
Tabel 12.	Struktur Usia Kepala Rumah Tangga Kelompok <i>Mover</i> dan <i>Faller</i>	18
Tabel 13.	Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Tingkat Pendidikan di Tiap Kelompok Transisi (%)	19
Tabel 14.	Persentase Pekerjaan Utama menurut Sektor dan Kelompok Transisi (%)	20
Tabel 15.	Persepsi Kemampuan Mengontrol Keputusan Pribadi (%)	21
Tabel 16.	Tingkat Kepercayaan Kepada Orang Lain di Komunitas (%)	21
Tabel 17.	Partisipasi dalam Organisasi menurut Kelompok Transisi (%)	22
Tabel 18.	Faktor-faktor yang Meningkatkan Kesejahteraan menurut Semua Kelompok Transisi	31
Tabel 19.	Faktor-faktor yang Meningkatkan Kesejahteraan menurut Kelompok <i>Mover</i>	32
Tabel 20.	Faktor-faktor yang Meningkatkan Kesejahteraan menurut Kelompok <i>Mover</i> menurut Wilayah	33

DAFTAR KOTAK

Kotak 1.	<i>Mover</i> dengan Diversifikasi Sumber Pendapatan dalam Sektor Pertanian/ Tradisional	24
Kotak 2.	<i>Mover</i> dengan Diversifikasi Pendapatan di Luar Sektor Pertanian/ Tradisional	25
Kotak 3.	<i>Mover</i> dengan Hubungan dan Jaringan Sosial yang Menguntungkan	27
Kotak 4.	<i>Mover</i> yang Belum Melewati Garis Kemiskinan	29
Kotak 5.	Melakukan Mata Pencaharian yang Sama dengan Pendapatan yang Lebih Tinggi	35
Kotak 6.	Beralih ke Mata Pencaharian atau Bisnis yang Lebih Baik	37
Kotak 7.	Memiliki Beberapa Sumber Pendapatan	38
Kotak 8.	Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Karyawan dengan Gaji Tetap	39

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Bappenas	Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
BBI	Balai Benih Induk
CPNS	calon pegawai negeri sipil
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	<i>focus group discussion</i>
HDR	<i>human development report</i>
HDI	<i>human development index</i>
HPD	hakim perdamaian desa
IKM	indeks kemiskinan manusia
IKIP	Institut Kejuruan Ilmu Pendidikan
IPM	indeks pembangunan manusia
KRTL	kepala rumah tangga laki-laki
KRTP	kepala rumah tangga perempuan
MOP	<i>moving out of poverty</i>
MOPI	<i>moving out of poverty index</i>
MI	<i>mobility index</i>
NPI	<i>net prosperity index</i>
NTT	Nusa Tenggara Timur
PDI-P	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan
PDRB	produk domestik regional bruto
PNS	pegawai negeri sipil
SD	sekolah dasar
SMP	sekolah menengah pertama
SMA	sekolah menengah atas
SLTA	sekolah lanjutan tingkat atas
SMEA	sekolah menengah ekonomi atas
SMK	sekolah menengah kejuruan
TKW	tenaga kerja wanita
TPAK	tingkat partisipasi angkatan kerja
TPT	tingkat pengangguran terbuka
UNDP	United Nations Development Programme

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Pendahuluan

Kemiskinan adalah suatu proses yang dinamis karena berbagai aspeknya—misalnya, jumlah dan kondisi kelompok miskin serta penyebab kemiskinan mereka—dapat berubah-ubah akibat pengaruh banyak faktor. Selain itu, kemiskinan juga selalu terkait dengan konteksnya yang spesifik. Karena itu, kemiskinan perlu dikaji secara komprehensif dari berbagai tingkatan (yaitu kecenderungan pada tingkat makro maupun realitas pada tingkat mikro) dan perlu pula dipahami melalui berbagai perspektif dari berbagai aktor yang terkait (misalnya *top-down perspectives* dari para pengambil kebijakan dan para praktisi termasuk dari pemerintahan dan *bottom-up perspectives* dari mereka yang mengalami kemiskinan).

Studi *Moving Out of Poverty: Understanding Freedom, Democracy, and Growth from the Bottom Up* dimulai sekitar awal 2005 yang melibatkan lebih dari sepuluh negara untuk mengeksplorasi proses keluar kemiskinan dan mempertahankan kesejahteraannya dalam periode 5 hingga 10 tahun. Proses ini khususnya dipahami dari perspektif mereka yang mengalami sendiri dinamika kemiskinan, termasuk kelompok laki-laki, perempuan, dan kalangan muda. Pertanyaan penelitian yang terutama hendak dijawab oleh studi ini adalah bagaimana dan mengapa ada kelompok orang yang bisa meningkatkan kesejahteraannya dan keluar dari kemiskinan, sedangkan ada orang yang justru jatuh atau terperangkap dalam kemiskinan.

Di Indonesia studi tersebut dilakukan di tiga wilayah, yaitu Jawa Timur dan Maluku Utara yang dilakukan pada fase pertama (MOP 1) dan Timor Barat yang dilakukan pada fase kedua (MOP 2). Pengumpulan data dalam studi MOP 1 dan 2 menggabungkan metode kualitatif (diskusi kelompok terfokus/FGD, wawancara mendalam dengan informan kunci dan sejumlah anggota masyarakat, baik kelompok laki-laki maupun perempuan, dan observasi) dan metode kuantitatif (survei rumah tangga). Di berbagai FGD, warga komunitas dipandu untuk menjelaskan pandangan dan pemahamannya tentang berbagai hal yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Rumah tangga dalam suatu komunitas dikelompokkan menjadi empat kelompok transisi atau kelompok kesejahteraan: selalu kaya (*always rich*), kelompok yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya (*mover*), kelompok yang jatuh miskin (*faller*), dan miskin kronis (*chronic poor*). Data studi ini khususnya berupa pemahaman masyarakat tentang kondisi kesejahteraan mereka dan pengalaman yang terkait dengan naik-turunnya kesejahteraan. Pemahaman dan pengalaman ini umumnya bersifat subjektif, mikro, dan lokal. Namun, metodologi yang digunakan dalam MOP 1 dan 2 berasumsi bahwa untuk melengkapi pemahaman dan gambaran kemiskinan di suatu negara secara makro, dibutuhkan informasi tentang realitas di tingkat mikro (individual dan rumah tangga) dan meso (interaksi sosial, komunitas, organisasi, dll.).

Laporan ini ditulis berdasarkan berbagai laporan yang dihasilkan dalam studi MOP 1 dan MOP 2 (khususnya dua laporan wilayah) dengan fokus utama pada kelompok yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya atau mengalami mobilitas naik (*upward mobility*). Selanjutnya, kelompok ini disebut *mover*. Kelompok yang termasuk dalam *mover* adalah semua yang meningkat kesejahteraannya, baik yang berhasil keluar dari kemiskinan maupun yang belum. Dalam laporan ini kelompok *mover* di tiga daerah akan dibandingkan

untuk mengetahui apa saja karakteristik *mover*, bagaimana proses peningkatan kesejahteraan terjadi (faktor-faktor apa yang memengaruhi dan bagaimana polanya)?

Konteks Regional dan Lokal

Tiga wilayah yang menjadi konteks regional studi ini, yaitu Jawa Timur, Maluku Utara, dan Timor Barat, memiliki karakteristik-karakteristik khusus. Jika dilihat dari produk domestik regional bruto (PDRB)-nya, tampak bahwa besarnya perekonomian di Jawa Timur jauh melampaui Maluku Utara dan NTT. Namun, dari laju pertumbuhannya, NTT memiliki laju pertumbuhan yang paling besar dan stabil. Selanjutnya, dari laju pertumbuhan PDRB per kapita dapat disimpulkan bahwa untuk 2001 dan 2002, keadaan di Jawa Timur tidak jauh berbeda dengan di NTT. PDRB dan laju pertumbuhan di Maluku Utara paling rendah dibanding dengan kedua wilayah lain.

Kondisi ketenagakerjaan yang terkait dengan tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur dan NTT lebih baik dibandingkan dengan di Indonesia secara umum. Di Maluku Utara, tingkat partisipasi tenaga kerja lebih rendah dan tingkat pengangguran terbuka lebih tinggi daripada di Jawa Timur dan NTT. Dilihat dari indeks kemiskinan manusia (IKM) di ketiga wilayah tersebut, NTT menduduki peringkat yang paling rendah. Jawa Timur memiliki peringkat IKM yang jauh lebih tinggi dari Maluku Utara dan NTT. Sekalipun demikian, angka kemiskinan yang disebutkan oleh Human Development Report (HDR) 2004 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Maluku Utara (14%) adalah paling rendah dan bahkan lebih rendah daripada di Indonesia secara umum (18,2%). Selain itu, angka kemiskinan di Maluku Utara juga lebih tinggi daripada di Jawa Timur dan NTT. Secara umum dapat dikatakan bahwa—di antara ketiga wilayah—masalah kemiskinan terbesar terdapat di NTT. Di wilayah ini, hambatan bagi individu, rumah tangga, dan kelompok yang berupaya untuk keluar dari kemiskinan bisa lebih besar karena harus melakukan upaya tersebut dalam kualitas hidup yang relatif lebih buruk daripada di wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Di tiap wilayah dipilih lima komunitas. Jadi, dalam studi MOP di Indonesia secara keseluruhan terdapat 15 komunitas. Secara umum dapat disebutkan bahwa seluruh komunitas mengalami peningkatan kesejahteraan. Di setiap komunitas jumlah rumah tangga yang naik kesejahteraannya lebih besar daripada jumlah rumah tangga yang turun kesejahteraannya. Di beberapa komunitas, misalnya, di Palengaan Daja (Jawa Timur) dan Nule (Timor Barat) terjadi mobilitas naik yang tinggi. Namun, peningkatan kesejahteraan ini tidak selalu berarti melewati garis kemiskinan. Banyak orang miskin yang mengalami perbaikan kondisi hidup, tetapi mereka belum berhasil keluar dari kemiskinan. Tiga dari lima komunitas yang memiliki indeks keluar dari kemiskinan yang tertinggi adalah komunitas di Maluku Utara. Ini sejalan dengan indeks pembangunan manusia (*human development index*) yang menunjukkan bahwa di Maluku Utara, beberapa aspek kualitas hidup lebih baik daripada di Jawa Timur dan NTT. Sebaliknya, dari lima komunitas dengan indeks keluar dari kemiskinan yang terendah, dua berasal dari Jawa Timur dan dua berasal dari NTT.

Kelimabelas komunitas yang diteliti dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu yang terletak di daerah pedesaan dan yang terletak di daerah (semi) perkotaan. Dari 15 komunitas tersebut, 11 dapat disebut sebagai daerah pedesaan. Komunitas perkotaan (urban) umumnya memiliki fasilitas publik yang lebih baik dan lengkap daripada komunitas pedesaan. Berdasarkan pembedaan urban–pedesaan ini, dapat disebutkan

bahwa komunitas urban di ketiga wilayah cenderung rendah tingkat mobilitasnya (tidak dinamis) sehingga memiliki indeks mobilitas dan kesejahteraan neto yang rendah. Namun, komunitas urban cenderung memiliki indeks keluar dari kemiskinan yang tinggi. Selanjutnya, komunitas-komunitas urban umumnya memiliki situasi sosial-ekonomi yang lebih kompleks daripada komunitas pedesaan. Keragaman di antara warganya lebih besar dilihat dari berbagai aspek (mata pencaharian, etnisitas, tingkat pendidikan, dll.). Heterogenitas ini bisa membuat sulit terjadinya perpindahan dari satu tingkat sosial-ekonomi ke tingkat yang lain (khususnya yang lebih tinggi) secara massal, sekalipun stratifikasi ekonomi umumnya bersifat terbuka. Berbagai subkelompok yang berbeda dalam komunitas memiliki hambatan dan stimulus yang berbeda untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Komunitas yang kesejahteraannya relatif paling tinggi adalah Semampir di Jawa Timur. Komunitas urban ini secara konsisten memiliki angka yang tinggi pada dinamika kesejahteraan, tingkat mobilitas, dan tingkat keluar dari kemiskinan. Dilihat dari berbagai indikator, bisa disebutkan bahwa Semampir merupakan komunitas yang paling sejahtera dibanding dengan komunitas lain. Infrastruktur fisik dan sosial serta berbagai fasilitas umum di Semampir lebih baik dan lengkap daripada di komunitas lain. Warga menyebutkan bahwa di komunitas mereka mayoritas perempuan (ibu rumah tangga) bisa mencari penghasilan tambahan dengan berdagang kecil-kecilan, misalnya, membuka warung atau kios. Sumber penghasilan ini biasanya dapat dikombinasikan dengan penghasilan (tetap) dari sumber lain, misalnya, dari pekerjaan suami atau istri sebagai pegawai negeri atau karyawan. Di Semampir 40% warga bekerja sebagai pegawai negeri. Tampaknya di Semampir terdapat peluang yang lebih besar untuk melakukan diversifikasi sumber pendapatan.

Komunitas yang banyak warganya mengalami peningkatan kesejahteraan, tetapi belum keluar dari kemiskinan adalah Palengaan Daja (Jawa Timur) dan Nule (Timor Barat). Keduanya adalah komunitas pedesaan yang relatif miskin dan hampir seluruh warga hanya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Ini berarti, naik-turunnya kesejahteraan mayoritas warga sangat rentan terhadap banyak hal yang bisa menggagalkan panen (misalnya, faktor alam). Jika panen gagal, tidak ada sumber pendapatan lain yang bisa menjadi substitusi karena kegiatan ekonomi nonpertanian sangat terbatas. Di kedua komunitas ini, diversifikasi sumber pendapatan sulit dilakukan.

Mereka yang Mampu Keluar dari Kemiskinan

Kelompok *mover* di 15 komunitas yang diteliti memiliki karakteristik umum dan karakteristik khusus. Berikut adalah beberapa di antara karakteristik umum tersebut.

1. Mayoritas berusia produktif : 31–50 tahun.
2. Mayoritas pernah mendapat pendidikan formal tingkat dasar dan menengah. Di komunitas-komunitas perkotaan *mover* umumnya mendapat pendidikan menengah. Dengan demikian, di perkotaan tingkat pendidikan *mover* lebih tinggi daripada di pedesaan.
3. Memiliki pendapatan yang stabil terutama karena mereka melakukan diversifikasi sumber pendapatan atau memperoleh gaji tetap. Salah satu cara diversifikasi untuk menjaga stabilitas pendapatan *mover* adalah dengan memiliki sumber pendapatan di luar sektor pertanian. Oleh sebab itu, secara umum kelompok *mover* cenderung punya ketergantungan yang lebih kecil pada sektor pertanian daripada kelompok *faller* dan *poor*.
4. Memiliki rasa percaya diri yang relatif lebih tinggi daripada kelompok *faller* dan *poor*.

5. Memiliki tingkat partisipasi sosial relatif tinggi. Tingkat partisipasi sosial ini khususnya dilihat dari keikutsertaan *mover* pada berbagai kegiatan sosial dan organisasi formal di masyarakat.

Karakteristik-karakteristik khusus kelompok *mover* tidak selalu muncul di tiap komunitas. Jadi, hanya terdapat di subkelompok tertentu. Karakteristik khusus itu terkait dengan aspek-aspek berikut.

1. Upaya diversifikasi pendapatan. Cara-cara *mover* melakukan diversifikasi sumber pendapatan, baik di dalam maupun di luar sektor pertanian, yakni di sektor pertanian dilakukan dengan cara bekerja sebagai buruh tani atau menanam jenis-jenis tanaman yang berbeda (khususnya tanaman komersial), sedangkan di luar sektor pertanian dilakukan melalui pekerjaan sampingan di sektor perdagangan kecil, jasa tidak terlatih, jasa terlatih, atau buruh nonpertanian.
2. Keterlibatan *mover* dalam hubungan sosial yang menguntungkan (“surplus”). Hubungan sosial yang surplus ini umumnya terkait dengan orang atau kelompok yang punya posisi sosial-ekonomi yang lebih tinggi, kuat, atau istimewa (*privileged*), misalnya, orang kaya atau berpengaruh di dalam atau di luar desa, dan marga/kelompok/keluarga bangsawan lokal, politikus, atau pejabat di luar komunitas. Koneksi dengan kalangan yang lebih tinggi ini dapat dipahami sebagai hubungan vertikal yang membuat orang atau kelompok bisa naik ke tingkat sosial yang lebih tinggi.
3. Besarnya mobilitas yang dicapai *mover*. Sekalipun seluruh *mover* mampu meningkatkan kesejahteraan, perbaikan kondisi kesejahteraan itu tidak selalu sama besarnya. Sebagian *mover* belum mampu melewati garis kemiskinan. Mereka umumnya secara ekonomi masih sangat tergantung pada sektor pertanian dengan pendapatan yang kecil. *Mover* dengan karakteristik khusus ini dapat dilihat sebagai kelompok *mover* yang paling rentan karena sekalipun dalam 10 tahun terakhir mereka relatif lebih sejahtera, perbaikan kesejahteraan ini mudah diganggu oleh berbagai keadaan seperti faktor alam (bencana banjir, kekeringan, penyakit tanaman) yang menyebabkan gagal panen, biaya produksi yang tinggi dan harga komoditas yang tidak stabil. *Mover* yang belum keluar dari kemiskinan tersebut umumnya berada di komunitas pedesaan yang memiliki peluang sangat kecil untuk melakukan kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian. Oleh sebab itu, sulit bagi masyarakat untuk melakukan diversifikasi mata pencaharian dan membagi risiko finansial di luar sektor pertanian.

Berbagai Jalan Keluar dari Kemiskinan

Proses peningkatan kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan bisa digolongkan dalam beberapa pola berikut.

1. Mengerjakan pekerjaan/mata pencaharian yang sama tetapi memiliki penghasilan yang lebih besar. Pada pola yang pertama ini, mata pencaharian yang dilakukan masih dianggap memiliki potensi untuk dikembangkan, tetapi perlu dilakukan beberapa perbaikan agar pendapatan bisa meningkat. Khusus untuk *mover* yang memiliki pekerjaan utama di sektor pertanian, perbaikan-perbaikan tersebut berupa adanya sistem dan teknologi pengairan yang lebih baik, diversifikasi tanaman, penggunaan varietas yang lebih unggul, dan akses yang lebih baik terhadap pasar.

2. Mengerjakan pekerjaan/mata pencaharian atau membuka usaha/bisnis lain dengan penghasilan yang lebih besar atau stabil. Pada pola kedua ini, mata pencaharian yang dilakukan saat ini dianggap tidak punya potensi untuk dikembangkan. Karena itu, harus beralih ke pekerjaan atau bisnis lain. Untuk alih pekerjaan atau usaha ini diperlukan kemauan dan kemampuan untuk belajar dan mengerjakan hal-hal baru. Selain itu, harus ada berbagai peluang ekonomi yang bisa menjadi alternatif mata pencaharian atau usaha baru.
3. Memiliki beberapa sumber pendapatan. Pada pola ketiga ini suatu rumah tangga memiliki lebih dari satu sumber pendapatan (*multiple source of income*) sehingga bisa dilakukan akumulasi pendapatan total dan pengurangan risiko finansial. Beberapa sumber pendapatan bisa diperoleh dengan cara, pencari nafkah utama melakukan beberapa pekerjaan atau dalam satu rumah tangga terdapat lebih dari satu pencari nafkah.
4. Memiliki gaji tetap terutama dengan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau karyawan di sektor formal.

Faktor-faktor yang mendukung proses peningkatan kesejahteraan adalah sebagai berikut.

1. Pada tingkat mikro: jaringan dan koneksi yang menguntungkan, keterampilan/pendidikan yang memadai, kondisi kesehatan yang relatif baik, serta adanya kemauan untuk bekerja keras (motivasi).
2. Pada tingkat makro: adanya peluang-peluang bisnis dan kesempatan kerja, adanya akses untuk mendapat pendidikan atau keterampilan yang bisa memperbesar kemampuan orang untuk meningkatkan pendapatan, serta adanya kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rekomendasi

Proses dan faktor-faktor yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan, termasuk untuk keluar dari kemiskinan, yang berhasil dilakukan oleh sekelompok orang (*mover*) terutama terkait dengan isu ekonomi seperti perbaikan pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Faktor-faktor nonekonomi seperti hubungan sosial, motivasi, tingkat pendidikan, dan kondisi kesehatan juga merupakan faktor yang turut mendukung perbaikan pelaksanaan pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Peningkatan kesejahteraan tersebut paling tidak dipengaruhi oleh tiga elemen yang satu sama lain saling terkait, yaitu kapasitas individu atau rumah tangga, kapasitas komunitas, dan konteks lokal serta regionalnya. Ketiga elemen inilah yang perlu dijadikan titik awal (*entry points*) dalam membuat kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, studi ini merekomendasikan upaya-upaya berikut.

1. Pengembangan Kapasitas Individual dan Rumah Tangga

- a) **Peningkatan pendidikan dan keterampilan.** Kemampuan individu (anggota rumah tangga) untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik (lebih besar dan lebih stabil) juga ditentukan pendidikan dan keterampilan yang tepat dan memadai. Pendidikan dan keterampilan tersebut dapat diperoleh di berbagai institusi sosial, baik yang formal (sekolah) maupun nonformal (keluarga,

tetangga, kelompok mata pencaharian). Oleh sebab itu, perlu dilakukan perbaikan tingkat pendidikan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, dan diseminasi secara sistematis pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan mata pencaharian/bisnis yang ada dan untuk memanfaatkan peluang melakukan mata pencaharian/bisnis lain.

- b) **Peningkatan kualitas hidup terutama dalam bentuk perlindungan dari akibat negatif masalah kesehatan.** Untuk itu, perlu jaminan bahwa masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan, baik dalam bentuk pemeliharaan kesehatan rutin maupun perawatan khusus secara memadai dan terjangkau. Khususnya bagi mereka yang lebih rentan terhadap masalah kesehatan (*health shocks*), misalnya, mereka yang berpendapatan rendah, lanjut usia, dan memiliki anggota keluarga anak-anak/balita, dan lain-lain.
- c) **Peningkatan motivasi kerja.** Hal ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan pengembangan dan pendampingan masyarakat, misalnya, yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah. Kegiatan peningkatan motivasi terutama difokuskan pada pembinaan (*coaching*) dalam mengeksplorasi hal-hal baru, menggali potensi dan memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang ada.

2. Pengembangan Kapasitas Komunitas (Kolektif)

Tidak semua hal yang bisa meningkatkan kesejahteraan dapat diupayakan pada tingkat individu/rumah tangga. Ada hal-hal yang hanya bisa atau lebih efektif jika dijalankan oleh kekuatan kolektif pada tingkat komunitas. Kekuatan kolektif yang bisa mendukung upaya keluar dari kemiskinan, misalnya, berupa organisasi yang menyediakan kredit untuk modal kerja atau organisasi yang menjamin penyediaan *input* lebih murah untuk produksi dan mengelola pemasaran outputnya. Pengembangan kapasitas kolektif ini sedapat mungkin harus sesuai (*compatible*) dengan berbagai jaringan dan kegiatan sosial yang sudah ada di antara berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, perlu pula mendapat pembinaan teknis secara berkala dan berkelanjutan dari lembaga-lembaga yang relevan.

3. Penciptaan Konteks Lokal dan Regional yang Kondusif untuk Pengembangan Kegiatan Ekonomi Produktif

Dengan mempertimbangkan kerentanan kegiatan ekonomi di sektor pertanian, maka prioritas perlu diletakkan pada upaya-upaya berikut.

- a) Penciptaan kesempatan kerja dan peluang usaha yang bisa mengintegrasikan tenaga kerja di sektor pertanian dalam kegiatan ekonomi nonpertanian. Pengintegrasian ini bisa dalam bentuk alih mata pencaharian utama dari sektor pertanian ke nonpertanian maupun dalam bentuk kombinasi mata pencaharian utama di sektor pertanian dengan mata pencaharian tambahan di luar sektor pertanian.
- b) Peningkatan akses terhadap lembaga-lembaga keuangan yang menyediakan kredit untuk bisnis kecil.
- c) Penyediaan dan peningkatan akses terhadap informasi, khususnya yang bisa memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan ekonomi (misalnya: informasi tentang ketersediaan dan harga bahan baku, jalur dan jaringan pemasaran, teknologi dan varietas yang lebih unggul, sumber-sumber kredit, perizinan usaha, dll.).

I. PENDAHULUAN

1.1. Dua Studi Keluar dari Kemiskinan di Indonesia

1.1.1 Latar Belakang dan Fokus

Kemiskinan adalah suatu proses yang dinamis, berbagai aspeknya—misalnya jumlah dan kondisi kelompok miskin serta penyebab kemiskinan—dapat berubah-ubah akibat berbagai faktor. Selain itu, kemiskinan juga merupakan fenomena yang selalu terkait dengan konteksnya yang spesifik. Akibatnya, kemiskinan perlu dikaji secara komprehensif dari berbagai tingkatan (yaitu kecenderungan pada tingkat makro maupun realitas pada tingkat mikro) dan perlu pula dipahami melalui berbagai perspektif dari berbagai aktor yang terkait (misalnya, *top-down perspectives* dari para pengambil kebijakan dan para praktisi, termasuk dari pemerintahan dan *bottom-up perspectives* dari mereka yang mengalami kemiskinan).

Salah satu studi kemiskinan yang menekankan pentingnya perspektif dari bawah adalah studi *Voices of the Poor. Can Anyone Hear Us?* (Suara dari Kelompok Miskin. Adakah yang Mendengarkan Kami?) (Narayan *et al.*, 2000). Setelah mengangkat pemahaman dan pengalaman hidup kelompok miskin, selanjutnya perlu mengangkat pemahaman dan pengalaman hidup mereka yang mampu keluar dari kemiskinan. Di awal 2005, Bank Dunia memulai sebuah studi global tentang *Moving Out of Poverty: Understanding Freedom, Democracy and Growth from the Bottom Up* (Keluar dari Kemiskinan: Memahami Kebebasan, Demokrasi, dan Pertumbuhan dari Bawah). Studi ini, yang melibatkan lebih dari sepuluh negara, mengeksplorasi proses keluar kemiskinan dan upaya mempertahankan kesejahteraan dalam periode 5 hingga 10 tahun. Proses ini dipahami dari perspektif mereka yang mengalami sendiri dinamika kemiskinan, yakni kelompok laki-laki, perempuan, dan kalangan muda (laki-laki dan perempuan). Pertanyaan penelitian yang terutama hendak dijawab oleh studi ini adalah: bagaimana dan mengapa ada kelompok orang yang bisa keluar dari kemiskinan dan mempertahankan kesejahteraan dan kekayaannya, sedangkan ada kelompok orang yang justru jatuh atau terperangkap dalam kemiskinan?

Indonesia merupakan salah satu dari negara yang dikaji dalam penelitian di atas. Oleh sebab itu, pada pertengahan 2005 Lembaga Penelitian SMERU mulai terlibat dalam studi global tersebut. Pelatihan umum di Indonesia diikuti oleh beberapa negara Asia and Amerika Latin dan dilaksanakan pada Mei 2005 oleh tim global yang dipimpin oleh Deepa Narayan (World Bank Office-India). Setelah itu, penelitian lapangan dilakukan pada Juli hingga September 2005 di dua wilayah, yaitu Jawa Timur¹ dan Maluku Utara² (selanjutnya studi ini disebut sebagai MOP 1). Pada awal 2006, studi keluar dari kemiskinan dilakukan di wilayah ketiga, yaitu Timor Barat³. Penelitian lapangan dilakukan pada minggu ketiga Maret hingga minggu kedua April 2006. (Selanjutnya studi ini disebut MOP 2).

¹Di lima komunitas: Palengan Daja, Branta Pesisir, Banyupelle, Bulu, dan Semampir.

²Di lima komunitas: Gorua, Gura, Idamdehe Gamsungi, Kampung Pisang, dan Soakonora.

³Di lima komunitas: Noelbaki, Nule, Naukae, Manleten, dan Kabuna.

Dalam studi global Keluar dari Kemiskinan, ada beberapa negara yang secara khusus melihat dampak konflik terhadap proses keluar dari kemiskinan. Salah satunya adalah Indonesia. Oleh sebab itu, baik pada studi MOP 1 maupun studi MOP 2, konflik merupakan salah satu faktor utama yang dianggap bisa memengaruhi dinamika kemiskinan. Dalam kedua studi itu, salah satu kriteria utama pemilihan daerah penelitian adalah intensitas konflik (tinggi, menengah, rendah).⁴ Bedanya, dalam MOP 1 tidak ditentukan fokus terhadap jenis konflik tertentu, sedangkan dalam MOP 2 ditentukan fokus pada konflik yang terkait dengan masalah masuknya para pengungsi dari Timor Timur ke Timor Barat pada 1999 setelah wilayah Timor Timur memerdekakan diri dari Republik Indonesia.

1.1.2 Metodologi

Pengumpulan data dalam studi MOP 1 dan 2 menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif yang dilakukan adalah: (i) diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*); (ii) wawancara mendalam tentang sejarah hidup dengan informan kunci dan sejumlah anggota masyarakat, baik kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan; (iii) wawancara dengan para pemimpin/tokoh masyarakat; dan (iv) observasi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan jawaban tentang mengapa dan bagaimana seseorang bisa keluar dari kemiskinan dan menggali keterkaitan antara faktor-faktor yang memengaruhi upaya keluar dari kemiskinan. Metode kuantitatif dilakukan dengan survei rumah tangga. Metode ini khususnya digunakan untuk mengetahui frekuensi dan besaran (*magnitude*) suatu fenomena. Berbagai kegiatan pengumpulan data di kedua studi secara umum dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Jumlah Kegiatan Pengumpulan Data dalam Studi MOP1 dan MOP2

Studi	Jenis Kegiatan Pengumpulan Data			
	Jumlah Komunitas	Jumlah FGD	Jumlah Wawancara Mendalam Sejarah Hidup	Jumlah Survei Rumah Tangga
MOP 1				
Jawa Timur	10	80	156	372
Maluku Utara				
MOP 2				
Timor Barat	5	40	75	180
Total	15	120	231	552

Metodologi MOP 1 dan 2 terutama hendak memahami dinamika kemiskinan melalui perspektif orang-orang yang mengalami sendiri proses keluar atau justru jatuh bahkan terjebak dalam kemiskinan. Di berbagai FGD, warga komunitas dipandu untuk menjelaskan pandangan dan pemahamannya tentang berbagai hal yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Dalam FGD tangga kesejahteraan (*ladder of life*), misalnya, warga diminta mengidentifikasi berbagai tingkatan kesejahteraan di komunitasnya dan kemudian menentukan rumah tangga mana saja yang termasuk dalam tiap tingkat kesejahteraan

⁴Untuk informasi yang lebih terperinci tentang pemilihan lokasi dan sampel penelitian serta penentuan intensitas konflik dalam studi MOP 1 dan 2 dapat dilihat dalam Rahayu dan Febriany (2007) 'Moving Out of Poverty: Understanding Freedom, Democracy, Governance and Growth from the Bottom-up. Indonesia Case Study: North Maluku and East Java. Country Synthesis Report', Final Draft, selanjutnya disebut Laporan MOP 1 dan Marianti dan Fillali (akan dipublikasikan) 'Moving Out of Poverty in West Timor: Understanding Social Mobility dan Poverty Dynamics in a Conflict-Affected Area', selanjutnya disebut Laporan MOP 2.

tersebut. Setelah memasukkan rumah tangga-rumah tangga di komunitas dalam berbagai tingkatan tangga kesejahteraan, dapat diketahui lebih lanjut rumah tangga mana yang bisa dikategorisasikan sebagai rumah tangga *always rich*, *mover*, *faller*, *chronic poor*. Keempat kategori itu disebut juga sebagai kelompok-kelompok transisi.

Data untuk studi ini khususnya berupa pemahaman masyarakat tentang kondisi kesejahteraan mereka dan pengalaman yang terkait dengan naik-turunnya kesejahteraan. Pemahaman dan pengalaman ini umumnya bersifat subjektif, mikro, dan lokal. Namun, metodologi yang digunakan dalam MOP 1 dan 2 berasumsi bahwa untuk melengkapi pemahaman dan gambaran kemiskinan di suatu negara secara makro dibutuhkan informasi tentang realitas di tingkat mikro (individual dan rumah tangga) dan meso (interaksi sosial, komunitas, organisasi, dll.).

1.1.3 Keluaran (*Outputs*)

Kedua studi menghasilkan laporan penelitian tentang berbagai tingkat, yaitu

- a) lima belas laporan komunitas (*Community Synthesis Reports*);
- b) dua laporan wilayah (*Moving Out of Poverty: Understanding Freedom, Democracy, Governance, and Growth from the Bottom-up. Indonesia Case Study: North Maluku and East Java* dan *Moving Out of Poverty in West Timor: Understanding Social Mobility and Poverty Dynamics in a Conflict-Affected Area*; dan
- c) satu kompilasi laporan-laporan wilayah.

1.1.4 Kompilasi MOP1 dan MOP 2

Laporan ini merupakan kompilasi dari berbagai laporan MOP 1 dan MOP 2 (khususnya dua laporan wilayah) dengan fokus utama pada kelompok yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya atau mengalami mobilitas naik (*upward mobility*). Selanjutnya, kelompok ini disebut *mover*. Yang termasuk dalam *mover* adalah semua yang meningkat kesejahteraannya, baik mereka yang berhasil keluar dari kemiskinan maupun yang belum. Dalam kompilasi ini, kelompok *mover* di tiga daerah akan dibandingkan untuk mengetahui

- a) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi upaya *mover* untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk keluar dari kemiskinan?; dan
- b) bagaimana proses peningkatan kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan terjadi (khususnya bagaimana interaksi antarfaktor yang berpengaruh)?

1.2. Temuan Beberapa Studi Lain tentang Upaya Keluar dari Kemiskinan

1.2.1 Studi *Accounting for Households' Movement Into and Out of Poverty* (the Duke Center for International Development)

a) Kerangka Pemikiran

Dinamika kemiskinan merupakan topik yang telah diteliti secara luas dan mendalam oleh berbagai lembaga dan kelompok penelitian. Salah satu kelompok penelitian yang melakukan kajian tentang dinamika kemiskinan di beberapa negara, baik negara berkembang (India, Kenya, Uganda, Peru) maupun negara maju (Amerika Serikat) adalah dari the Duke Center for International Development. Penelitian tersebut dilakukan pada periode 2002–2006. Pengumpulan data dalam studi *Accounting for*

Households' Movement Into and Out of Poverty (Memahami Pergerakan Keluar-masuknya Rumah Tangga dari dan ke dalam Kemiskinan) ini dilakukan dengan menggunakan metode *stages-of-progress* yang sangat mirip dengan metode pengumpulan data studi MOP 1 dan 2. *Stages-of-progress* juga terutama mencari pemahaman kolektif-subjektif masyarakat tentang kemiskinan dan orang miskin (bagaimana masyarakat mengartikan kemiskinan dan mengidentifikasi ciri-ciri orang miskin di komunitas mereka).

Beberapa pemikiran yang melatarbelakangi studi ini, antara lain, pertama, bahwa proses jatuh ke dalam dan keluar dari kemiskinan terkait dengan faktor-faktor yang berbeda. Oleh sebab itu, kedua tren tersebut perlu dikaji secara terpisah. Kebijakan dan program pembangunan untuk mengentaskan seseorang dari kemiskinan juga perlu dibedakan dengan kebijakan dan program pembangunan untuk mencegah orang jatuh dalam kemiskinan. Dengan demikian, untuk merancang program yang lebih tepat, perlu dilakukan disagregasi statistik kemiskinan dalam komponen-komponen yang lebih spesifik untuk tren tertentu. Disagregasi ini juga perlu dilakukan berdasarkan wilayah karena kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, budaya, dan politis yang ada di suatu wilayah tertentu.

Kedua, cara mendefinisikan dan mengukur kemiskinan sangat menentukan bagaimana realitas kemiskinan dimunculkan. Oleh sebab itu, penting untuk menyadari bahwa definisi dan cara pengukuran yang berbeda akan memunculkan realitas kemiskinan yang berbeda pula. Studi ini berusaha mencari definisi, pengukuran, dan analisis yang bisa memunculkan realitas kemiskinan yang dianggap paling mendekati pemahaman dan pengalaman masyarakat. Sekalipun demikian, definisi, pengukuran dan analisis tersebut mungkin sulit untuk digunakan dalam standardisasi kemiskinan dan untuk membandingkan kondisi antarwilayah (negara).

Ketiga, pemahaman kolektif tentang kemiskinan oleh anggota masyarakat dapat dilihat sebagai suatu konstruksi sosial kemiskinan. Upaya individu-individu dalam masyarakat untuk keluar dari kemiskinan akan mengacu pada pemahaman kolektif tersebut. Oleh sebab itu, proses keluar maupun jatuh dalam kemiskinan yang terjadi di suatu masyarakat harus dipahami dan dianalisis dengan mempertimbangkan pemahaman kolektif masyarakat tentang kemiskinan dan orang miskin. Penelitian-penelitian yang berbasis komunitas (*community-based investigations*) perlu dilakukan, jika kita ingin mendapat pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor pada tingkat mikro yang penting bagi upaya keluar dari kemiskinan (Krishna, 2005).

b) Keluar dari Kemiskinan di Berbagai Komunitas di India, Uganda, Kenya, Peru, dan Amerika Serikat

Di 35 desa di negara bagian Rajasthan, India, keberhasilan keluar dari kemiskinan terutama disebabkan oleh diversifikasi sumber pendapatan. Rumah tangga yang punya sumber pendapatan dari bidang pertanian dan nonpertanian adalah rumah tangga yang umumnya bisa meningkatkan kesejahteraannya. Mereka yang mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi di daerah perkotaan—misalnya sebagai pedagang atau mendapat pekerjaan lain—umumnya adalah laki-laki muda dalam suatu keluarga. Untuk masuk dalam kegiatan ekonomi di perkotaan ini, dibutuhkan kemampuan individu serta bantuan dari keluarga atau teman. Oleh sebab itu, temuan studi juga menunjukkan bahwa warga yang memiliki koneksi atau kontak yang bisa memberi informasi tentang berbagai peluang ekonomi di perkotaan, memiliki kesempatan lebih besar untuk berhasil. Untuk perbaikan pendapatan di sektor pertanian, hasil studi

menunjukkan bahwa proyek-proyek perbaikan pengairan, termasuk pembuatan sumur bisa membantu meningkatkan produktivitas kegiatan pertanian (Krishna, 2004: 129–131). Proses keluar dari kemiskinan di 36 desa di negara bagian Andhra Pradesh, India menunjukkan pola yang sama: diversifikasi sumber pendapatan merupakan faktor utama yang bisa membantu orang meningkatkan kesejahteraan. Diversifikasi sumber pendapatan ini umumnya dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan membuka bisnis kecil-kecilan, mengirim anggota keluarga untuk bekerja ke kota di sektor informal dan dengan menanam tanaman komersial (*comercial crops*). Selain itu, di Andhra Pradesh peningkatan kesejahteraan petani juga dibantu oleh perbaikan sistem pengairan (Krishna, 2006: 280–281).

Di 20 desa di Kenya, diversifikasi sumber pendapatan yang terkait dengan kegiatan ekonomi perkotaan juga sangat penting bagi mayoritas rumah tangga yang keluar dari kemiskinan. Sebagian rumah tangga ini memiliki anggota keluarga yang bekerja di sektor informal di kota atau melakukan kegiatan dagang kecil-kecilan. Temuan studi menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi, kemauan untuk bekerja keras, dan bepergian ke kota tidak bisa menjamin terbukanya peluang untuk terserap dalam kegiatan ekonomi kota. Oleh sebab itu, pada kasus-kasus yang berhasil biasanya terdapat koneksi atau kontak di kota (saudara, teman, dll.) yang bisa membantu memberi informasi dan fasilitas lain. Tidak semua warga desa yang miskin punya peluang untuk berintegrasi ke dalam kegiatan ekonomi perkotaan. Mereka yang tidak bisa mencari sumber pendapatan tambahan di kota harus tetap bergantung pada sektor pertanian. Bagi kelompok ini, proses keluar dari kemiskinan masih sangat dipengaruhi, khususnya oleh perbaikan infrastruktur pertanian dan penurunan biaya produksi terutama bagi petani kecil. (Krishna *et al.*, 2004: 222–223). Di 36 desa di Uganda, proses keluar dari kemiskinan terkait dengan tiga hal, yaitu (i) peningkatan produktivitas kegiatan pertanian termasuk dengan menanam tanaman komersial; (ii) diversifikasi sumber pendapatan yang terutama dilakukan dengan membuka bisnis baru; dan (iii) mendapat pekerjaan di sektor swasta.

Temuan penelitian di 40 komunitas di Peru menunjukkan bahwa rumah tangga umumnya bisa meningkatkan kesejahteraannya dan keluar dari kemiskinan terutama jika mereka memulai bisnis kecil-kecilan. Selain itu, beberapa faktor lain yang membantu rumah tangga meningkatkan kesejahteraannya adalah (i) luas tanah pertanian yang digarap; (ii) akses terhadap pasar; dan (iii) diversifikasi sumber pendapatan dari pertanian (misalnya, dengan mengembangkan peternakan) dan dari nonpertanian. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa bantuan dari saudara dan teman, termasuk yang tinggal di luar komunitas, juga bisa memperbesar peluang untuk keluar dari kemiskinan.

Penelitian di 13 komunitas di North-Carolina, Amerika Serikat menunjukkan bahwa secara umum proses keluar dari kemiskinan terkait dengan empat faktor, yaitu (i) memiliki pekerjaan penuh atau memiliki lebih dari satu pekerjaan (misalnya, karena suami-istri sama-sama bekerja); (ii) memiliki kemampuan untuk mengatur keuangan secara baik; (iii) tidak ada masalah kesehatan; dan (iv) adanya bantuan dari keluarga.

c) Pola-pola Umum Keluar dari Kemiskinan

Studi di berbagai komunitas di lima negara tersebut di atas menunjukkan beberapa pola umum keluar dari kemiskinan, antara lain

- (1) upaya keluar dari kemiskinan masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi terutama peningkatan dan stabilisasi tingkat pendapatan melalui diversifikasi sumber-sumber pendapatan;
- (2) bagi masyarakat yang memiliki mata pencaharian utama di sektor pertanian, sumber pendapatan lain yang bisa meningkatkan kesejahteraan justru berada di luar sektor pertanian, misalnya, di sektor perdagangan kecil (*petty trading*), memulai bisnis baru, atau mendapat pekerjaan lain di sektor informal perkotaan; Bagi mereka yang sepenuhnya bergantung pada sektor pertanian, peningkatan kesejahteraan juga dilakukan dengan keluar dari pola pertanian tradisional. Mereka meningkatkan pendapatan dengan menanam tanaman komersial yang mudah dipasarkan (termasuk untuk memenuhi permintaan dari daerah perkotaan). Ini berarti hubungan (*linkages*) antara daerah pedesaan dan perkotaan sangat penting dalam upaya keluar dari kemiskinan; dan
- (3) sebuah faktor sosial yang muncul adalah bantuan dari teman atau keluarga, khususnya yang bisa memberi informasi dan fasilitas untuk masuk dalam kegiatan ekonomi di perkotaan.

1.2.2 Kajian Kemiskinan 2006: *Making The New Indonesia Work for the Poor* (Bank Dunia Jakarta)

Dalam kajian kemiskinan Indonesia 2006, Bank Dunia mengidentifikasi beberapa jalan keluar dari kemiskinan di Indonesia. Menurut laporan ini terdapat dua kelompok miskin yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu pertama, kelompok miskin pedesaan yang memiliki tingkat pendidikan sangat rendah dan umumnya bekerja di sektor pertanian dengan produktivitas yang rendah. Kedua, kelompok miskin yang hidup di dekat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan bersusah payah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di pusat pertumbuhan tersebut.

Dengan mengacu pada kedua kelompok miskin di atas, disebutkan bahwa di Indonesia secara umum terdapat dua jalan keluar dari kemiskinan, yaitu

- a) Dengan berpindah dari kegiatan pertanian subsisten yang rendah produksinya ke sektor pertanian komersial. Itu dapat dilakukan dengan meningkatkan intensifikasi pertanian tanaman pangan (*food crops*) serta melakukan diversifikasi komoditas, terutama dengan menanam tanaman yang memiliki nilai lebih tinggi.
- b) Dengan meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi nonpertanian, termasuk dengan mendapat pekerjaan baru dalam sektor formal yang pendapatannya stabil dan lebih tinggi.

Dengan demikian, ada dua jenis perpindahan yang terjadi, yaitu (i) perpindahan sektoral (bagi mereka yang pindah jenis mata pencaharian, misalnya, dari mata pencaharian di sektor pertanian ke mata pencaharian di sektor nonpertanian) dan (ii) perpindahan lokasi (bagi mereka yang pindah dari area pedesaan ke area perkotaan).

Di tingkat individual,⁵ laporan kajian kemiskinan 2006 menyebutkan bahwa jalan keluar dari kemiskinan yang penting adalah melalui peningkatan produktivitas di sektor pertanian dan pertumbuhan kegiatan ekonomi nonpertanian di wilayah pedesaan. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah perlu mendorong transformasi di wilayah pedesaan dan proses urbanisasi.

⁵Data yang dianalisis adalah dari Indonesian Family Life Survei (IFLS) tahun 1993, 1997, dan 2000.

1.3. Struktur Laporan

Laporan ini terdiri dari lima bab. Bab I terdiri dari pendahuluan yang memberi penjelasan tentang dua studi Keluar dari Kemiskinan di Indonesia dan tinjauan singkat tentang studi lain yang juga mengkaji upaya keluar dari kemiskinan. Bab II memberi gambaran umum dan spesifik tentang konteks regional dan lokal, yaitu tiga wilayah (Jawa Timur, Maluku Utara, dan Timor Barat) dan 15 komunitas. Bab III mengidentifikasi karakteristik kelompok *mover* dari berbagai aspek, yaitu demografis, ekonomi, psikologis, sosial, dan kesehatan. Bab IV menjelaskan berberapa jalan keluar dari kemiskinan, terutama tentang faktor-faktor yang berpengaruh dan prosesnya. Bab V memberi kesimpulan berdasarkan temuan-temuan utama studi serta memberi rekomendasi untuk kebijakan yang bisa memfasilitasi upaya keluar dari kemiskinan.

II. KONTEKS REGIONAL DAN LOKAL

2.1 Konteks Regional: Jawa Timur, Maluku Utara, dan Timor Barat

2.1.1 Jawa Timur

Jawa Timur merupakan sebuah provinsi dengan luas sekitar 47 ribu km². Secara geografis provinsi ini terdiri dari dua bagian, yaitu wilayah bagian timur Pulau Jawa (90%) dan seluruh Pulau Madura dan Pulau Bawean (10%). Ibu kota provinsi ini adalah Surabaya yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Jawa Timur memiliki 29 kabupaten dan 9 kota. Pada 2005, jumlah penduduk Jawa Timur adalah lebih dari 35 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pertahunnya 0,45%. Di Jawa Timur, produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita pada 2000 (dengan memperhitungkan gas dan minyak) sebesar Rp1.600.000 .

2.1.2 Maluku Utara

Maluku Utara adalah sebuah provinsi dengan luas sekitar 164,4 ribu km². Provinsi ini dibentuk dengan Undang-undang No. 46 Tahun 1999 pada 4 Oktober 1999. Namun, Pemerintah Provinsi Maluku Utara baru efektif bertugas pada 2003 setelah gubernur secara definitif dipilih oleh DPRD. Ibu kota provinsi ini adalah Ternate. Maluku Utara memiliki enam kabupaten dan dua kota. Pada 2005 jumlah penduduk Maluku Utara adalah 890 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahunnya 1,78%. PDRB per kapita Maluku Utara pada 2000 (dengan memperhitungkan gas dan minyak) sebesar Rp1.100.000.

2.1.3 Timor Barat

Timor Barat adalah sebuah wilayah seluas 15,85 ribu km² yang mencakup bagian barat Pulau Timor, kecuali distrik Oecussi-Ambeno yang merupakan enklave milik Timor Leste. Wilayah ini secara administratif termasuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Kota Kupang sebagai ibu kotanya. Provinsi NTT terdiri dari 15 kabupaten dan 1 kota. Empat kabupaten, yakni Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan 1 kota, yaitu Kupang berada di wilayah Timor Barat. Pada 2004 penduduk di Timor Barat adalah sekitar 1,3 juta jiwa, sedangkan total jumlah penduduk di Provinsi NTT pada 2005 adalah sekitar 4,1 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahunnya 1,54%. PDRB per kapita NTT pada 2000 (dengan memperhitungkan gas dan minyak) sebesar Rp756.000

2.1.4 Membandingkan Ketiga Wilayah Berdasarkan Beberapa Karakteristik dan Kecenderungan

Jika dilihat dari PDRB-nya, maka tampak bahwa besarnya perekonomian di Jawa Timur jauh melampaui Maluku Utara dan NTT. Namun, dilihat dari laju pertumbuhannya, NTT memiliki laju pertumbuhan yang paling besar dan stabil. Selanjutnya, dari laju pertumbuhan PDRB per kapita dapat disimpulkan bahwa untuk 2001 dan 2002, keadaan di Jawa Timur tidak jauh berbeda dengan di NTT. Sementara itu, PDRB dan laju pertumbuhannya di Maluku Utara paling rendah dibanding dengan kedua wilayah lain.

Pada 2004 PDRB di NTT terutama didukung oleh sektor pertanian (tanaman pangan dan peternakan) serta sektor perdagangan. Di Jawa Timur PDRB terutama didukung oleh sektor industri pengolahan (makanan, minuman, dan tembakau), sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pertanian (tanaman pangan).

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (Juta Rupiah), 2001–2004⁶

Wilayah	2001	2002	2003 ^a	2004 ^b
Jawa Timur	209.838.116	217.878.040	228.301.906	241.564.892
Maluku Utara	1.911.043	1.957.716	2.032.572	2.128.108
NTT (termasuk Timor Barat)	8.221.573	8.622.491	9.016.717	9.519.960
Indonesia	1.280.638.841	1.345.814.249	1.432.865.995	1.511.756.777

Sumber: Statistik Indonesia 2005/2006 (BPS Jakarta, 2006).

^aAngka sementara.

^bAngka sangat sementara.

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (%), 2001–2004⁷

Wilayah	2001	2002	2003 ^a	2004 ^b
Jawa Timur	3,88	3,83	4,78	5,81
Maluku Utara	1,67	2,44	3,82	4,70
NTT (termasuk Timor Barat)	4,73	4,88	4,57	5,58
Indonesia	5,11	5,09	5,80	6,17

Sumber: Statistik Indonesia 2005/2006 (BPS Jakarta, 2006).

^aAngka sementara.

^bAngka sangat sementara.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto/PDRB per Kapita (%), 2001–2004⁸

Wilayah	2001	2002	2003 ^a	2004 ^b
Jawa Timur	3,19	3,16	1,76	5,19
Maluku Utara	1,22	2,00	-10,60	2,94
NTT (termasuk Timor Barat)	3,09	3,24	0,78	4,01
Indonesia	3,81	3,78	4,48	4,85

Sumber: Statistik Indonesia 2005/2006 (BPS Jakarta, 2006).

^aAngka sementara.

^bAngka sangat sementara.

Kondisi ketenagakerjaan yang terkait dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Timur dan NTT lebih baik dibandingkan dengan di Indonesia secara umum. Pada 2005, di Jawa Timur TPAK lebih rendah dan TPT lebih tinggi daripada di Maluku Utara dan NTT. Dari 2002 ke 2005 di ketiga wilayah TPAK tampak membaik. Di Maluku Utara dan NTT perbaikan kondisi

⁶Atas dasar harga konstan 2000, tanpa migas.

⁷Atas dasar harga konstan 2000, tanpa migas.

⁸Atas dasar harga konstan 2000, tanpa migas.

ketenagakerjaan juga dapat dilihat dari kecenderungan menurunnya TPT. Jika dilihat dari proporsi sektor informal dalam perekonomian ketiga wilayah, tampak bahwa kedua area di wilayah timur Indonesia (NTT dan Maluku Utara) sama-sama memiliki sektor informal yang lebih besar daripada Jawa Timur dan Indonesia secara umum.

Tabel 5. Kondisi Ketenagakerjaan di Tiga Wilayah, 2002 dan 2004

Kondisi Ketenagakerjaan	Indonesia		Jawa Timur		Maluku Utara		NTT	
	2002 ^a	2005 ^b	2002 ^a	2005 ^b	2002 ^a	2005 ^b	2002 ^a	2005 ^b
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (%)	67.7	68,02	68.2	69,50	64.2	78,25	71.8	79,45
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) (%)	10.6	10,26	8.0	8,45	11.4	7,12	6.0	5,46
Lapangan kerja di sektor informal (%)	64.1	-	64.6		73.1		86.8	

^aSumber: Indonesia Human Development Report 2004 (BPS, Bappenas, UNDP).

^bSumber: Statistik Indonesia 2005/2006 (BPS Jakarta, 2006).

Kualitas hidup dan kondisi kemiskinan di ketiga wilayah dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks kemiskinan manusia (IKM). Dari 30 provinsi di Indonesia yang dibandingkan IPM-nya, NTT menduduki peringkat yang sangat rendah (28). Jawa Timur menduduki peringkat ke-25 dan Maluku Utara ke-19. IPM Maluku Utara yang lebih tinggi dari Jawa Timur dan NTT ini perlu dipahami dengan mempertimbangkan berbagai perubahan yang terjadi di wilayah tersebut. Sebelum awal 2003, wilayah Maluku Utara hanya meliputi Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate. Karena ketiga daerah ini (terutama Kota Ternate) memiliki kondisi sosial-ekonomi yang relatif baik, data yang diolah oleh Human Development Report (HDR) 2004 bisa menunjukkan bias pada tiga daerah tersebut dan mengakibatkan angka IPM yang tinggi.

Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kemiskinan Manusia di Tiga Wilayah, 2002

Wilayah	Indonesia	Jawa Timur	Maluku Utara	NTT ⁹
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,8	64,1 (urutan ke 25)	65,8 (urutan ke 19)	60,3 (urutan ke 28)
Harapan hidup (tahun)	66,2	66,0	63,0	63,8
Tingkat melek huruf (%)	89,5	83,2	95,8	84,1
Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,1	6,5	8,4	6,0
Pengeluaran per kapita (x Rp1.000)	578,8	593,8	583,4	563,1
Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)	22,7	21,7 (urutan ke 7)	27,9 (urutan ke 22)	28,9 (urutan ke 24)
Penduduk yang diperkirakan tidak mencapai usia hingga 40 (%)	15,0	15,3	20,7	19,2
Tingkat buta huruf (dewasa)	10,5	16,8	4,2	15,9
Persentase tanpa akses ke air bersih	44,8	36,7	43,2	46,8
Persentase tanpa akses ke sarana kesehatan	23,1	22,2	42,2	32,8
Balita kurang gizi	25,8	25,5	29,6	38,8

Sumber: Indonesia Human Development Report 2004 (BPS, Bappenas, UNDP).

⁹Wilayah Timor Barat termasuk dalam Provinsi NTT.

Untuk indeks kemiskinan manusia (IKM) di ketiga wilayah tersebut, sekali lagi NTT menduduki peringkat yang paling rendah. Jawa Timur memiliki peringkat IKM yang jauh lebih tinggi dari Maluku Utara dan NTT. Hal ini sejalan dengan identifikasi tingkat kemiskinan dalam peta kemiskinan yang dibuat oleh SMERU. Sebagian besar wilayah di Indonesia bagian timur—termasuk Maluku Utara dan NTT—diidentifikasi memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan Jawa Timur memiliki tingkat kemiskinan yang menengah-tinggi. Sekalipun demikian, angka kemiskinan yang disebutkan oleh HDR 2004 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Maluku Utara (14%) adalah paling rendah dan bahkan lebih rendah daripada di Indonesia secara umum (18,2%). Selain itu, angka kemiskinan di Maluku Utara juga lebih tinggi daripada di Jawa Timur dan NTT. Penjelasan untuk hal ini sama dengan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu berbagai perubahan administratif kewilayahan bisa menyebabkan terjadinya bias terhadap beberapa daerah di Maluku Utara yang kondisinya baik (misalnya, Kota Ternate). Secara umum dapat dikatakan bahwa—di antara ketiga wilayah—masalah kemiskinan terbesar terdapat di NTT. Di wilayah ini, hambatan bagi individu, rumah tangga, dan kelompok yang berupaya keluar dari kemiskinan bisa lebih besar karena harus melakukan upaya tersebut dalam kualitas hidup yang relatif lebih buruk daripada di wilayah lain di Indonesia.

Tabel 7. Kondisi Kemiskinan di Tiga Wilayah, 2002

	Indonesia	Jawa Timur	Maluku Utara	NTT
Kondisi Kemiskinan				
Total pengeluaran per kapita (x Rp1.000/bulan)	206,3	169,4	165,4	112,6
Presentasi pengeluaran per kapita yang digunakan untuk makanan (% dari total)	58,47	60,2	66,8	71,3
Garis kemiskinan (Rupiah kapita/bulan)	108.889	106.777	117.681	86.993
Jumlah penduduk miskin (x 1000)	38.394,1	7.701,2	110,1	1.206,5
Angka kemiskinan (%)	18,2	21,9	14,0	30,7

Sumber: Indonesia Human Development Report 2004 (BPS, Bappenas, UNDP).

2.2 Konteks Lokal: Komunitas-komunitas yang Diteliti

2.2.1 Jawa Timur

Lima komunitas yang diteliti di Jawa Timur pada 2005 adalah: Semampir, Bulu, Palengaan Daja, Branta Pesisir, dan Banyupelle. Semampir dan Bulu terletak di bagian timur Pulau Jawa (Kabupaten Probolinggo), sedangkan Palengaan Daja, Branta Pesisir, dan Banyupelle terletak di Pulau Madura (Kabupaten Pamekasan). Karakteristik lain dari ke lima komunitas itu, antara lain, sebagai berikut (Rahayu dan Febriany, 2007).

- a) Semampir adalah komunitas yang berpenduduk sekitar 3.700 orang. Sebagian besar dari mereka adalah orang Madura dan beragama Islam (97%) dan 40% dari penduduk bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan pedagang (16%). Sebagian besar penduduk memiliki akses yang baik terhadap air bersih, listrik, dan transportasi publik.

- b) Bulu adalah komunitas yang berpenduduk 4.522 orang. Kelompok etnis terbesar adalah Madura dan Jawa yang mayoritas beragama Islam. Mata pencaharian utama penduduk adalah sebagai petani atau buruh tani sawah atau kebun tembakau (40–50%). Sebagian besar penduduk memiliki akses yang baik terhadap air bersih, listrik, dan transportasi publik.
- c) Palengaan Daja adalah komunitas yang berpenduduk 10.200 jiwa. Hampir seluruh penduduk adalah orang Madura dan beragama Islam. Mayoritas memiliki mata pencaharian utama sebagai petani tembakau (atau buruh tani). Sekalipun di komunitas ini penduduk memiliki akses terhadap air bersih dan listrik, belum ada angkutan umum yang melayani keluar-masuk desa selain ojek (sewa sepeda motor).
- d) Branta Pesisir adalah komunitas yang berpenduduk 4.964 jiwa. Mayoritas (70%) bekerja sebagai nelayan. Selain itu, sebagian juga bekerja sebagai pedagang ikan dan beras. Sekalipun terdapat sekelompok pendatang dari Jawa, mayoritas penduduk di komunitas ini adalah orang Madura yang beragama Islam. Di komunitas ini terdapat jaringan listrik, telepon, air bersih, dan angkutan umum.
- e) Banyupelle adalah komunitas yang berpenduduk 10.000 jiwa. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian utama sebagai petani (tembakau, padi jagung, kacang, dll). Hampir seluruh penduduk adalah orang Madura yang beragama Islam. Di komunitas ini terdapat jaringan listrik, air bersih, dan jalan aspal yang bisa dilewati kendaraan sepanjang tahun.

2.2.2 Maluku Utara

Lima komunitas yang diteliti di Maluku Utara pada 2005 terletak di dua kabupaten dan satu kota. Komunitas Gorua dan Gura terletak di Kabupaten Halmahera Utara, komunitas Soakonora dan Idamdehe Gamsungi terletak di Kabupaten Halmahera Barat dan komunitas Kampung Pisang di Kota Ternate. Karakteristik lain dari kelima komunitas itu, antara lain, sebagai berikut (Rahayu dan Febriany, 2007).

- a) Soakonora adalah komunitas yang berpenduduk 1.023 jiwa, 45% terdiri dari kelompok etnis Sanger dan 60% beragama Kristen. Sebanyak 40% penduduk bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan sebagian besar lain bekerja di sektor pertanian. Sekalipun demikian, 60–70 % yang bekerja di sektor pertanian tidak memiliki tanah. Di komunitas ini terdapat jaringan listrik, air bersih, dan berbagai fasilitas publik (telepon dan kantor pos).
- b) Idamdehe Gamsungi adalah komunitas yang berpenduduk 388 jiwa. Sebanyak 54% berasal dari kelompok etnis Sahu dan seluruhnya beragama Kristen. Hampir seluruh warga komunitas memiliki mata pencaharian sebagai petani kelapa, cengkeh, dan pala. Di komunitas ini terdapat jaringan listrik dan air bersih.
- c) Gura adalah komunitas yang berpenduduk 3.503 jiwa. Sebanyak 90% berasal dari kelompok etnis Tobelo dan 75% beragama Islam. Mayoritas warga komunitas (80%) memiliki mata pencaharian sebagai petani kelapa/kopra. Di komunitas ini terdapat jaringan listrik, air bersih, jaringan telepon, dan bahkan fasilitas publik yang baik (angkutan umum, rumah ibadah, rumah sakit).

- d) Gorua adalah komunitas yang berpenduduk 3.038 jiwa. Sebanyak 60% berasal dari kelompok etnis Tobelo dan mayoritas (87%) beragama Islam. Hampir seluruh warga komunitas memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Di komunitas ini terdapat jaringan listrik, air bersih, angkutan umum, pusat kesehatan, telepon umum, dan lain-lain.
- e) Kampung Pisang adalah komunitas yang berpenduduk 2.092 jiwa. Sebanyak 60% berasal dari kelompok etnis Tidore dan mayoritas (90%) beragama Islam. Sebagian besar (60%) warga komunitas bekerja sebagai karyawan kantor, baik sebagai pegawai negeri sipil maupun di perusahaan swasta. Sekelompok warga juga bekerja di sektor perdagangan. Sebagai komunitas yang terletak di tengah Kota Ternate, kampung pisang memiliki fasilitas publik yang sangat baik (jaringan listrik, air bersih, jaringan telepon, angkutan umum, dll.).

2.2.3 Timor Barat

Lima komunitas yang diteliti di Timor Barat pada 2006 terletak di tiga kabupaten. Komunitas Noelbaki di Kabupaten Kupang, komunitas Nule dan Naukae di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), komunitas Manleten dan Kabuna di Kabupaten Belu. Karakteristik lain dari kelima komunitas itu, antara lain, sebagai berikut (Marianti dan Fillaili, akan dipublikasikan).

- a) Noelbaki adalah komunitas yang berpenduduk sekitar 600 jiwa. Warga komunitas terdiri dari berbagai kelompok etnis (Timor, Rote, Flores, dll.) yang mayoritas beragama Kristen (60%) serta Katolik (30%). Sebagian besar warganya bermata pencaharian di sektor pertanian dan sebagian lain bekerja sebagai pedagang atau karyawan. Sebagai komunitas yang terletak dekat dengan Kota Kupang, komunitas ini memiliki jaringan listrik, air bersih, telepon, dan angkutan umum yang cukup baik.
- b) Nule adalah komunitas yang berpenduduk sekitar 2.803 jiwa. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani lahan kering. Namun, secara adat tanah-tanah di Nule masih berada di bawah kekuasaan dua keluarga bangsawan. Mayoritas warga beragama Kristen. Meski terdapat fasilitas kesehatan, tidak terdapat jaringan listrik dan angkutan umum di Nule. Air bersih terutama diperoleh dari sumur.
- c) Naukae adalah komunitas yang berpenduduk sekitar 1.754 jiwa. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Sebanyak 95% warga berasal dari suku Timor dan 70% beragama Kristen. Di Naukae masih terdapat praktik kebangsawanan lokal dan ikatan berdasarkan marga atau keluarga juga masih kuat. Di komunitas ini fasilitas umum masih sangat terbatas. Air bersih diperoleh dari sumur. Tidak semua rumah bisa dijangkau dengan kendaraan dan belum ada jaringan listrik.
- d) Manleten adalah komunitas yang cukup besar dengan jumlah penduduk mencapai 6.010 jiwa. Warga berasal dari berbagai kelompok etnis (Tetun, Marai, Kemak, Sabu, dan Dawan) dan sebagian besar beragama Katolik (90%). Di Manleten masih terdapat kebangsawanan lokal yang kuat. Satu keluarga bangsawan menguasai berbagai aspek kehidupan di komunitas termasuk tanah desa. Di komunitas ini jaringan listrik baru dapat diakses oleh sebagian warga. Air bersih umumnya diperoleh dari sumur dan angkutan umum hanya masuk desa beberapa kali dalam sehari.

- e) Kabuna adalah komunitas yang berpenduduk sekitar 2.800 jiwa. Mayoritas warga berasal dari suku Kemak dan beragama Katolik (95%). Mata pencaharian utama mereka adalah bertani lahan kering. Di komunitas ini jaringan listrik hanya dapat diakses oleh sebagian warga. Air bersih umumnya berasal dari sumur dan angkutan umum hanya masuk desa beberapa kali dalam sehari.

2.3 Mobilitas Sosial di Komunitas

2.3.1 Posisi Komunitas Berdasarkan Indeks Mobilitas

Untuk menganalisis naik-turunnya kesejahteraan di kelimabelas komunitas tersebut, dalam salah satu FGD (FGD tangga kesejahteraan) masyarakat diminta untuk mengidentifikasi tingkat-tingkat kesejahteraan di komunitas mereka (ini disebut tangga kesejahteraan) dan mengidentifikasi rumah tangga mana terletak di tingkat mana. Mereka juga diminta untuk mengidentifikasi posisi rumah tangga tersebut sekarang dan 10 tahun silam. Dengan mengetahui posisi sekarang dan 10 tahun silam, kita dapat melihat apakah suatu rumah tangga mengalami kenaikan kesejahteraan (*mover*), penurunan kesejahteraan (*faller*), tetap mempertahankan tingkat kesejahteraan sebagai golongan yang tidak miskin (*always rich*) atau tetap terjebak dalam kemiskinan (*always/chronic poor*). Setelah mengetahui berapa jumlah tiap kelompok transisi tersebut, dapat dihitung beberapa indeks mobilitas, antara lain

- indeks mobilitas (*mobility index/MI*): indeks yang menunjukkan jumlah total mobilitas di komunitas (mobilitas naik atau *upward mobility* + mobilitas turun atau *downward mobility*);
- indeks kesejahteraan neto (*net prosperity index/NPI*): hanya menunjukkan besarnya mobilitas naik (mobilitas naik–mobilitas turun). Jika NPI negatif berarti di komunitas itu lebih banyak orang yang menurun kesejahteraannya; dan
- indeks keluar dari kemiskinan (*moving out of poverty index/MOPI*): menunjukkan besarnya mobilitas kelompok miskin untuk melewati garis kemiskinan.

Tabel 8 menunjukkan besar ketiga indeks tersebut untuk tiap-tiap komunitas di tiga wilayah.

Tabel 8. Beberapa Indeks Mobilitas di 15 Komunitas di Jawa Timur, Maluku Utara, dan Timor Barat

Wilayah– Indeks Mobilitas	Komunitas					
	Jawa Timur		Palengaan Daja		Banyupelle	
	Semampir	Bulu		Branta Pesisir		
Indeks mobilitas (MI)	0,82	0,64	0,87	0,17	0,49	
Indeks kesejahteraan neto (NPI)	0,66	0,50	0,82	0,04	0,48	
Indeks keluar dari kemiskinan (MOPI)	0,42	0,17	0,00	0,19	0,05	
Maluku Utara	Idamdehe Gamsungi		Gorua		Kampung Pisang	
	Soakonora		Gura			
Indeks mobilitas (MI)	0,60	0,62	0,27	0,40	0,38	
Indeks kesejahteraan neto (NPI)	0,40	0,38	0,06	0,33	0,29	
Indeks keluar dari kemiskinan (MOPI)	0,43	0,68	0,20	0,16	0,42	
Timor Barat	Nule		Manleten		Kabuna	
	Noelbaki		Naukae			
Indeks mobilitas (MI)	0,3	0,7	0,6	0,2	0,7	
Indeks kesejahteraan neto (NPI)	0,3	0,7	0,6	0,03	0,2	
Indeks keluar dari kemiskinan (MOPI)	0,2	0,005	0,1	0,2	0,3	

Dalam Tabel 9, 15 komunitas diurutkan sesuai dengan besarnya 3 kategori indeks. Melalui pengurutan ini, dapat dipahami beberapa pola mobilitas dan kesejahteraan di antara komunitas yang diteliti.

Tabel 9. Peringkat Lima Belas Komunitas Berdasarkan Indeks-indeks Mobilitas

Indeks Mobilitas (MI)			Indeks Kesejahteraan Neto (NPI)			Indeks Keluar dari Kemiskinan (MOPI)		
1	Palengaan Daja	0,87	1	Palengaan Daja	0,82	1	Idamdehe G	0,68
2	Semampir*	0,82	2	Nule	0,7	2	Soakonora	0,43
3	Nule	0,7	3	Semampir*	0,66	3	K. Pisang*	0,42
4	Kabuna	0,7	4	Naukae	0,6	4	Semampir*	0,42
5	Bulu	0,64	5	Bulu	0,5	5	Kabuna	0,3
6	Idamdehe G	0,62	6	Banyupelle	0,48	6	Noelbaki*	0,2
7	Soakonora	0,6	7	Soakonora	0,4	7	Manleten	0,2
8	Naukae	0,6	8	Idamdehe G	0,38	8	Gura	0,2
9	Banyupelle	0,49	9	Gorua	0,33	9	Branta Pesisir*	0,19
10	Gorua	0,4	10	Noelbaki*	0,3	10	Bulu	0,17
11	K. Pisang*	0,38	11	K. Pisang*	0,29	11	Gorua	0,16
12	Noelbaki*	0,3	12	Kabuna	0,2	12	Naukae	0,1
13	Gura	0,27	13	Gura	0,06	13	Banyupelle	0,05
14	Manleten	0,2	14	Branta Pesisir*	0,04	14	Nule	0,005
15	Branta Pesisir*	0,17	15	Manleten	0,03	15	Palengaan Daja	0,00

*Komunitas (semi) perkotaan.

Berikut adalah beberapa di antara pola mobilitas dan kesejahteraan tersebut.

- a) Secara umum dapat disebutkan bahwa seluruh komunitas mengalami peningkatan kesejahteraan. Ini dapat dilihat dari indeks kesejahteraan neto (NPI) yang seluruhnya positif. Ini berarti di setiap komunitas jumlah rumah tangga yang naik kesejahteraannya lebih besar daripada jumlah rumah tangga yang turun kesejahteraannya.
- b) Di beberapa komunitas—misalnya di Palengaan Daja (Jawa Timur) dan Nule (Timor Barat)—terjadi mobilitas naik yang tinggi (NPI tinggi). Namun, peningkatan kesejahteraan ini tidak selalu berarti melewati garis kemiskinan. Banyak orang miskin yang mengalami perbaikan kondisi hidup belum berhasil keluar dari kemiskinan. Oleh sebab itu, indeks keluar dari kemiskinan (MOPI) di komunitas-komunitas seperti ini rendah.
- c) Tiga dari lima komunitas yang memiliki indeks keluar dari kemiskinan (MOPI) yang tertinggi adalah komunitas di Maluku Utara. Ini sejalan dengan indeks pembangunan manusia (*human development index*) yang menunjukkan bahwa di Maluku Utara, beberapa aspek kualitas hidup lebih baik daripada di Jawa Timur dan NTT. Sebaliknya, dari lima komunitas dengan MOPI terendah dua berasal dari Jawa Timur dan dua berasal dari NTT.
- d) Kelimabelas komunitas yang diteliti dibedakan dalam dua kategori, yakni yang terletak di daerah pedesaan dan yang terletak di daerah (semi) perkotaan. Empat komunitas yang terletak di daerah (semi) perkotaan adalah
 - (1) Semampir dan Branta Pesisir di Jawa Timur;
 - (2) Kampung Pisang di Maluku Utara (dekat Kota Ternate); dan
 - (3) Noelbaki di Timor Barat (dekat Kota Kupang).

Sebelas komunitas lainnya disebut sebagai daerah pedesaan. Komunitas urban (perkotaan) umumnya memiliki fasilitas publik yang lebih baik dan lengkap (listrik, air bersih, jalan, angkutan umum, pusat kesehatan, sekolah, jaringan telepon, kantor pos, pasar, dll.) daripada komunitas pedesaan.

Berdasarkan perbedaan urban–pedesaan ini, dapat disebutkan bahwa komunitas urban di ketiga wilayah cenderung rendah tingkat mobilitasnya (tidak dinamis) sehingga memiliki indeks mobilitas dan kesejahteraan neto yang rendah, contohnya di Branta Pesisir (Jawa Timur), Kampung Pisang (Maluku Utara), dan Noelbaki (Timor Barat). Namun, komunitas urban cenderung memiliki indeks keluar dari kemiskinan yang tinggi. Hal ini tidak berarti bahwa banyak kelompok berhasil keluar dari kemiskinan. Komunitas-komunitas urban umumnya memiliki situasi sosial-ekonomi yang lebih kompleks daripada komunitas pedesaan. Keragaman di antara warganya lebih besar dari berbagai aspek (mata pencaharian, etnisitas, tingkat pendidikan, dll.). Heterogenitas ini bisa mempersulit perpindahan dari satu tingkat sosial-ekonomi ke tingkat yang lain (khususnya yang lebih tinggi) secara massal, sekalipun stratifikasi ekonomi umumnya bersifat terbuka. Berbagai subkelompok yang berbeda dalam komunitas memiliki hambatan dan stimulus yang berbeda untuk meningkatkan kesejahteraannya.

- e) Beberapa kasus menarik yang menunjukkan pola mobilitas dan kesejahteraan yang khusus, di antaranya sebagai berikut.
- (1) Komunitas yang kesejahteraannya relatif paling tinggi adalah Semampir di Jawa Timur. Komunitas urban ini secara konsisten memiliki angka yang tinggi pada dinamika kesejahteraan, tingkat mobilitas naik, dan tingkat keluar dari kemiskinan. Dilihat dari berbagai indikator, bisa disebutkan bahwa Semampir merupakan komunitas yang paling sejahtera dibanding dengan komunitas lain. Infrastruktur fisik, sosial, dan berbagai fasilitas umum di Semampir lebih baik dan lengkap daripada di komunitas lain. Warga menyebutkan bahwa di komunitas mereka mayoritas perempuan (ibu rumah tangga) bisa mencari penghasilan tambahan dengan berdagang kecil-kecilan, misalnya, membuka warung atau kios (*pracangan*). Sumber penghasilan ini sering kali dapat dikombinasikan dengan penghasilan (tetap) dari sumber lain, misalnya, dari pekerjaan suami/istri sebagai pegawai negeri atau karyawan. Di Semampir 40% warga bekerja sebagai pegawai negeri. Tampaknya di Semampir terdapat peluang yang lebih besar untuk melakukan diversifikasi sumber pendapatan.
 - (2) Komunitas yang banyak warganya mengalami peningkatan kesejahteraan (MI dan NPI tinggi) tetapi belum keluar dari kemiskinan (MOPI rendah) adalah Palengaan Daja (Jawa Timur) dan Nule (Timor Barat). Keduanya adalah komunitas pedesaan yang relatif miskin dan hampir seluruh warga hanya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Ini berarti, naik-turunnya kesejahteraan mayoritas warga sangat rentan terhadap banyak hal yang bisa menggagalkan panen (misalnya, faktor alam). Jika panen gagal, tidak ada sumber pendapatan lain yang bisa menjadi substitusi karena kegiatan ekonomi nonpertanian sangat terbatas. Di kedua komunitas ini, diversifikasi sumber pendapatan sulit untuk dilakukan.

III. MEREKA YANG MAMPU KELUAR DARI KEMISKINAN: MENGIDENTIFIKASI KARAKTERISTIK *MOVER*

3.1 Memahami Mereka yang Mampu Keluar dari Kemiskinan

Seperti yang telah disebutkan dalam Bab I, laporan ini berfokus pada kelompok yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya (*mover*). Kelompok ini mencakup semua yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya, baik yang berhasil keluar dari kemiskinan maupun yang kesejahteraannya membaik tetapi belum bisa mencapai kondisi di atas garis kemiskinan. Dalam laporan-laporan studi *Moving Out of Poverty* di Jawa Timur, Maluku Utara, dan Timor Barat,¹⁰ dapat dilihat bahwa keberhasilan meningkatkan kesejahteraan dipengaruhi oleh berbagai faktor mikro (individu dan kondisi rumah tangga), faktor meso (berbagai interaksi sosial dan kondisi komunitas) dan faktor makro (kebijakan pembangunan dan tren ekonomi). Selain itu, keberhasilan keluar dari kemiskinan juga dapat dipahami melalui interaksi antara agensi individu atau kelompok tertentu dan struktur peluang (*opportunity structure*) yang ada.

Bab ini terutama mengidentifikasi karakteristik kelompok *mover* pada tingkat mikro yang terkait dengan agensi individunya. Untuk itu, aspek-aspek yang dikaji, antara lain

- a) aspek demografis: untuk melihat modal manusia (*human capital*) apakah yang dimiliki *mover* (gender, usia, dan tingkat pendidikan);
- b) aspek ekonomi: untuk melihat kegiatan ekonomi apakah yang dilakukan *mover* (jenis mata pencaharian, sumber pendapatan);
- c) aspek psikologis dan sosial: untuk melihat kemampuan psikologis (rasa percaya diri) dan kemampuan sosial (kepercayaan terhadap lingkungan, partisipasi dalam kegiatan sosial) yang dimiliki *mover*; dan
- d) aspek kesehatan: untuk melihat bagaimana persepsi *mover* tentang kondisi kesehatannya.

Kelompok *mover* menarik untuk diidentifikasi dan dianalisis secara khusus karena merekalah yang sedang berada di tengah-tengah jalan keluar dari kemiskinan. Dengan mengidentifikasi karakteristik *mover* dan membandingkannya dengan kelompok transisi lain (*rich, faller, poor*) dapat diketahui individu atau kelompok mana yang paling berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraannya serta hal-hal apakah yang bisa mendukung upaya untuk melakukan mobilitas ke atas (*upward mobility*) tersebut.

3.2 Aspek Demografis

3.2.1 Jenis Kelamin

Mayoritas (90%) dari kepala rumah tangga di kelompok *mover* adalah laki-laki dan hanya 10% perempuan. Proporsi ini sesuai dengan proporsi kepala rumah tangga menurut jenis kelamin di tiga wilayah (Jawa Timur, Maluku Utara, dan Timor Barat) dan di Indonesia secara umum.

¹⁰Lihat Rahayu dan Febriany (2007) dan Marianti dan Fillaili (akan dipublikasikan).

Tabel 10. Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin

Kepala Rumah Tangga	Indonesia ^a	Jawa Timur	Maluku Utara	Timor Barat
Laki-laki (%)	87,5	91	92	89
Perempuan (%)	12,5 ^b	9	8	11

^aSumber: Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2005, BPS.

^bAngka rata-rata dari 12,34% kepala rumah tangga perempuan yang tidak miskin dan 12,61% kepala rumah tangga perempuan yang miskin.

Proporsi kepala rumah tangga laki-laki (KRTL) dan kepala rumah tangga perempuan (KRTP) di kelompok *mover* sangat mirip dengan proporsi di kelompok kaya. Namun, jika kelompok *mover* dibandingkan dengan kelompok miskin, maka dapat dilihat bahwa di semua wilayah jumlah KRTP yang terdapat di kelompok miskin lebih tinggi.

Tabel 11. Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Transisi di Tiga Wilayah

Kepala Rumah Tangga	Jawa Timur				Maluku Utara				Timor Barat			
	M	R	F	P	M	R	F	P	M	R	F	P
Laki-laki (%)	91	90	94	86	92	92	88	81	89	89	64	78
Perempuan (%)	9	10	6	14	8	8	12	19	11	11	36	22

Keterangan: M: *Mover*, R: *Rich*, F: *Faller*, P: *Poor*.

3.2.2 Usia

Mayoritas kepala rumah tangga *mover* berusia 31–40 tahun (32%) dan 41–50 tahun (31%). Ini berarti kepala rumah tangga yang meningkat kesejahteraannya umumnya masih berada dalam usia kerja dan produktif. Jika dibandingkan dengan kelompok rumah tangga yang menurun kesejahteraannya (*faller*), maka tampak bahwa kepala rumah tangga *faller* berusia lebih tua. Tiga puluh persen kepala rumah tangga *faller* berada di golongan umur 51–60 tahun. Selain itu, jumlah kepala rumah tangga *faller* yang tergolong lanjut usia (di atas 60 tahun) adalah dua kali lipat dari jumlah kelompok *mover*. Menarik untuk dicatat bahwa kelompok *mover* di komunitas Semampir (Jawa Timur) memiliki struktur usia kepala rumah tangga yang mirip dengan kelompok *faller*, yaitu mayoritas (45%) berusia 51–60 tahun. Di Semampir yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pegawai negeri atau di sektor perdagangan, usia lanjut tidak terlalu menghambat untuk bekerja. Bagi mereka yang punya pekerjaan sebagai pegawai negeri (40%), usia lanjut juga tidak menyebabkan terputusnya pendapatan karena mereka mendapat pensiun. Lain halnya dengan mereka yang bekerja sebagai petani, kekuatan fisik sangat menentukan kemampuannya bekerja. Untuk petani, usia lanjut sering menjadi sebab berkurangnya kemampuan bekerja dan menurunnya pendapatan sehingga kesejahteraannya menurun.

Tabel 12. Struktur Usia Kepala Rumah Tangga Kelompok *Mover* dan *Faller*

Kelompok Transisi	Kelompok Umur (%)				
	<=30	31–40	40–51	51–60	>=60
<i>Mover</i> (N=223)	5	32	31	22	10
<i>Faller</i> (N=57)	5	19	25	30	21

3.2.3 Tingkat Pendidikan

Menurut tingkat pendidikannya, kepala rumah tangga dapat dibedakan menjadi empat kategori berikut.

- a) Mereka yang tidak mendapat pendidikan formal/tidak sekolah. Sekalipun sebagian besar buta huruf, terdapat mereka yang bisa baca-tulis.
- b) Mereka yang pernah mendapat pendidikan dasar (SD), baik tamat maupun tidak.
- c) Mereka yang pernah mendapat pendidikan menengah (SMP saja atau hingga SMA, termasuk sekolah menengah kejuruan), baik tamat maupun tidak.
- d) Mereka yang pernah mendapat pendidikan tinggi (akademi atau universitas), baik tamat maupun tidak.

Sebagian besar kelompok *mover* termasuk dalam kategori kedua (pernah mendapat pendidikan dasar, 48%) dan kategori ketiga (pernah mendapat pendidikan menengah, 31%). Jika membandingkan ketiga wilayah (Jawa Timur, Maluku Utara, dan Timor Barat), maka dapat disebutkan bahwa secara umum tingkat pendidikan *mover* di Maluku Utara lebih baik daripada di kedua wilayah lainnya. Ini sesuai dengan IPM yang menunjukkan bahwa tingkat melek huruf di Maluku Utara lebih tinggi daripada di Jawa Timur dan Timor Barat. Jika membandingkan komunitas-komunitas urban¹¹ dengan komunitas-komunitas pedesaan¹², maka dapat disebutkan bahwa *mover* yang memiliki pendidikan tinggi (universitas, akademi) sebagian besar berada di komunitas urban.

Tabel 13. Presentase Kepala Rumah Tangga menurut Tingkat Pendidikan di Tiap Kelompok Transisi (%)

Tingkat Pendidikan	Kelompok Transisi			
	<i>Mover</i>	<i>Rich</i>	<i>Faller</i>	<i>Poor</i>
1. Tidak mendapat pendidikan formal	8	7,5	24	26
2. Mendapat pendidikan dasar (SD)	48	39	44	49
3. Mendapat pendidikan menengah (SMP/SMU)	31	47	32	21
4. Mendapat pendidikan tinggi (universitas/akademi)	7	6,5	-	4
5. Lainnya	6	-	-	-

Tabel 13 menunjukkan bahwa kelompok *mover* memiliki pola yang mirip dengan kelompok *rich*. Di kedua kelompok transisi ini, jumlah yang tidak pernah mendapat pendidikan formal relatif kecil, yaitu 8% di kelompok *mover* dan 7,5% di kelompok *rich*. Pola ini berbeda dengan kelompok *faller* dan *poor*, di mana proporsi yang tidak mendapat pendidikan dasar tiga kali lebih besar.

¹¹Semampir dan Branta Pesisir di Jawa Timur, Kampung Pisang di Maluku Utara dan Noelbaki di Timor Barat.

¹²Palengaan Daja, Bulu, dan Banyupelle di Jawa Timur; Idamdehe G., Soakonora, Gorua, dan Gura di Maluku Utara; dan Manleten, Naukae, Nule, dan Kabuna di Timor Barat.

Dari ketiga komponen aspek demografis (jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan) dapat disebutkan bahwa kelompok rentan, seperti rumah tangga yang dikepalai perempuan (*female headed households*) dan kepala rumah tangga yang berusia lanjut cenderung tidak termasuk dalam kelompok *mover*. Selain itu, umumnya *mover* minimal mendapat pendidikan dasar.

3.3 Aspek Ekonomi

Secara umum, jenis mata pencaharian utama kepala rumah tangga sangat dipengaruhi oleh konteks pedesaan–urban. Ini juga terjadi pada kelompok *mover*. Karena sebagian besar komunitas yang diteliti adalah komunitas pedesaan, maka sebagian besar *mover* bekerja di sektor pertanian. Tetapi, di empat komunitas urban, jumlah *mover* yang bekerja di sektor nonpertanian cenderung lebih tinggi. Di komunitas-komunitas urban Jawa Timur, *mover* umumnya bekerja di sektor perdagangan dan jasa tidak terlatih. Di Maluku Utara dan Timor Barat, *mover* di perkotaan banyak yang bekerja sebagai pegawai negeri dan di sektor jasa terlatih. Di Semampir yang merupakan komunitas paling urban dibanding semua komunitas yang diteliti, proporsi *mover* yang memiliki pendapatan di luar sektor pertanian mencapai 90%. Sumber-sumber pendapatan *mover* di komunitas urban lain juga memiliki pola yang mirip, sekalipun jumlah yang punya pendapatan sektor nonpertanian tidak sebanyak di Semampir. Di semua wilayah, kelompok yang paling banyak memiliki sumber pendapatan dari gaji tetap adalah kelompok *rich*. Proporsi *mover* yang memiliki pendapatan dari gaji tetap lebih kecil daripada kelompok *rich*, tetapi lebih besar dari kelompok *faller* dan *poor*.

Tabel 14. Presentase Pekerjaan Utama menurut Sektor dan Kelompok Transisi (%)

Sektor	Jawa Timur				Maluku Utara				Timor Barat			
	M	R	F	P	M	R	F	P	M	R	F	P
Pertanian/ Tradisional	57	44	28	75	39	31	9	40	77	71	77	87
Nonpertanian	39	49	55	17	58	65	42	48	16	20	9	11
Lain	3	2	6	4	3	4	29	2	6	7	5	-
Tidak Bekerja	1	5	11	4	-	-	20	10	1	2	9	2

Keterangan: M: *Mover*, R: *Rich*, F: *Faller*, P: *Poor*.

Tabel di atas menunjukkan proporsi mata pencaharian berdasarkan kategori sektor pertanian dan nonpertanian di tiap kelompok transisi. Jika dibandingkan dengan kelompok transisi lain, maka secara keseluruhan proporsi *mover* yang memiliki mata pencaharian utama di sektor pertanian cukup besar. Jumlah ini lebih besar dari kelompok *rich*, tetapi lebih kecil dari kelompok *poor*. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa jumlah orang yang punya sumber pendapatan tetap dan pendapatan dari sektor nonpertanian dalam kelompok yang tingkat kesejahteraannya meningkat (*mover*) dan yang tingkat kesejahteraannya lebih tinggi (*rich*), lebih besar daripada kelompok yang menurun kesejahteraannya (*faller*) dan kelompok miskin (*poor*).¹³

¹³Di semua wilayah, proporsi kepala rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan terdapat pada kelompok *faller* dan bukan kelompok *poor*. Ini dapat dikaitkan dengan banyaknya orang lanjut usia di kelompok *faller*.

3.4 Aspek Psikologis dan Sosial

3.4.1 Persepsi tentang Kemampuan Mengontrol Keputusan Pribadi

Mayoritas *mover* beranggapan bahwa mereka bisa mengontrol semua atau sebagian besar keputusan pribadi. Pola ini sangat mirip dengan kelompok *rich*. Di ketiga wilayah, kelompok yang meningkat kesejahteraannya dan yang bisa mempertahankan kesejahteraannya memiliki rasa percaya diri yang lebih besar terhadap kemampuan mereka untuk mengontrol keputusan pribadi daripada rasa percaya diri yang dimiliki kelompok miskin atau yang menurun kesejahteraannya.

Tabel 15. Persepsi Kemampuan Mengontrol Keputusan Pribadi (%)

Mampu Mengontrol	Jawa Timur				Maluku Utara				Timor Barat			
	M	R	F	P	M	R	F	P	M	R	F	P
1. Semua keputusan	57	63	39	41	38	39	39	30	44	50	23	24
2. Hampir semua keputusan	11	20	6	10	38	35	6	42	21	20	14	21
3. Sebagian keputusan	23	12	50	37	15	16	50	21	29	23	45	43
4. Beberapa keputusan	5	2	-	10	10	10	-	7	3	7	9	12
5. Sama sekali tidak dapat mengontrol keputusan	4	2	6	2	-	-	6	-	1	-	9	-
6. Tidak tahu	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Keterangan: M: Mover, R: Rich, F: Faller, P: Poor.

3.4.2 Tingkat Kepercayaan terhadap Hubungan Sosial di Masyarakat

Di tiap wilayah, sekitar 35% kelompok *mover* beranggapan bahwa mereka bisa memercayai warga di komunitasnya. Proporsi ini tidak jauh berbeda dengan kelompok transisi lain. Sekalipun demikian, tampak bahwa kelompok *mover* atau kelompok *rich* bersikap lebih positif terhadap hubungan sosial di komunitasnya. Sekalipun demikian, jika membandingkan *mover* di berbagai komunitas, tampak bahwa di komunitas-komunitas perkotaan, seperti Semampir (Jawa Timur), Kampung Pisang (Maluku Utara), dan Noelbaki (Timor Barat), sebagian besar *mover* (85–100%) memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah terhadap hubungan sosial di masyarakat (“harus mewaspadaai orang lain di komunitas mereka”) daripada *mover* di komunitas-komunitas pedesaan.

Tabel 16. Tingkat Kepercayaan Kepada Orang Lain di Komunitas (%)

Warga lain di komunitas:	Jawa Timur				Maluku Utara				Timor Barat			
	M	R	F	P	M	R	F	P	M	R	F	P
1. Bisa dipercaya	34	37	28	41	35	31	24	28	36	45	18	33
2. Harus diwaspadai	66	63	72	59	65	69	76	72	64	55	77	67
3. Tidak tahu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-

Keterangan: M: Mover, R: Rich, F: Faller, P: Poor.

3.4.3 Partisipasi dalam Organisasi

Secara umum dapat disebutkan bahwa sebagian besar kepala rumah tangga di tiga wilayah berpartisipasi di satu atau lebih organisasi. Kelompok *mover* juga demikian. Dibanding dengan Maluku Utara dan Timor Barat, *mover* di Jawa Timurlah yang paling banyak menjadi anggota suatu organisasi. Namun, tidak ada perbedaan tingkat partisipasi *mover* di komunitas urban maupun pedesaan. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan kelompok transisi lain, maka tingkat partisipasi *mover* lebih rendah daripada kelompok *rich*, tetapi secara umum lebih tinggi dari kelompok *faller* dan *poor*.

Tabel 17. Partisipasi dalam Organisasi menurut Kelompok Transisi (%)

Berpartisipasi dalam Organisasi	Jawa Timur				Maluku Utara				Timor Barat			
	M	R	F	P	M	R	F	P	M	R	F	P
Ya	92	97	89	90	75	88	71	60	83	93	77	88
Tidak	8	7	11	10	25	12	29	40	17	7	23	12

Keterangan: M: *Mover*, R: *Rich*, F: *Faller*, P: *Poor*.

Menurut jenis organisasi yang diikuti saat ini, dapat disebutkan bahwa di tiga wilayah, umumnya orang mengikuti organisasi agama. Lebih dari separuh (52%) *mover* di Maluku dan Timor Barat menjadi anggota organisasi agama dan di Jawa Timur sebanyak 95%. Sebaliknya, lebih banyak *mover* di Maluku Utara (26%) dan di Timor Barat (48%) yang menjadi anggota organisasi ekonomi (organisasi yang terkait dengan mata pencaharian dan kredit) daripada di Jawa Timur (3%).

3.5 Aspek Kesehatan

3.5.1 Persepsi tentang Kondisi Kesehatan

Lebih dari 40% *mover* menganggap kondisi kesehatan mereka saat ini baik atau bahkan sangat baik. Sebanyak 48% menganggap kondisi kesehatan mereka biasa saja. Hanya sekitar 10% merasa kondisi kesehatan mereka buruk saat ini. Kelompok *mover* di Jawa Timur—khususnya di komunitas urban Semampir (60%)—lebih banyak yang memiliki pandangan negatif terhadap kondisi kesehatannya. Jika dibandingkan dengan kelompok transisi lain, kelompok *rich* memiliki pandangan yang lebih positif tentang kondisi kesehatan mereka daripada *mover*, sedangkan kelompok *faller* dan *poor* memiliki pandangan yang lebih negatif. Pola yang sama muncul pada persepsi tentang kondisi kesehatan selama 10 tahun terakhir. Secara umum kelompok *mover* dan *rich* memiliki pandangan yang lebih positif daripada kelompok *faller* dan *poor*.

3.5.2 Krisis Kesehatan dan Upaya Menghadapi Biaya Kesehatan yang Tinggi

Lebih dari separuh (53%) *mover* menyatakan pernah mengalami krisis kesehatan dalam 10 tahun terakhir. Proporsi ini paling kecil dibanding dengan ketiga kelompok transisi lain (*rich*: 56%, *poor* 60%, dan *faller* 64%). Di komunitas pedesaan yang relatif miskin seperti Palengaan Daja (Jawa Timur) atau Nule (Timor Barat), sebagian besar *mover* (80%) menyatakan pernah mengalami krisis kesehatan dalam 10 tahun terakhir. Pada saat terjadi krisis kesehatan yang membutuhkan biaya tinggi, *mover* mengatasinya dengan berbagai cara: 32% meminjam uang dengan bunga rendah, 29% mengambil tabungan, 15%

dengan bantuan keluarga, 13% menjual aset, 6% dengan meminjam uang yang berbunga tinggi, dan 5% dengan cara lain¹⁴. *Mover* di Jawa Timur cenderung mengatasi kebutuhan biaya kesehatan yang tinggi dengan cara meminjam uang dengan bunga rendah. *Mover* di Maluku Utara cenderung mengatasi dengan cara mengambil tabungan dan *mover* di Timor Barat dengan cara menjual aset. Cara-cara yang dilakukan kelompok *mover* tersebut mirip dengan yang dilakukan kelompok *rich*. Kelompok *faller* dan *poor* cenderung mengatasi keperluan biaya kesehatan yang mahal dengan cara meminjam uang dengan bunga rendah dan mengandalkan bantuan keluarga.

3.6 Identifikasi Kelompok *Mover*

Dari berbagai aspek yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kelompok *mover* di berbagai komunitas memiliki karakteristik umum dan khusus. Bagian ini mengidentifikasi lebih lanjut karakteristik-karakteristik *mover* dan membuat kategori tipe-tipe *mover*. Dari karakteristik dan tipe *mover* ini dapat dianalisis lebih lanjut faktor-faktor apa yang paling relevan bagi upaya keluar dari kemiskinan di suatu konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya tertentu.

Kelompok *mover* di 15 komunitas yang diteliti memiliki beberapa karakteristik umum, antara lain, sebagai berikut.

- a) Mayoritas berusia produktif: 31–50 tahun.
- b) Mayoritas pernah mendapat pendidikan formal tingkat dasar dan menengah. Di komunitas-komunitas perkotaan *mover* umumnya mendapat pendidikan menengah. Oleh sebab itu, di perkotaan tingkat pendidikan *mover* lebih tinggi daripada di pedesaan.
- c) Memiliki pendapatan yang stabil terutama karena mereka melakukan diversifikasi sumber pendapatan atau memperoleh gaji tetap. Salah satu cara diversifikasi yang menjaga stabilitas pendapatan *mover* adalah dengan memiliki sumber pendapatan dari luar sektor pertanian. Oleh sebab itu, secara umum kelompok *mover* cenderung punya ketergantungan yang lebih kecil pada sektor pertanian daripada kelompok *faller* dan *poor*.
- d) Memiliki rasa percaya diri yang relatif lebih tinggi daripada kelompok *faller* dan *poor*.
- e) Memiliki tingkat partisipasi sosial relatif tinggi. Tingkat partisipasi sosial ini khususnya dilihat dari keikutsertaan *mover* pada berbagai kegiatan sosial dan organisasi formal di masyarakat.

Selain itu, kelompok *mover* memiliki karakteristik khusus yang tidak selalu muncul di tiap komunitas yang diteliti dan tidak selalu dimiliki oleh tiap *mover*. Karakteristik khusus ini terkait dengan

a) Cara-cara Melakukan Diversifikasi Sumber Pendapatan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, stabilitas pendapatan adalah salah satu faktor yang memungkinkan individu atau rumah tangga meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraannya. Stabilitas pendapatan secara total sering terkait dengan adanya berbagai sumber yang memungkinkan individu melakukan akumulasi dan membagi risiko (*risk spreading*). Hampir separuh dari rumah tangga *mover* (48%) memiliki mata pencaharian dan pendapatan tambahan. Rumah tangga *mover* melakukan diversifikasi pendapatan baik di dalam maupun di luar sektor pertanian. Diversifikasi tersebut bisa dilakukan oleh satu anggota rumah tangga (kepala rumah tangga) atau oleh beberapa anggota rumah tangga.

¹⁴Cara lain tidak dijelaskan lebih lanjut.

Kotak 1

Mover dengan Diversifikasi Sumber Pendapatan dalam Sektor Pertanian/Tradisional

Petani Pemilik Lahan dan Buruh Tani

Adi¹⁵ (laki-laki, 55 tahun, Palengaan Daja, Pemekasan, Jawa Timur)

Saya mulai bertani sejak berumur 15 tahun. Keluarga saya dari bapak sampai saya juga bertani. Jadi pekerjaan bertani ini *klakoan toronan* (pekerjaan turun-temurun). Saya juga bekerja sebagai buruh tani pada tetangga yang tidak menggarap lahannya sendiri. Saya kerjanya dari tanam sampai panen, tapi bukan saya yang mengambil hasil panen. Orang lain yang kerja memanen hasilnya. Saya hanya menggarap tanah dan menanam saja. Saya mendapat bayaran *satos* (Rp100.000).

Kadang saya juga menyewa orang lain untuk membantu mengerjakan lahan saya. Yang membantu saya di sawah adalah *taretan dhibik* (saudara-saudara sendiri). Meskipun saudara, saya tetap membayar kalau mereka membantu saya menggarap sawah. Kalau untuk setengah hari dari jam 7 sampai jam 10 pagi, bayarannya Rp7.000. Untuk kerja garap tanah orang lain, yang bantu teman-teman petani. Teman-teman petani yang tetangga semua.

Pendapatan petani tidak tentu, tergantung musim dan hasil panennya. Kalau kerja untuk tetangga pasti dibayar *satos* (Rp100.000), tapi kalau sawah sendiri tidak tentu. Kira-kira pada saat panen, kalau panen bagus ya bisa banyak. Pernah dulu panen padi sampai dapat 5 sak (1 sak sama dengan 25 kg), pernah juga panen tembakau sampai 3 kuintal (1 kuintal sama dengan 100 kg). Harga jual hasil panen, waktu itu padi per kg harganya Rp1.500 untuk tembakau antara Rp5.000 sampai Rp30.000

Pada 1998 itu tembakau rusak semua karena hujan terus. Saya sangat rugi waktu itu. Tembakau tinggal *krosok-krosok* saja (daun tembakau yang rusak karena hujan). Hasil yang agak banyak pada 1999. Hasil yang paling banyak pada 2000. Waktu 2000 hasil tembakau banyak dan harga tinggi sampai Rp30.000. Tahun yang lain, 2001 hasil tembakau sedikit. Ini juga karena hujan. Tembakau itu, kalau kena hujan, pasti hasilnya tak bagus. Pada 2001 itu, musim kemarau tapi turun hujan. Tapi, tahun itu tak sampai rugi besar, meski rusak tapi masih ada yang bisa dijual. Pekerjaan utama saya sekarang dan dulu tetap bertani. Untuk mendapat tambahan uang, saya mengerjakan sawah tetangga.

Petani yang Menanam Berbagai Jenis Komoditas Pertanian

Ana (perempuan, 45 tahun, Nule, TTS, Timor Barat)

Setelah menikah sampai dengan 1982, selain mengurus rumah tangga karena sudah punya anak dan suami, saya juga membantu suami saya di kebun kami dan ini kami lakukan secara bersama-sama setelah suami pulang mengajar. Saat itu kami mendapatkan lahan seluas kurang lebih 5 are dari orang tua saya, selanjutnya kami juga mengusahakan tanaman yang tidak jauh berbeda dengan yang diusahakan di kebun orang tua saya sebelumnya. Hasilnya saat itu kurang memuaskan, mungkin karena kurang perhatian dari kami karena terbatasnya tenaga sementara suami saya juga harus mengajar di sekolah.

Setelah kami pindah ke Naime sejak 1982 hingga sekarang ini, saya lebih banyak bekerja di kebun sendiri seluas kurang lebih 40 are yang kami beli dari tetangga. Hampir setiap hari waktu saya habis di kebun karena saya berpikir tidak mungkin terlalu banyak mengharapkan bapak yang sibuk dengan mengajar di sekolah. Biasanya kalau tidak cape dan ada waktu baru bapak ke kebun bersama saya. Berbagai jenis tanaman baik umur panjang maupun umur pendek yang saya tanam dalam lahan tersebut. Tanaman umur panjang seperti kelapa, advokat, jeruk, lemon, dan ada juga berbagai jenis pisang dan tanaman pokok yang rutin ditanam setiap tahun, yaitu jagung, ubi kayu, dan kacang tanah. Semua tanaman umur panjang sekarang ini sudah berbuah, hanya kelapa yang baru mulai kelihatan berbuah tahun ini. Selain jagung dan ubi kayu, hasil yang lain saya jual ke pasar di So'E maupun Niki-Niki. Dari hasil penjualan inilah saya pakai untuk melengkapi penghasilan dari suami saya dalam memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk menyekolahkan anak-anak kami dan membangun rumah yang kami tempati sekarang ini. Kemudian pada 1989 kami mulai menanam bawang merah di kebun kami, hasilnya pun sangat memuaskan. Sejak itu, setiap tahun bawang merah ini selalu kami tanam bersama tanaman lainnya yang bisa kami tanam.

Diversifikasi pendapatan di dalam sektor pertanian umumnya dilakukan oleh *mover* yang berada di komunitas pedesaan dan secara umum sangat tergantung pada sektor pertanian. Di beberapa komunitas pedesaan (misalnya, Naukae, Timor Barat dan di Palengaan Daja,

¹⁵Semua nama informan dan nama tempat kerja yang tercantum dalam laporan ini adalah nama samaran.

Jawa Timur) peluang untuk melakukan kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian hampir nihil sehingga upaya diversifikasi sumber pendapatan terutama dilakukan dengan dengan bekerja sebagai buruh tani serta menanam jenis-jenis tanaman yang berbeda, termasuk tanaman komersial (*commercial crops*) seperti sayuran.

Diversifikasi pendapatan di luar sektor pertanian umumnya dilakukan oleh *mover* di komunitas perkotaan atau di komunitas yang memiliki peluang ekonomi di sektor perdagangan dan jasa. Di Jawa Timur, Maluku Utara, dan Timor Barat, umumnya *mover* memperoleh pendapatan tambahan dari sektor perdagangan kecil (*petty trading*), jasa tidak terlatih, atau jasa terlatih (termasuk menjadi tenaga kerja di luar negeri) dan buruh nonpertanian. Rumah tangga *mover* di perkotaan juga melakukan diversifikasi pendapatan dengan cara mengombinasikan pendapatan utama dari gaji sebagai pegawai negeri dengan penghasilan tambahan dari membuka warung, kios, menjadi tukang ojek, penjahit, dan lain-lain.

Kotak 2

Mover dengan Diversifikasi Pendapatan di Luar Sektor Pertanian/Tradisional

Rumah Tangga Nelayan yang Punya Usaha Berjualan Rujak

Rudi (laki-laki, 33 tahun, Branta Pesisir, Pemekasan, Jawa Timur)

Saya lahir dan dibesarkan di Dusun Lunas, Desa Branta Pesisir pada 1974. Hampir seluruh hidup saya lalui di desa ini. Kecuali pada 1991, saya pindah ke Sampang karena saya diambil anak angkat oleh orang Sampang. Pada 1992 saya balik lagi tinggal di Branta. Saya pertama kali bekerja itu pada 1985. Waktu itu saya kerja menjadi kuli angkut garam pada kapal layar. Sehari dapat sampai Rp500. Pada 1987 saya berhenti jadi kuli garam karena kapal layar mulai jarang. Pada 1987 bekerja sebagai nelayan. Yang mengajak saat itu, ya ... orang tua saya. Nelayan waktu itu memakai perahu kecil dan pakai pancing. Seharinya dapat Rp25. Pada 1991, saya kerja di Sampang. Tapi tetap menjadi nelayan. Cuma alatnya tidak pancing tapi sudah pakai jaring dengan perahu mesin kecil. Waktu itu sehari dapat Rp15.000. Yang mengajak saat itu, ya orang tua angkat saya itu.

Pada 1995 saya bekerja sebagai tukang becak. Waktu itu per hari saya dapat Rp10.000. Waktu itu kehidupan saya lebih baik dari nelayan. Becak itu saya peroleh dari teman saya. Waktu saya membeli seharga Rp150.000 dengan cara utang. Saya langsung bisa membecak tidak perlu belajar dulu. Pada 1996, saya kembali kerja nelayan. Saya berhenti jadi tukang becak karena sudah banyak yang membecak. Apalagi jadi tukang becak itu capek karena seharian penuh harus di jalan. Ketika saya jadi nelayan pada 1996, saya memperoleh Rp15.000/hari. Pada 2000, saya pernah mendapat uang Rp50.000 sehari. Tapi tahun ini paling dapat Rp5000/hari.

Karena penghasilan saya sebagai nelayan menurun, istri saya mencari pendapatan tambahan dengan berdagang. Istri saya jualan jajanan anak-anak dan rujak. Sehari dapat Rp5000. Waktu itu modal awalnya paling Rp100.000 dari utang. Ya, lumayan dapat membantu kehidupan keluarga. Sekarang tidak cukup hanya mengandalkan pendapatan saya sebagai nelayan saja, makanya saya sangat terbantu oleh istri saya yang berjualan rujak.

Rumah Tangga Petani yang Memiliki Usaha Kios

Lukas (41 tahun, Noelbaki, Kupang, Timor Barat)

Ketika saya menyelesaikan pendidikan di SMPS di Kupang pada 1987, saya sempat menganggur selama setahun karena saya ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil (PNS). Keinginan mulai nampak akan terwujud ketika pada 1988 saya diterima sebagai pegawai honorer tetap pada Balai Benih Induk (BBI) Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketika itu saya bersama tujuh orang tenaga honorer tetap bertugas untuk melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan benih bagi petani di provinsi ini dengan honor Rp75.000 per bulan.

Waktupun terus berjalan dan saya pun memiliki harapan yang besar untuk menjadi staf tetap dan bukan lagi sebagai staf honorer sehingga ketika ada penerimaan CPNS saya berharap agar bisa lulus dan diangkat menjadi PNS. Akan tetapi, harapan tersebut belum juga terwujud. Oleh karena itu, pada 1998 saya berdiskusi dengan istri untuk mengambil suatu keputusan sehingga akhirnya kami sepakat agar saya mengundurkan diri dari staf honorer tetap dan mencoba untuk berusaha sendiri.

Setelah keluar, saya mencoba untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian dengan pertimbangan bahwa Desa Noelbaki memiliki potensi untuk pengembangan usaha tersebut. Untuk mengembangkan usaha ini saya mengontrak lahan seluas 75 are dari pemilik tanah dengan harga Rp500.000 per tahun. Lahan ini digunakan untuk menanam tanaman padi sawah pada musim hujan dan semangka pada musim panas. Usaha ini menghasilkan padi sebanyak 4 ton yang dapat digunakan untuk konsumsi keluarga dan sebagian lagi dijual, sedangkan untuk usaha semangka, semuanya dijual sehingga menghasilkan Rp1.500.000. Dalam menjalani usaha ini dirasakan cukup membantu pemenuhan keluarga sehingga saya mulai serius untuk mengembangkan usaha tersebut. Pada waktu itu juga saya mulai berpikir untuk mengembangkan usaha alternatif seperti usaha kios dengan menjual berbagai kebutuhan pokok. Usaha ini mulai dirintis sejak 1995 dan istri saya yang mengelolanya sebagai suatu usaha rumahan.

Pada waktu itu juga saya melihat ada peluang lain yang dapat dikembangkan lagi yakni menjadi pedagang antarpulau untuk hasil pinang iris dari Pulau Flores yang kemudian dibawa ke Noelbaki untuk dijual. Hal ini saya lakukan karena hampir sebagian masyarakat di sini dalam kehidupan sehari-hari ataupun pada saat acara adat selalu mengonsumsi pinang. Usaha ini saya tekuni sejak 1998. Namun, keuntungannya ternyata tidak terlalu besar, yaitu hanya 3% dari modal, dan juga sangat rumit karena harus melalui berbagai pos retribusi sehingga saya mengambil keputusan melanjutkan usaha ini hanya berjalan sekitar 1 tahun saja.

Berbagai usaha ini memberikan saya banyak pengalaman dan bisa menilai sekaligus dapat menentukan bahwa usaha pertanian dan kios sebagai usaha yang dapat diandalkan sebagai mata pencaharian utama. Hal ini karena kedua usaha tersebut telah memberikan keuntungan yang cukup besar sehingga saya dapat membeli aset dan juga membangun sebuah rumah yang kami sekeluarga tinggali sampai saat ini.

b) Keterlibatan dalam Hubungan Sosial yang Menguntungkan (surplus)

Hubungan sosial (*social relation*) sering dikaitkan dengan konsep modal sosial (*social capital*), yaitu norma-norma dan jaringan sosial yang membukakan akses terhadap berbagai sumber daya dan bisa memfasilitasi tindakan kolektif (Woolcock, 2001). Kedua laporan *Moving Out of Poverty*¹⁶ menunjukkan bahwa secara umum masyarakat mengakui arti penting berbagai bentuk hubungan sosial di mana mereka terlibat di dalam rumah tangga, keluarga besar (suku, marga), komunitas (tetangga), dan bahkan di luar komunitas. Hubungan sosial tersebut seringkali penting sebagai aset dan jaring pengaman (*safety net*) pada saat mereka menghadapi berbagai persoalan. Sekalipun demikian, data juga menunjukkan bahwa hubungan sosial juga menciptakan kewajiban dan bisa menjadi beban. Di beberapa komunitas—seperti di Timor Barat—beban untuk memenuhi kewajiban adat dan keluarga bisa menurunkan kesejahteraan. Bagian ini secara khusus mengkaji sekelompok orang yang bisa memanfaatkan hubungan sosial yang menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Data survei menunjukkan bahwa sekitar 80% *mover* berpartisipasi (menjadi anggota) di sedikitnya satu organisasi. Selain itu, dua pertiga (66%) secara teratur berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan warga untuk membahas berbagai masalah dalam komunitas mereka. Secara umum, pola partisipasi sosial kelompok *mover* ini mirip dengan pola ketiga kelompok transisi lainnya. Tetapi berbagai kasus menunjukkan bahwa ada sebagian *mover* yang meningkat kesejahteraannya karena terlibat dalam hubungan sosial yang bisa mendukung upayanya untuk keluar dari kemiskinan. Data dari sejarah hidup menunjukkan bahwa hubungan sosial yang surplus ini umumnya terkait dengan orang atau kelompok yang punya posisi sosial-ekonomi yang lebih tinggi, kuat atau istimewa (*privileged*), misalnya, orang kaya atau berpengaruh baik di dalam maupun di luar desa, marga/kelompok/keluarga

¹⁶Lihat Rahayu dan Febriany (2007) dan Marianti dan Fillaili (akan dipublikasikan).

bangsawan lokal, politikus atau pejabat di luar komunitas. Dalam diskusi tentang *social capital*, koneksi dengan kalangan yang lebih tinggi ini dilihat sebagai hubungan vertikal dan disebut sebagai *linking social capital* yang membuat orang atau kelompok bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi (*to scale up*) (Woolcock, 2001).

Kotak 3

Mover dengan Hubungan dan Jaringan Sosial yang Menguntungkan

Jaringan Bisnis dari Saudara Ipar sebagai Awal Keberhasilan Bisnis

Haji Faruk (37 tahun, Palengaan Daja, Pemekasan, Jawa Timur)

Pekerjaan pertama saya adalah petani. Saya membantu mengerjakan lahan milik keluarga. Saya sekeluarga bersama-sama mengerjakan lahan itu. Sejak SD umur 7 tahun (1976) saya membantu menyiram tembakau. Kehidupan kami waktu itu dapat dikatakan cukup. Kami hidup hanya mengandalkan hasil pertanian dan dengan lima orang anak yang semuanya mengerjakan lahan tersebut, kehidupan kami Alhamdulillah cukup pangan walau tidak bisa disebut kaya.

Sejak menikah pada 1995 lalu saya dekat dengan saudara iparnya, H. Hamid yang tinggal di dusun sebelah. Oleh saudara iparnya, ia disarankan untuk mencoba usaha baru, yakni jasa angkut bahan bangunan. "Tahun 1995 saya beranikan diri untuk mencoba usaha baru itu. Berkat bantuan ipar saya, usaha saya berjalan lancar. Saya dikenalkan kepada para pemilik toko bahan bangunan di Pamekasan. Saya juga belajar menyetir mobil padanya sehingga sebelum punya *pick-up* saya sudah bisa *nyetir*. Sejak itu, dengan modal sebuah *pick-up* T 120, saya memulai usaha baru ini. Hasilnya sangat menggembirakan. Dalam sekali angkut bahan bangunan (batu, bata, genting, pasir, keramik) saya bisa mendapat keuntungan bersih Rp300.000. Pernah dalam sehari saya empat kali mengangkut bahan bangunan hingga saya bekerja sampai larut malam.

Awalnya, langganan saya terbatas di Desa Palengaan Daya namun kemudian sampai ke desa-desa di Pamekasan hingga Robatal (Sampang). Waktu itu saya sering mendapat keuntungan hingga Rp500.000 per hari selama hampir sebulan berturut-turut. Saat itu di Angsoka Temor memang hanya saya yang memiliki usaha ini. Saya betul-betul diuntungkan oleh keadaan ini. Saya juga beruntung karena memiliki banyak teman sejak mondok di pesantren Bettet. Mereka membeli bahan bangunan pada saya dan berkat hubungan yang baik itu, mereka tidak segan-segan memakai jasa saya bila keluarga atau teman-temannya membutuhkan bahan bangunan. Saya memberi uang jasa kepada mereka yang memberi informasi itu sebesar Rp25.000. Berkat bantuan mereka pula usaha saya bisa berkembang baik. Kesejahteraan keluarga saya makin lama makin meningkat. Sebagai gambaran besarnya keuntungan yang saya peroleh dari usaha ini, saya bisa melunasi utang saya waktu membeli *pick-up* hanya dalam 1 tahun.

Pada 2000, *pick-up* saya jual dan membeli truk besar untuk mengangkut bahan bangunan. Ini saya lakukan karena sejak kehidupan saya meningkat sebagai pengusaha jasa angkut bahan bangunan, banyak orang beramai-ramai membuka usaha serupa. Seperti biasa, bila terlalu banyak yang menjual dan pembeli jumlahnya tetap maka pedagang berlomba-lomba menurunkan harga barang. Begitu pula yang terjadi pada saya saat itu. Karena saya tidak mau menurunkan harga, pelanggan saya mulai berkurang. Sejak itu mulailah terpikir oleh saya untuk menggunakan truk yang daya muatnya lebih besar daripada *pick-up*. Dengan mendatangkan bahan bangunan dalam jumlah besar, saya bisa menurunkan ongkos kirim. Namun keuntungan yang saya dapatkan menjadi lebih besar karena jumlah barangnya lebih banyak. Dari satu truk penuh bahan bangunan seperti pasir, saya mendapat keuntungan Rp400.000. Dua puluh lima ribu rupiah saya berikan pada orang yang memberi informasi pemesanan (makelar), Rp25.000 untuk beli bensin dan Rp25.000 untuk upah kuli. Jadi, keuntungan saya Rp325.000.

Sejak 1999 saya mulai berdagang tembakau. Sebenarnya hal ini bukan sesuatu yang baru. Di dusun ini cukup banyak orang bekerja sebagai pedagang tembakau. Pekerjaan ini menarik perhatian saya karena tembakau telah akrab dengan kehidupan saya dan keluarga saya. Lebih dari itu, orang tua dan saudara-saudara saya amat mendukung. Kami semua petani tembakau dan belum ada yang menjualnya langsung ke gudang tembakau di Pamekasan. Jadilah akhirnya saya berdagang tembakau. Tembakau hasil panen dari lahan saya dan saudara-saudara saya, itulah yang saya jual. Keuntungan dari pekerjaan ini lumayan besar. Sulit untuk menghitung pendapatan dari usaha ini karena ini tergantung pada musim dan harga tembakau yang ditentukan oleh gudang. Tahun lalu saya untung, entah tahun ini.

Pada 2002 saya buka toko bahan-bahan makanan pokok di rumah saya. Istri saya yang menjaga toko itu. Hasilnya lumayan besar karena waktu itu toko serupa di sini tidak banyak. Dalam setahun rata-rata saya bisa mengumpulkan keuntungan lebih dari Rp3.000.000.

Pendapatan saya saat ini berasal dari pertanian dan perdagangan tembakau, usaha jasa angkutan bahan bangunan dan perdagangan bahan-bahan kebutuhan pokok. Dari semua pekerjaan itu, pendapatan dari usaha jasa angkutan bahan bangunan adalah yang paling besar. Karena sibuk sebagai pengusaha jasa angkutan bahan bangunan, saya mempekerjakan orang lain untuk mengolah lahan saya.

Membangun Jaringan di Partai Politik melalui Kedekatan dengan Politisi Daerah

Ambrosius (55 tahun, laki-laki, Kabuna, Belu, Timor Barat)

Kalau hubungan dengan tetangga atau teman yang paling penting itu dengan Edwin. Itu dia mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Ada pengaruhnya pada kesejahteraan kami. Waktu Pemilu 1999 lalu, dia meminta pada saya untuk mencarikan dukungan dari masyarakat. Saya yang mencarikan dukungan pada dia. Setiap ada kegiatan saya dikasih uang. Pada saat dia jadi anggota dewan, dia juga sering ke sini dan bantu-bantu saya dengan kasih uang dan beras. Dia orangnya baik sama saya. Saya dulu pada Pemilu 2004 juga mencalonkan diri menjadi calon legislatif, tapi karena saya pendidikan kurang, saya tidak lolos. Tapi saya tetap diminta untuk menghimpun suara dan mencari dukungan masyarakat.

Kalau pengalaman yang paling penting itu waktu saya menjadi Hakim Perdamaian Desa (HPD). HPD itu dipilih langsung oleh masyarakat. Dengan menjadi HPD itu saya bisa mendidik dan membantu masyarakat. Bisa memberikan ajaran-ajaran yang baik dan mengajarkan yang jelek-jelek dibuang saja. HPD itu bekerja jika ada masalah di dusun yang tidak bisa diselesaikan oleh aparat dusun. Permasalahan tidak selesai, akan dibawa dan diselesaikan oleh HPD. Biasanya masalah perkelahian, masalah perempuan, dan harta dalam suku. Satu tahun biasanya masalah bisa lima sampai enam masalah. Saya menjadi HPD sejak 1999 sampai sekarang. Menjadi HPD tidak ada batasan karena itu pilihan masyarakat berdasarkan kepercayaan. Kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi, masyarakat bisa mengusulkan untuk diganti.

Sekarang saya ikut organisasi. Memang saya pendidikan kurang, tapi masuk menjadi anggota partai politik. Saya masuk partai politik untuk ambil ilmunya, dan saya kembali untuk mendidik dan membangun masyarakat. Sekarang saya masuk menjadi Wakil Ketua III Partai Patriot Pancasila. Dulu saya pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI-P. Sekarang ini PDI-P ada perpecahan. Itu karena sekarang ini Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P mengatur strukturnya dengan banyak memasukkan orang Cina. Hampir semua Ketua PAC sekarang orang-orang Cina. Sementara itu, kami yang mengabdikan lama tidak diperhatikan. Orang Cina punya uang untuk menjadi pengurus partai, sedang kita tidak punya uang. Ini yang rusak, Pak. Makanya Pemilu 2004 lalu PDI-P kalah di sini. Dulu pada 1999, di sini merah semua. Saya punya bendera besar PDI-P dan tiap rumah ada bendera kecil PDI-P. Meski begitu, hati saya tetap PDI-P. Saya keluar dari PDI-P bukan karena partainya, tapi karena orangnya. Jadi nanti saya akan usul kepada Bu Mega supaya ada perbaikan di PDI-P.

c) Besarnya Mobilitas ke Atas yang Dicapai

Dalam bab-bab sebelumnya telah disebutkan bahwa *mover* adalah kelompok transisi yang mampu meningkatkan kesejahteraannya atau melakukan mobilitas ke atas (*upwardly mobile*). Berdasarkan besarnya mobilitas ke atas yang dicapai, *mover* dapat dibedakan menjadi dua subkelompok, yaitu (a) mereka yang mampu meningkatkan kesejahteraannya dan keluar dari kemiskinan serta (b) mereka yang mampu meningkatkan kesejahteraannya tetapi belum mampu keluar dari kemiskinan. Dalam Bab II diuraikan bahwa terdapat komunitas-komunitas yang mengalami peningkatan kesejahteraan (memiliki indeks mobilitas/MI dan indeks kesejahteraan neto/NPI yang tinggi) tetapi banyak warganya belum bisa keluar dari kemiskinan (memiliki indeks keluar dari kemiskinan/MOPI yang rendah). Dua contoh komunitas demikian adalah Palengaan Daja di Jawa Timur dan Nule di Timor Barat. Dalam kedua komunitas tersebut terdapat banyak *mover* yang belum keluar dari kemiskinan. Mereka umumnya secara ekonomi masih sangat tergantung pada sektor pertanian dengan pendapatan yang kecil. *Mover* dengan karakteristik khusus ini, dapat dilihat sebagai kelompok *mover* yang paling rentan. Sekalipun dalam 10 tahun terakhir mereka relatif lebih sejahtera, perbaikan kesejahteraan ini mudah diganggu oleh berbagai keadaan seperti faktor alam (bencana banjir, kekeringan, penyakit tanaman) yang menyebabkan gagal panen, biaya produksi yang tinggi dan harga komoditas yang tidak stabil. Selain itu, perlu dicatat bahwa

di komunitas seperti Palengaan Daja dan Nule, peluang untuk melakukan kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian sangat kecil sehingga sulit bagi masyarakat untuk melakukan diversifikasi mata pencaharian dan membagi risiko finansial di luar sektor pertanian.

Kotak 4 **Mover yang Belum Melewati Garis Kemiskinan**

Mengelola Pendapatan yang Minim

Samsul (50 tahun, laki-laki) Palengaan Daja, Pemekasan, Jawa Timur

Saya ini jadi petani sudah seumur hidup, saat ini luas tanah saya sekitar 0,25 hektare. Tanah seluas itulah yang saya kerjakan dari dulu hingga sekarang. Saya menanam tembakau, padi, jagung, ketela pohon, dan cabe. Hasilnya tidak cukup, tapi dicukup-cukupkan saja. Untuk mengerjakan tanah, kami mempekerjakan tiga hingga empat orang mulai dari mencabuti rumput, mencangkul, hingga melubangi tanah. Mereka butuh waktu sampai 20 hari untuk itu. Upahnya Rp16.000 sehari kalau bekerja mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Berarti untuk upah buruh, saya mesti keluar uang Rp1.280.000, belum termasuk rokok, kopi, dan makan siang. Untuk beli beltah (bibit) butuh Rp25.000 (harga bibit Rp5.000 untuk 1000 bibit tembakau). Pupuk saya pakai 2 sak (100 kilo) harganya Rp110.000. Setelah menunggu 4 bulan, saya bisa panen 50 kilo tembakau. Bila harga tembakau Rp10.000 per kilo, saya bisa mendapatkan uang Rp500.000, jauh sekali dibandingkan pengeluaran saya tadi, Rp1.415.000.

Saya baru beruntung kalau kemarau, panas terus dan tidak pernah hujan, itu tembakau saya bisa dipanen empat kali: panen pertama harganya Rp3.000 per kilo, panen kedua Rp5.000 per kilo, panen ketiga Rp10.000 per kilo, dan panen keempat Rp22.000 per kilo. Keuntungan saya biasanya dari panen terakhir, yaitu ketika memotong daun yang paling atas. Kalau beruntung, saya bisa mendapat uang Rp3.000 sampai Rp3.500.000. Rp1.500.000 untuk membayar utang, Rp1.000.000 untuk konsumsi selama 4 bulan menunggu panen dan Rp1.000.000 sisanya untuk konsumsi sampai 6 bulan ke depan. Itulah yang saya maksud mencukup-cukupkan pendapatan.

Menanam padi malah lebih buruk. Modal untuk menanam padi hampir sama dengan tembakau sementara hasilnya hanya 5 sak atau 250 kilo. Bila harga 1 sak padi Rp64.000, saya mendapat penghasilan Rp320.000. Menanam kacang tanah yang paling merugikan. Untuk pupuk dan bibitnya saja saya keluar uang Rp200.000. Setelah panen, saya dapat 200 kilo (4 sak) harga per sak Rp50.000. Jumlah itu sama dengan biaya bibit dan pupuk, artinya saya rugi upah buruh tani. Semua usaha tadi memang ada hasilnya, tapi sedikit. Sebetulnya kurang, tapi dicukup-cukupkan saja.

IV. BERBAGAI JALAN KELUAR DARI KEMISKINAN: FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH DAN PROSESNYA

4.1 Memahami Jalan Keluar dari Kemiskinan

Jika Bab II menguraikan konteks regional dan lokal di mana upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dilakukan dan Bab III mengidentifikasi kelompok yang melakukan upaya-upaya tersebut, maka Bab IV ini mengkaji bagaimana upaya-upaya itu dilakukan. Pemahaman tentang upaya sekelompok orang untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan keluar dari kemiskinan dilakukan dengan mengkaji dua hal, yaitu: (i) faktor-faktor yang berpengaruh positif atau membantu peningkatan kesejahteraan dan (ii) pola-pola pentahapan (*sequencing*) dari berbagai faktor tersebut.

Dalam bab ini, upaya meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan terutama dilihat sebagai suatu proses yang tidak bisa dilepaskan dari konteks geografis, sosial, ekonomi, budaya, dan politisnya. Berbagai konteks tersebut bisa mendukung atau justru menghambat upaya individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, setiap individu atau kelompok harus berinteraksi dengan individu atau kelompok lain dalam melakukan upayanya. Interaksi ini bisa berbentuk saling ketergantungan, kerja sama, aliansi, atau bisa juga berbentuk kompetisi dan konflik.¹⁷ Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dalam bab ini faktor-faktor yang membantu peningkatan kesejahteraan akan dikaji dari perspektif mereka yang mengalami proses peningkatan kesejahteraan (dalam studi ini: menurut kelompok-kelompok transisi, terutama *mover*). Proses keluar dari kemiskinan akan dipahami melalui bagaimana faktor-faktor pada tingkat mikro terkait dan saling memengaruhi dengan faktor-faktor pada tingkat makro. Selain itu, proses keluar dari kemiskinan juga akan dikaji melalui pendekatan struktur dan agensi.

4.2 Faktor-Faktor yang Meningkatkan Kesejahteraan menurut Kelompok-kelompok Transisi: Perspektif dari Bawah

Bagian ini akan mengkaji berbagai faktor yang membantu meningkatkan kesejahteraan melalui perspektif dari bawah (*bottom-up perspective*), yaitu menurut seluruh responden survei rumah tangga dan wawancara sejarah hidup yang terbagi dalam empat kelompok transisi, yaitu *mover*, *rich*, *faller*, dan *poor*. Seperti dalam bab-bab sebelumnya, kelompok *mover* akan dibahas secara khusus. Pertama, dengan melihat pandangan kelompok *mover* secara umum dan kedua, dengan melihat perbedaan pandangan antara kelompok *mover* di tiga wilayah.

Menurut responden survei rumah tangga, sebagian besar faktor yang dianggap bisa membantu meningkatkan kesejahteraan adalah faktor ekonomi (faktor yang terkait dengan kondisi ekonomi dan keuangan individu/rumah tangga). Separuh dari faktor-faktor ekonomi yang disebutkan itu menyangkut mata pencaharian atau kegiatan untuk mendapatkan penghasilan (*income generating activities*). Dengan kata lain, bagi mayoritas

¹⁷Pemahaman ini mengacu pada beberapa konsep dalam sosiologi figurasi (*figurational sociology*) atau sosiologi proses (*process sociology*) yang dikembangkan oleh Norbert Elias (Lihat Ritzer, 2004: 366–377).

responden peningkatan kesejahteraan terutama diartikan sebagai perbaikan kondisi ekonomi dengan cara mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Menurut mayoritas (85%) responden survei rumah tangga, beberapa cara mendapatkan penghasilan yang lebih besar, antara lain, dengan

- a) melakukan pekerjaan lain atau membuka usaha lain yang menghasilkan pendapatan lebih besar;
- b) melakukan lebih dari satu pekerjaan agar memiliki beberapa sumber pendapatan;
- c) menanam beberapa jenis tanaman, terutama yang mudah dipasarkan dan varietas unggul, serta menggunakan teknologi yang lebih baik (khusus bagi mereka yang bekerja di sektor pertanian); dan
- d) mendapat pekerjaan yang memiliki gaji tetap (seperti menjadi PNS atau karyawan).

Selain itu, kondisi keuangan juga bisa menjadi lebih baik jika pengeluaran (beban finansial) berkurang terutama pengeluaran untuk biaya pendidikan anak. Oleh sebab itu, jika anak sudah selesai sekolah, kesejahteraan rumah tangga bisa meningkat. Selanjutnya, bekerja keras juga dianggap sebagai faktor yang meningkatkan kondisi ekonomi. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan juga dikaitkan dengan motivasi.

Tabel 18. Faktor-faktor yang Meningkatkan Kesejahteraan menurut Semua Kelompok Transisi

No	Faktor yang Meningkatkan Kesejahteraan	Proporsi (%)	Jenis Faktor
1.	Pekerjaan sama, tetapi pendapatan naik	34	Ekonomi/ Mata pencaharian
2.	Mendapat pekerjaan yang lebih baik/alih mata pencaharian	14	Ekonomi/ Mata pencaharian
3.	Bekerja keras	9	Ekonomi/ Motivasi
4.	Diversifikasi pendapatan/pendapatan lebih dari satu	7.5	Ekonomi/ Mata pencaharian
5.	Punya usaha yang lebih baik	7	Ekonomi/ Mata pencaharian
6.	Anak selesai sekolah dan/atau mendapat pekerjaan	5	Ekonomi/ Keluarga
7.	Menjadi pegawai negeri sipil (PNS)	4.5	Ekonomi/ Mata pencaharian
8.	Diversifikasi tanaman	3	Ekonomi/ Mata pencaharian
9.	Hasil panen lebih baik karena menggunakan teknologi dan/atau varietas yang lebih baik	3	Ekonomi/ Mata pencaharian
10.	Pernikahan	2	Nonekonomi/ Keluarga
11.	Pindah ke rumah baru/punya rumah dengan kondisi yang lebih baik	2	Nonekonomi/ Kualitas hidup
12.	Mendapat sertifikat tanah	2	Nonekonomi/ Status hukum
13.	Perempuan dalam keluarga bekerja	1	Ekonomi/ Keluarga
14.	Akses ke pasar lebih baik	1	Ekonomi/ Infrastruktur
15.	Lainnya	5	-

Keterangan: faktor 1 sampai 9 mewakili lebih dari 85% responden survei di ketiga wilayah.

Faktor-faktor yang diidentifikasi oleh responden survei (*mover*, *rich*, *faller*, dan *poor*) tersebut di atas relatif sama dengan faktor-faktor yang diidentifikasi oleh kelompok *mover* saja. Sekalipun demikian, faktor-faktor tersebut menduduki peringkat yang berbeda. Contohnya: bagi *mover*, penggunaan teknologi pertanian dan varietas yang lebih unggul merupakan faktor kedua (dipilih oleh 10% dari responden *mover*), sedangkan menurut responden survei secara umum, faktor ini berada pada urutan kesembilan (hanya dipilih oleh 3% responden). Faktor ini terutama dipilih oleh para *mover* di komunitas pedesaan yang sangat tergantung pada sektor pertanian, khususnya yang menanam tanaman yang akan diolah lagi untuk industri (*primary crops*). Komunitas-komunitas itu, antara lain, Palengaan Daja dan Banyupelle (Jawa Timur) yang tergantung pada tembakau serta Idamdehe Gamsungi dan Gura (Maluku Utara) yang tergantung pada kelapa, cengkeh, dan pala.

Tabel 19. Faktor-faktor yang Meningkatkan Kesejahteraan menurut Kelompok *Mover*

No	Faktor Yang Meningkatkan Kesejahteraan	Proporsi (%)	Jenis Faktor
1.	Pekerjaan yang sama, tapi pendapatan naik	40	Ekonomi/ Mata pencaharian
2.	Hasil panen lebih baik karena menggunakan teknologi dan/atau varietas yang lebih baik	10	Ekonomi/ Mata pencaharian
3.	Mendapat pekerjaan lebih baik/alih mata pencaharian	9	Ekonomi/ Mata pencaharian
4.	Bekerja keras	9	Ekonomi/ Motivasi
5.	Usaha baru yang lebih baik	7	Ekonomi/ Mata pencaharian
6.	Diversifikasi pendapatan/pendapatan lebih dari satu	6	Ekonomi/ Mata pencaharian
7.	Anak selesai sekolah atau dapat pekerjaan	5	Ekonomi/ Keluarga
8.	Peningkatan kondisi rumah	3	Nonekonomi/ Kualitas hidup
9.	Perempuan dalam keluarga bekerja	3	Ekonomi/ Keluarga
10.	Diversifikasi tanaman	2	Ekonomi/ mata pencaharian
11.	Mendapat kredit	2	Ekonomi/ Akses ke sumberdaya finansial
12.	Lainnya	4	-

Keterangan: faktor 1 sampai 6 mewakili lebih dari 80% seluruh responden *mover* di tiga wilayah.

Tabel 20 menunjukkan faktor-faktor yang identifikasi oleh *mover* di Jawa Timur, Maluku Utara, dan Timor Barat. Di tiap wilayah tersebut, kelompok *mover* mengidentifikasi faktor yang sama sebagai faktor pada peringkat pertama yang bisa meningkatkan kesejahteraan, yaitu “melakukan pekerjaan yang sama tetapi dengan pendapatan yang lebih baik”. Faktor ini juga menduduki peringkat pertama pada identifikasi yang dilakukan oleh seluruh responden survei (seluruh kelompok transisi) dan kelompok *mover* secara keseluruhan. Sekalipun demikian, terdapat beberapa perbedaan menarik di ketiga wilayah sesuai dengan kondisi lokalnya. Berikut adalah perbedaan-perbedaannya.

- a) *Mover* di Jawa Timur—khususnya di komunitas urban seperti Semampir dan Branta Pesisir—menganggap bahwa kesejahteraan bisa meningkat jika perempuan dalam keluarga juga bekerja. Di komunitas-komunitas tersebut terdapat lebih banyak jenis kegiatan ekonomi—misalnya membuka warung, industri rumah, dan lain-lain—yang dapat dikombinasikan dengan tugas-tugas reproduktif perempuan. Oleh sebab itu, sangat memungkinkan bagi para perempuan (ibu-ibu) untuk juga mencari penghasilan.
- b) *Mover* di Maluku Utara menganggap berkurangnya biaya pendidikan (karena anak sudah selesai sekolah) sebagai faktor yang bisa memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga. Dalam Bab II, disebutkan bahwa tingkat melek huruf dalam indeks pembangunan manusia di Maluku Utara lebih tinggi dibanding wilayah-wilayah lain serta lebih tinggi dari Indonesia secara umum. Hal ini bisa dikaitkan dengan kecenderungan yang lebih besar dalam masyarakat untuk melakukan investasi pada pendidikan. Akibatnya, biaya pendidikan merupakan pos pengeluaran yang diprioritaskan dan bisa membebani keuangan rumah tangga.
- c) *Mover* di Timor Barat—khususnya di komunitas yang sangat bersifat pedesaan seperti di Nule—menganggap diversifikasi sumber pendapatan dan jenis-jenis tanaman sebagai faktor yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Di komunitas pedesaan Timor Barat sumber penghasilan dari sektor pertanian sering kali rentan terhadap fluktuasi karena umumnya tergantung pada pertanian lahan kering dengan komoditas untuk dikonsumsi sendiri dan kurang menarik untuk dipasarkan (jagung, ketela, singkong). Oleh sebab itu, salah satu cara meningkatkan pendapatan adalah dengan diversifikasi tanaman, terutama sayuran (kacang panjang, bawang merah, dll.) dan melakukan pekerjaan sampingan, misalnya, dengan menjadi pedagang kecil.

Tabel 20. Faktor-faktor yang Meningkatkan Kesejahteraan menurut Kelompok *Mover* menurut Wilayah

Jawa Timur			Maluku Utara			Timor Barat		
No	Faktor	%	No	Faktor	%	No	Faktor	%
1	Pekerjaan sama, pendapatan lebih baik	39	1	Pekerjaan sama, pendapatan lebih baik	32	1	Pekerjaan sama, pendapatan lebih baik	48,5
2	Punya usaha yang lebih baik	15	2	Mendapat pekerjaan lebih baik/alih mata pencaharian	20	2	Bekerja lebih keras	9
3	Bekerja lebih keras	9.5	3	Jadi pegawai negeri sipil (PNS)	12	3	Diversifikasi pendapatan	8
4	Perempuan di keluarga bekerja	7.5	4	Anak selesai sekolah	8	4	Diversifikasi tanaman	7

Keterangan: faktor 1 sampai 4 sudah mewakili lebih dari 70% responden *mover* di tiap wilayah.

4.3 Mengidentifikasi Proses Keluar dari Kemiskinan

Bagian sebelumnya (4.2) mengidentifikasi berbagai faktor positif yang membantu meningkatkan kesejahteraan individu dan rumah tangga. Identifikasi ini dilakukan menurut pandangan seluruh responden survei (seluruh kelompok transisi), seluruh kelompok *mover* dan kelompok *mover* di tiap wilayah. Bagian ini menguraikan lebih lanjut bagaimana berlangsungnya proses peningkatan kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan yang terkait dengan faktor-faktor positif tersebut.

4.3.1 Proses Peningkatan Kesejahteraan

Proses peningkatan kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan bisa digolongkan dalam beberapa pola berikut.

a) **Mengerjakan Pekerjaan/Mata Pencaharian yang Sama Tetapi Memiliki Penghasilan yang Lebih Besar (Meningkat)**

Sedikitnya sepertiga dari para responden survei (termasuk kelompok *mover*) menyebutkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan adalah melakukan pekerjaan yang sama, tetapi dengan pendapatan yang lebih baik. Bagi mereka, mata pencaharian yang dilakukan saat ini masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Tetapi perlu dilakukan beberapa perbaikan agar penghasilan bisa lebih besar dan stabil sehingga kesejahteraan bisa meningkat. Dalam studi ini, mayoritas responden (termasuk *mover*) memiliki mata pencaharian utama di sektor pertanian karena komunitas yang diteliti sebagian besar adalah komunitas pedesaan. Bagi para petani tersebut, hal-hal yang menghambat peningkatan penghasilan adalah produktivitas yang rendah; kerentanan usaha tani, yaitu risiko tinggi untuk mengalami gagal panen karena gangguan alam (musim hujan atau kemarau yang berkepanjangan, wabah penyakit tanaman, bencana alam); tanah yang kurang subur; sistem dan teknik pengairan yang tidak memadai sehingga kurang air di musim kemarau dan tidak bisa bertanam sepanjang tahun; kurang modal untuk produksi; harga komoditas yang tidak stabil bahkan cenderung turun; pemasaran hasil pertanian tidak baik; dan jeratan utang.

Sebagian dari para *mover* adalah para petani yang bisa mengatasi hambatan di atas. Dalam beberapa kasus, para petani bisa meningkatkan pendapatannya, antara lain, karena hal-hal berikut.

- (1) Adanya sistem dan teknik pengairan yang memungkinkan petani untuk mengairi lahannya secara memadai. Para petani tembakau di komunitas Palengaan Daja dan Banyupelle (Jawa Timur) sangat tergantung pada pompa air untuk mengairi lahan mereka. Para petani di Noebaki (Timor Barat) sangat terbantu oleh bendungan Tilong. Dengan adanya bendungan tersebut, para petani Noebaki bisa menanam padi hingga dua kali dalam setahun. Sebelumnya mereka hanya bisa menanam sekali setahun karena minimnya hujan. Pipanisasi dan perlindungan air di Naukae menyebabkan petani dapat menanam komoditas yang mudah dipasarkan (misalnya, sayuran) sehingga pendapatan mereka pun meningkat.
- (2) Dilakukannya diversifikasi tanaman. Sekelompok petani di Nule, Naukae, Manleten, dan Kabuna (Timor Barat) selain menanam jagung, ketela, dan singkong, mereka juga menanam beberapa jenis sayuran dan buah-buahan yang mudah dipasarkan (misalnya: kacang panjang, bawang merah, jeruk, kemiri, dll.).
- (3) Penggunaan varietas yang lebih unggul. Hal ini terutama dialami oleh petani kelapa, cengkeh, dan pala di komunitas-komunitas pedesaan di Maluku Utara.
- (4) Adanya akses yang lebih baik terhadap pasar. Di Naukae (Timor Barat), misalnya, pendapatan para petani meningkat karena ada permintaan yang lebih besar terhadap sayuran yang mereka tanam. Akses terhadap pasar juga bisa menjadi lebih baik dengan adanya jaringan jalan dan transportasi yang memadai. Hal ini

terutama dirasakan oleh para petani di daerah yang relatif jauh dari pusat-pusat ekonomi (misalnya, tempat usaha dan pasar).

Kotak 5

Melakukan Mata Pencaharian yang Sama dengan Pendapatan yang Lebih Tinggi

Sektor Pertanian

Aril (38 tahun, laki-laki, Naukae, TTS, Timor Barat)

Ketika sudah dianggap sebagai anak muda, kira-kira umur sekitar 20 tahun, berarti itu 1988, saya dikasih tanah untuk kebun sendiri. Waktu itu tidak sampai setengah hektare, saya mulai tanami kebun itu. Pertama yang saya tanam, saya ingat itu, kemiri, pisang, ubi-ubian, dan jagung, hanya itu karena yang saya tahu hanya cara tanam jagung, kemiri, pisang, dan ubi. Dengan punya kebun sendiri saya merasa kesejahteraan meningkat. Setelah ada kebun saya bisa cari tahu tentang tanaman yang lain, lalu saya tanam di kebun saya.

Setahun kemudian, pada 1989 saya panen jagung. Dulu itu tanahnya subur, humus tanahnya banyak, kebun saya yang tidak sampai setengah hektare hasilnya baik. Separuh untuk makan, separuhnya saya jual. Hasil jual itu sebagian saya berikan mama, sebagian saya simpan sendiri. Ubi kayu yang saya tanam juga dipanen, tapi tidak dijual, sampai sekarang saya tetap tanam ubi kayu tapi tidak pernah dijual, untuk dimakan sendiri.

Kemiri yang saya tanam pada awal kerja kebun itu baru berbuah pada 1994, menunggunya memang lama, tapi kalau sudah ada hasil, akan bisa dapat uang yang lumayan, dan setiap tahun buahnya akan selalu bertambah banyak. Pertama kali panen kemiri saya dapat 50 kg, 1 kg kemiri yang belum dikupas waktu itu harganya Rp750. Dulu karena belum punya alat pengupas kulit, jadi dijual dengan kulitnya. Jadi saat itu saya dapat uang Rp37.500 dari pohon kemiri.

Pada 1994 saya juga panen jeruk pertama. Saat itu kalau dijual bijian, 6 buah harganya Rp1.000, kalau dijual per pohon Rp60.000. Panen pertama itu saya dapat uang Rp120.000, karena ada dua pohon yang berbuah, yang belum berbuah tidak saya hitung. Dengan dapat tambahan hasil dari jual jeruk dan kemiri saya merasa kesejahteraan meningkat.

Kalau alpukat saya baru tanam tahun 2000, bibitnya saya dapat dari pemerintah, saya diberi bibit 50 anakan, keluarga yang lain juga dapat bibit sejumlah itu. Saya tahu cara tanam juga dari orang pemerintah yang datang ke Balai Desa. Semua masyarakat dikumpulkan untuk bisa melihat praktik cara tanam alpukat. Alpukat baru bisa dipanen 5 sampai 6 tahun setelah tanam. Pada 2000 saya juga tanam mahoni, ada penyuluhan dan diberi bibit sekalian. Saya pikir apa salahnya dicoba, sekarang pohon mahoni sudah besar tapi belum bisa disenso (ditebang pakai gergaji mesin untuk dibuat papan).

Pada 2000 juga di Desa ini ada program dari Bapak Desa untuk menanam sayur secara berkelompok. Biasanya masyarakat di sini berkelompok dengan tetangga yang dekat, begitu juga saya. Kelompok saya anggotanya sepuluh orang. Kebun yang kami kerjakan kebun Adrianus karena dekat dengan air. Kebun kelompok kami luasnya 600 are. Sewaktu panen, misalnya, sayuran dijual bisa laku Rp200.000, jadi setiap anggota kelompok mendapat bagian Rp20.000. Ada tambahan dari hasil sayur kesejahteraan meningkat sedikit, kami bisa dapat uang dari sayur itu 6 bulan sekali bahkan 4 bulan sekalipun pernah.

Saya pertama kali panen alpukat itu tahun lalu, pada 2005. Dari 50 pohon yang saya tanam, yang hidup dan bisa tumbuh besar hanya 10 pohon, tapi semuanya berbuah bersamaan. Saya dapat 10 karung, bisa dirata-rata setiap pohon buahnya 1 karung. Yang 2 karung saya makan dan dibagi-bagikan ke tetangga dan saudara, yang 8 karung saya jual, tiap karungnya laku Rp12.000. Selain alpukat, pada 2005 saya mulai bisa merasakan hasil tanaman jeruk yang saya tanam waktu kebun saya ditambah menjadi 1 hektare. Pohon jeruk saya yang berbuah 5 pohon, masing-masing pohon laku Rp200.000 karena kebetulan semuanya berbuah banyak. Untuk kemiri saya punya enam pohon kemiri besar, yang masih kecil juga ada. Pada 2005, saya panen 70 kg kemiri, saya sudah punya alat kupas jadi saya jual kemiri yang kupasan, harga di pasaran Rp6.000 per kilonya sehingga pada tahun ini saya merasa kesejahteraan saya semakin meningkat.

Sektor Nonpertanian

Iksan (37 tahun, laki-laki, Branta Pesisir, Pamekasan, Jawa Timur)

Kalau kerja itu, saya sejak keluar SMA pada 1989 sudah bekerja jadi penjahit. Sebenarnya saya sejak kelas 2 SMA sudah bisa menjahit, namun belum berani menjahit untuk orang lain. Setelah lulus SMA, saya baru bekerja menjahit. Waktu itu selain bekerja menjahit sendiri, saya juga ikut orang yang punya

usaha menjahit (punya *tailor*). Ada beberapa *tailor* yang saya pernah kerja di sana. Pertama kali saya ikut kerja di Merry Tailor yang ada di Desa Branta ini. Pendapatan waktu itu Rp25.000 per hari. Di Kristal Tailor saya hanya bekerja selama 5 bulan. Setelah itu saya keluar dan menjahit sendiri. Alasan keluar waktu itu karena gaji yang saya dapatkan dari juragan tidak banyak, dan juga juragannya tidak perhatian pada karyawannya (penjahit).

Pada 1991 saya diajak masuk oleh juragan Kristal Tailor. Kristal Tailor itu ada di Pamekasan. Saya bekerja di sana satu tahun dengan bayaran Rp25.000 per hari. Setelah satu tahun itu, saya keluar karena ada sedikit masalah dengan jahitan saya. Waktu itu saya menjahit celana tapi benang yang dipakai menjahit kurang sama. Kejadian ini membuat saya tak enak dengan juragan, maka saya memutuskan untuk keluar dari Kristal Tailor. Keluar dari Kristal Tailor saya tetap bekerja menjahit seperti biasa, hanya tempatnya di rumah sendiri.

Setelah itu, pada 1994 saya bekerja di *tailor*, apa namanya saya lupa, di Pamekasan. Dapat kerja di sana karena juragannya datang pada saya dan meminta bergabung. Kerja di sana sedikit peningkatan, gajinya per hari dapat Rp30.000, per hari. Tapi saya kerja di sana cuma 5 bulan karena di sana sepi orang yang menjahitkan. Karyawannya tiga orang terus masuknya digilir. Karena itu saya keluar. Setelah keluar, saya kembali menjahit sendiri di rumah.

Pada 1996 saya mendapat ajakan dari juragan Indonesia Tailor untuk menjahit di sana. Indonesia Tailor itu tempatnya di Pamekasan. Pendapatannya lebih meningkat dari *tailor* sebelumnya. Waktu itu gajinya per hari Rp35.000. Saya kerja di sana kira-kira cuma 2 tahun. Saya keluar karena waktu itu juragan berlaku tidak adil sesama penjahit. Saya melanjutkan dengan menjahit di rumah sendiri.

Pada 2002 saya dihubungi juragan Pelangi Tailor untuk bekerja di sana. Pelangi Tailor itu di Pamekasan. Di sana pendapatan saya kembali turun, per harinya saya mendapat gaji Rp25.000. Saya kerja di Pelangi Tailor tidak lama, cuma 1 minggu. Setelah itu saya keluar Pelangi Tailor karena saya tidak suka dengan cara kerja di Pelangi Tailor. Menurut saya cara kerjanya terlalu lama, untuk 1 potongan bisa mencapai setengah hari. Di sana penjahit juga harus menyetrika hasil jahitannya. Ini berbeda dengan *tailor-tailor* sebelumnya di mana ada bagian tersendiri untuk menyetrika hasil jahitan. Kemudian pada 2003, juragan Indonesia Tailor datang ke rumah saya untuk mengajak saya bekerja kembali di sana. Sejak saat itu sampai sekarang saya bekerja di Indonesia Tailor. Pendapatan di sana sekarang naik menjadi Rp40.000 per hari.

b) Mengerjakan Pekerjaan/Mata Pencaharian atau Membuka Usaha/Bisnis Lain yang Lebih Besar atau Stabil Penghasilannya

Pada pola kedua ini mata pencaharian atau bisnis yang dilakukan saat ini dianggap tidak memiliki cukup potensi untuk dikembangkan atau mengalami penurunan pendapatan. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah dengan beralih pada mata pencaharian atau bisnis lain. Proses ini umumnya bisa dilakukan jika

- (1) individu yang bersangkutan memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengerjakan hal-hal baru, misalnya, memiliki keterampilan baru atau meningkatkan kualifikasinya karena telah menyelesaikan pendidikan yang lebih baik; dan
- (2) terdapat peluang ekonomi untuk melakukan alih pekerjaan atau usaha karena tidak semua komunitas memiliki berbagai peluang ekonomi yang bisa menjadi alternatif mata pencaharian atau usaha baru. Di beberapa komunitas pedesaan (misalnya, di Palengaan Daja, Jawa Timur dan di Kabuna, Timor Barat) banyak warga tergolong miskin, bahkan usaha dagang kecil-kecilan pun tidak bisa dilakukan karena nyaris tidak ada pembeli.

Kotak 6

Beralih ke Mata Pencaharian atau Bisnis yang Lebih Baik

Dari Penjahit ke Pegawai Negeri Sipil

Ali (40 tahun, laki-laki, Branta Pesisir, Pemekasan, Jawa Timur)

Saya bekerja sejak saya lulus sekolah pendidikan guru agama (PGA). Sejak lulus PGA, saya sudah bekerja sebagai penjahit (karyawan) di Menara Tailor. Waktu setelah lulus PGA itu saya diajak oleh saudara sepupu. Saudara sepupu saya itu dahulu teman satu angkatan di PGA dan lulus bersama. Namun, sejak kelas 1 PGA dia sudah pintar menjahit. Di Menara Tailor saudara sepupu saya itu juragannya, sedang karyawannya ada empat orang. Tapi semuanya bekerja bersama-sama.

Saya terakhir menjahit itu kira-kira November 2004. Setelah itu, pada Desember 2004 saya diterima menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Departemen Agama, Kabupaten Sampang, jadi saya berhenti menjahit. Cerita menjadi PNS dimulai waktu ada pengumuman di setiap kantor-kantor Departemen Agama (Depag) di seluruh Madura. Setelah mendaftar, saya ikut tesnya dan diterima. Saya mendaftar di Departemen Agama Sampang, diterima dan ditempatkan di Sampang. Saya kemudian ditempatkan di MI (Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Islam) Dusun Taman Anom, waktu itu para Kiai yang memiliki pondok mendatangi Bapak Kepala Depag untuk meminta bantuan tenaga pengajar untuk mengajar di sekolah yang ada dalam pondoknya. Di pondok juga ada sekolahnya. Keputusan Bapak Kepala Depag, untuk tiap-tiap kiai yang meminta bantuan guru, diberikan dua orang pegawai Departemen Agama untuk diperbantukan mengajar di sekolah yang ada di pondok. Jadi, bukan saya ditempatkan mengajar sekolah di pondok, tapi diperbantukan.

Gaji pokok sebagai PNS itu Rp627.400 sedangkan tunjangan jabatannya Rp169.750. Kalau dijumlah kira-kira Rp800.000. Pendapatan ini lebih baik dari sebelumnya. Dulu pendapatan jahit pada 1995 untuk baju pendek saya mendapatkan Rp3.500 sedangkan untuk setiap baju panjang saya mendapat Rp4.500. Sebagai penjahit, gaji saya tidak tetap, sekarang sebagai PNS saya sudah mendapat gaji tetap. Sementara ini, saya tidak menjahit lagi. Tapi kalau kebutuhan di masa depan bertambah, saya akan cari tambahan penghasilan dengan menjahit lagi. Kalau mau menjahit jadi karyawan saja. Jadi karyawan itu tidak repot, tidak membeli alat-alat jahit dan lainnya. Lagi pula kalau jadi karyawan saja, itu tidak mengganggu pekerjaan utama saya sebagai PNS.

Dari Pengusaha Abon Dendeng Menjadi Pemilik Penggilingan Padi

Haryono (56 tahun, laki-laki, Noelbaki, Kupang, Timor Barat)

Pada 1980, saya pindah ke Desa Noelbaki dan membuka usaha abon dendeng dengan mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 20 orang yang berasal dari Noelbaki dan sekitarnya. Alasan membuka usaha abon dendeng karena saya melihat tidak ada persaingan karena pada saat itu hanya Dinas Perindustrian yang memiliki usaha itu. Padahal, jumlah sapinya masih cukup banyak dibanding sekarang. Waktu pertama buka usaha, salah seorang pegawai Dinas Perindustrian mengatakan bahwa usaha saya tidak akan berhasil karena pasar sudah mereka kuasai. Tapi saya jawab, kita lihat saja nanti siapa yang kalah dalam persaingan nanti. Ternyata Dinas tidak *fair* karena mereka tidak mau memberikan izin operasional kepada saya karena takut tersaingi jadi saya berjalan apa adanya saja. Malahan saya pernah diusulkan buka usaha gelap.

Pada tahun yang sama saya juga membuka usaha bengkel motor karena sepanjang jalan mulai dari Tarus sampai Noelbaki tidak ada bengkel satu pun. Akhirnya saya datangkan dua orang mekanik dari Surabaya kemudian buka bengkel motor. Kondisi ekonomi saya pada waktu itu sangat meningkat karena sudah punya usaha sendiri dan hasilnya sangat lumayan karena dalam sebulan penghasilan saya mencapai Rp5.000.000 dan nilai uang pada waktu itu cukup tinggi untuk ukuran masyarakat Kupang. Usaha abon dendeng ini saya jalani selama kurang lebih 12 tahun dan pada 1992 usaha ini saya hentikan karena macetnya pembayaran dari pelanggan dan jumlah pesaing yang semakin banyak sehingga memengaruhi omzet penjualan. Usaha bengkel juga saya tutup pada tahun yang sama karena tenaga mekanik pulang kampung dan tidak kembali lagi.

Karena melihat kondisi saya yang sering pulang balik Noelbaki-Kupang tiga kali sehari pada saat itu, calon istri saya (istri sekarang) menyarankan saya untuk buka usaha baru yang tidak berisiko tinggi karena pembayaran yang macet dan jarak yang cukup jauh. Akhirnya pada tahun yang sama, atas saran tersebut saya membeli sawah seluas 2 hektare untuk digarap sekaligus buka usaha penggilingan padi sampai sekarang ini. Kondisi ekonomi saya pada waktu itu sedikit lebih baik dari 1980 karena bisa membeli tanah sekaligus mesin penggilingan padi untuk usaha. Dari kedua usaha tersebut saya memperoleh penghasilan rata-rata Rp5.000.000 per bulan. Pada 1998 saya menambah satu unit mesin penggilingan padi karena prospek yang sangat menjanjikan. Selain untuk kebutuhan sendiri, lokasi usaha saya cukup strategis karena dekat dengan lokasi sawah dan berada di pinggir jalan sehingga masyarakat mudah menggiling padi menjadi beras. Dengan penambahan 1 unit mesin penggilingan padi tersebut saya memperoleh tambahan penghasilan sebesar Rp1.000.000 per bulan menjadi Rp6.000.000 per bulan dan tarif biaya sebesar Rp100 per kilogram.

c) **Memiliki Beberapa Sumber Pendapatan (*multiple income*)**

Pada pola ketiga ini, suatu rumah tangga memiliki lebih dari satu sumber pendapatan (*multiple income*). Dengan adanya beberapa sumber pendapatan, maka rumah tangga tersebut bisa meningkatkan pendapatan totalnya serta memperbesar keamanan finansialnya. Dengan memiliki *multiple income*, hilang atau turunnya satu pendapatan tidak menyebabkan rumah tangga kehilangan seluruh pendapatan. Dalam hal ini *multiple income* bisa meningkatkan kesejahteraan karena bisa mengurangi risiko finansial (*risks spreading*). Beberapa sumber pendapatan bisa didapat dengan cara berikut.

- (1) Pencari nafkah utama dalam rumah tangga mengerjakan beberapa pekerjaan. Umumnya satu pekerjaan menjadi sumber pendapatan utama dan satu atau dua pekerjaan lain menjadi sumber pendapatan sampingan/tambahan.
- (2) Dalam satu rumah tangga terdapat beberapa pencari nafkah. Kombinasi yang paling umum adalah suami-istri sama-sama bekerja. Namun, dalam rumah tangga yang memiliki anak-anak usia kerja, bisa terjadi orang tua dan anak sama-sama mencari nafkah. Di komunitas-komunitas di mana peluang untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri (misalnya, di Palengaan Daja dan Banyupelle (Jawa Timur) dan Kabuna (Timor Barat), anak-anak perempuan menjadi pencari nafkah yang memberi kontribusi besar terhadap ekonomi rumah tangga.

Kotak 7
Memiliki Beberapa Sumber Pendapatan

Menjadi Petani, Tukang Pijat, dan Mendapat Kiriman Uang dari Anak yang Bekerja di Arab

Mia (59 tahun, perempuan, Banyupelle, Pemekasan, Jawa Timur)

Pertama kali saya bekerja itu kira-kira usia 10 tahun. Waktu itu kerja saya adalah sebagai petani. Saya diajak oleh orang tua saya. Jadi yang membantu kerja saya adalah orang tua saya dan saudara saya, Abiddin. Waktu itu pendapatan saya saat panen Rp200/panen. Pada 1997 bekerja sebagai penggulung tembakau. Yang mendukung ini Pak Mulia karena dia yang meminta saya dan mengajari saya menggulung tembakau awalnya. Sehari saya mendapatkan satu gedek itu dihargai Rp4000. Lumayan kalau ada kerjaan bisa menambah pemasukan. Tapi ini ada pas tembakau baik, tapi kalau hujan seperti ini tidak ada.

Pada 1999, saya kerja sebagai tukang pijat. Belajar memijat ini sudah menjadi turunan dari keluarga saya. Saya diajari orang tua saya. Jadi dia yang mendukung saya. Sekali mijat saya dibayar orang Rp2.000. Sehari tidak menentu. Tapi saya kerja mijat ini senang karena niat saya hanya mencari pahala karena bisa membantu orang lain.

Pengalaman tani yang paling untung adalah pada 2000. Waktu itu saya panen tembakau dapat Rp4.500.000. Modalnya hanya Rp500.000, uang itu dari utang tetangga. Pada 1998 adalah pengalaman buruk tani tembakau. Waktu itu tembakau rusak akibat hujan dan saya tidak panen apa-apa. Padahal saya modal Rp500.000 dari utang. Penghasilan saya sekarang adalah dari bertani dan memijat. Lalu ditambah ada sedikit kiriman dari anak yang bekerja di Arab. Tapi yang paling saya andalkan adalah pendapatan dari bertani. Dulu, selain bertani, saya memang ada pendapatan dari kerja menggulung tembakau.

Suami Menjadi Petani Tembakau, Istri Menjadi Pedagang

Syahrudin (39 tahun, laki-laki, Palengaan Daja, Pemekasan, Jawa Timur)

Pada 2000 saya pernah pergi ke Malaysia. Uang yang saya dapat di Malaysia itulah yang saya jadikan modal usaha. Setelah pulang dari Malaysia, pada 2001 saya mulai garap sawah yang sebelumnya saya tinggal ke Malaysia dan membuka toko kebutuhan sehari-hari di Pasar Brambang Desa Angsoka Temor. Alasan saya menggarap sawah itu kembali karena saya ingin mencoba menanam tembakau sendiri, sedangkan buka toko kebutuhan sehari-hari itu karena istri saya mempunyai keinginan untuk berbisnis.

Dalam menjalankan pekerjaannya, Syahrudin mengatakan tak ada yang menghambat. Bertani merupakan kesadaran saya sendiri dan buka toko juga inisiatif saya karena keinginan istri untuk usaha. Yang membantu pada saat buka toko adalah Kepala Pasar Brambang. Pada waktu Pasar Brambang pertama kali dibuka, tak ada yang mau menemani. Kemudian Kepala Pasar Brambang menghubungi saya untuk mengisi toko di pasar. Setelah itu saya memutuskan untuk mengambil tabungan di bank sekitar Rp4.000.000. Uang di bank tersebut saya ambil semuanya untuk buka toko.

Sewaktu membuka toko tersebut, saya mendapatkan pengetahuan dari teman-teman yang sebelumnya sudah berdagang. Saya memang meminta pengalaman-pengalaman dari mereka. Keterampilan yang saya dapatkan adalah "P3", yaitu penjual itu harus peramah, penjual itu harus pemurah, dan penjual itu harus pamanis (berbicara dengan enak dan sopan). Keterampilan itu yang juga saya ajarkan pada istri saya.

Pendapatan yang saya dapatkan dari pekerjaan-pekerjaan itu, kalau bertani, khususnya bertani tembakau, itu susah ditentukan. Ini tergantung harga dan faktor alam. Saat ini saya menanam 12.000 pohon tembakau. Itu lebih sedikit bila dibandingkan dengan Pak Budhi yang menanam 50.000 pohon tembakau. Kalau pendapatan toko, toko itu 1 minggu akan 2 kali "kulak" (beli bahan-bahan untuk dijual kembali di toko). Satu kali kulak habis Rp3.000.000. Barang-barang kulak itu dijual lagi, dan setiap Rp1.000.000 saya mendapatkan keuntungan bersih Rp30.000, berarti satu minggu saya mendapat untung Rp180.000. Tapi pendapatan pertanian lebih utama dibandingkan pendapatan toko. Toko hasilnya Rp50.000 sampai Rp100.000, sedangkan pertanian lebih menonjol hasilnya apabila sukses. Dengan menjalankan pertanian dan membuka toko, tentu saja pendapatan dan pengalaman bertambah. Kadang hasil pertanian kurang bagus, ditutup dari hasil toko.

d) **Memiliki Gaji Tetap Terutama dengan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Karyawan di Sektor Formal**

Aspirasi untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tampak paling menonjol terdapat di kelompok *mover* dan *rich* di Maluku Utara. Pada pola keempat ini, proses peningkatan kesejahteraan cukup jelas, yaitu menjadi PNS relatif aman secara ekonomi karena punya gaji tetap. Selain itu, PNS juga mendapat berbagai tunjangan serta memiliki jaminan pendapatan di hari tua (pensiun). Tetapi, menjadi PNS umumnya sangat sulit dicapai karena harus melalui prosedur seleksi dengan persaingan yang ketat. Tidak jarang orang harus bertahun-tahun menjadi tenaga honorer sebelum lulus tes menjadi PNS. Apalagi mereka yang memiliki peluang menjadi PNS paling tidak harus memiliki pendidikan yang memadai sesuai dengan jabatan yang dipangkunya. Untuk bekerja sebagai PNS tenaga terlatih (guru, tenaga administrasi, dll.) minimal harus memiliki ijazah sekolah menengah umum atau sarjana. Dapat disebutkan bahwa faktor yang sangat mendukung apakah seseorang bisa meningkatkan kesejahteraannya melalui pola keempat ini atau tidak adalah tingkat pendidikan.

Kotak 8 **Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Karyawan dengan Gaji Tetap**

Hasan (46 tahun, laki-laki, Gura, Halmahera Utara, Maluku Utara)

Pada 1981 sampai 1987, saya mulai bekerja di Dinas Perkebunan Kecamatan Galela untuk proyek penanaman kelapa biasa dan kelapa hibrida. Proyek ini adalah proyek Provinsi Maluku yang dilaksanakan di Galela. Saya bekerja di proyek ini karena direkomendasikan dan dipanggil oleh kawan. Tidak ada yang menghambat saya dalam melakukan pekerjaan ini, orang tua saya sangat mendukung karena dalam pekerjaan ini saya juga membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Karena proyek ini adalah proyek Dinas Perkebunan Provinsi Maluku maka gaji setiap karyawannya dikirim dari Ambon dengan menggunakan pesawat ke Ternate dan dikirim ke Galela dengan transportasi laut. Pendapatan saya pada saat itu adalah Rp150.000/bulan, dan seharusnya diterima setiap 3 bulan. Tetapi dalam praktiknya, saya lebih banyak menerima gaji setiap 6 bulan karena keterlambatan gaji sampai di Galela.

Pada 1988 sampai 1994 saya bekerja sebagai pegawai pada kantor Camat Obi. Untuk pengembangan karir dan juga karena alasan keluarga, saya memutuskan untuk pindah ke kantor Camat Tobelo dan saya bekerja di sana dari 1994 sampai 1999. Di Tobelo saya diangkat sebagai kepala seksi kesejahteraan dan lingkungan. Di kantor Camat Tobelo pendapatan saya juga naik karena kenaikan pangkat reguler PNS dan juga karena jabatan baru sebagai kepala seksi.

Bulan Desember 1999 saya memutuskan untuk pindah karena konflik horisontal yang melanda Tobelo dan sekitarnya. Bersama istri, anak-anak, dan keluarga saya pindah ke Ternate. Ketika konflik terjadi Gubernur Maluku Utara mengeluarkan aturan baru perpindahan/mutasi sementara bagi PNS di wilayah-wilayah konflik untuk bekerja di Ternate dan atau di wilayah lain yang aman di dalam wilayah Provinsi Maluku Utara. Saya akhirnya pindah dan bekerja sementara di bagian pemerintahan kantor Bupati Maluku Utara. Tidak ada yang berubah dari pendapatan dan juga pengalaman dalam pekerjaan sebagai PNS. Konflik justru membawa pengaruh negatif bagi perkembangan karir yang telah saya bangun.

Ketika konflik mulai reda di Tobelo, saya ikut program pemulangan pengungsi dan kembali bekerja di kantor Camat Tobelo pada 2003. Semuanya serba sulit karena harus mulai dari nol lagi termasuk karier, *bale ke Tobelo ini torang mulai lagi samua dari nol* (kembali ke Tobelo kita harus memulai semuanya dari nol).

Atas saran istri, saya meminta untuk pindah ke Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Halmahera Utara. Dalam pekerjaan baru ini saya harus banyak belajar dari kawan-kawan satu bagian. *Saya pe tamang-tamang di Bawasda itu samua sarjana, hanya saya yang ijazah SMA jadi saya musti diskusi lebih banya deng dorang karena pasti dorang mungkin lebi banya tau* (kawan-kawan saya di Bawasda itu semuanya sarjana, hanya saya yang ijazah SLTA, jadi saya harus banyak berdiskusi dengan mereka karena mungkin mereka lebih banyak tahu). Dengan pekerjaan baru ini pendapatan saya juga naik, yang pasti cukup untuk makan dan tabungan.

Ani (49 tahun, perempuan, Noelbaki, Kupang, Timor Barat)

Waktu masih sekolah, yakni ketika saya kelas II SMEA pada 1976 saya mulai bekerja membantu kakak menjajakan pakaian jadi dan kain-kain. Gajinya "potong persen", artinya setiap barang yang laku terjual saya mendapat hasil sebesar 10%. Berapa total penghasilan yang saya peroleh tiap bulan saya lupa, tetapi cukup lumayan untuk memenuhi kebutuhan saya.

Saya mulai bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sejak Desember 1979 di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang di Tarus. Yang membantu memberikan informasi tentang adanya lowongan kerja pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ialah kakak sepupu saya, yaitu Bapak Migel. Katanya ada formasi untuk menggantikan orang yang telah pensiun. Lalu saya mengajukan lamaran dan mengikuti tes dan kemudian dinyatakan lulus. Setelah dinyatakan lulus saya melengkapi segala persyaratan untuk diangkat sebagai PNS. Pada Desember 1979 saya menerima surat keputusan (SK) pengangkatan saya sebagai PNS dan ditempatkan di Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang di Tarus.

Pada awal saya menjadi PNS, gaji yang saya terima sebesar Rp28.000. Kemudian gaji dan penghasilan saya beranjak naik sesuai kebijakan dan keputusan pemerintah, dan saat ini penghasilan saya per bulan sebesar Rp1.250.000 dengan pangkat dan golongan III/b.

Ketika saya bekerja sebagai penjaja pakaian saya senang dan bangga sekali karena bisa mendapat uang sendiri dan tidak hanya bergantung kepada orang tua. Usaha menjajakan pakaian ini sekaligus juga mempraktikkan ilmu yang saya peroleh di SMEA. Begitu pula ketika diangkat sebagai PNS saya senang dan bahagia sekali. Sebab di saat orang susah mendapat pekerjaan, saya bisa memperoleh pekerjaan yang didambakan semua orang, yaitu PNS. Di samping itu, dengan diangkat sebagai PNS berarti sekolah saya tidak sia-sia dan sudah dapat menghidupi diri sendiri serta tidak bergantung lagi kepada orang tua.

Zulfan (46 tahun, laki-laki, Semampir, Probolinggo, Jawa Timur)

Setamat dari IKIP, pada 1983 saya mulai bekerja sebagai guru bantu di sebuah SMP swasta di desa saya. Saya diminta oleh yayasan untuk mengajar karena putranya Pak Adi (sepupu saya) sudah menjadi guru di SMP tersebut. Saudara saya itu lulusan IKIP Surabaya. Karena jam mengajarnya sangat sedikit, saya hanya mendapat Rp15.000/bulan, untuk biaya hidup tiap bulan saya masih didukung orang tua. Pada 1984, saya ikut tes sebuah proyek PLS Kanwil Dikbud di Surabaya. Saya diterima dan ditempatkan di Kabupaten Probolinggo. Waktu itu, meskipun sebagai tenaga kontrak, tapi gaji saya lebih besar dari CPNS (calon pegawai negeri sipil), yakni Rp100.000/bulan. Gaji saya langsung melonjak dari Rp15.000 menjadi Rp100.000.

Pada 1991 saya menjadi "penilik pendidikan masyarakat" di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Sebenarnya saya masih senang mengajar, tapi ternyata menjadi penilik itu lebih variatif, kadang di kantor kadang ke masyarakat. Waktu itu saya tinggal di mertua sehingga tidak harus kontrak dan pendapatan saya Rp600.000/bulan dan pangkat pun sudah IIIB. Pada 1994, saya dipromosikan

menjadi golongan III C dan ditempatkan di Kecamatan Kota Anyar. Saya senang waktu naik jabatan, saya sudah punya 11 anak buah, yaitu kepala sekolah beserta guru-guru sekecamatan Kraksaan. Waktu itu saya sudah mulai punya mobil, dan gaji bulanan saya Rp700.000. Pada 1996 saya di pindahkan ke Kecamatan Kraksaan yang lebih kota, jabatan dan golongan tetap sama.

Pada 1997 eselon dan jabatan saya naik menjadi III D, dan ditempatkan sebagai Kepala Seksi Kebudayaan di Dikbud Kabupaten. Pada 2000, saya pindah jabatan menjadi Kepala Bagian Perlengkapan di Dikbud, eselon dan pangkat saya sama. Pendapatan saya waktu itu masih tetap sama, tapi usaha istri menjahit mulai berkembang. Tapi perasaan saya lebih senang karena pekerjaannya cocok dengan hati saya. Saya hanya 3 bulan sebagai Kepala Bagian Perlengkapan karena ada kebijaksanaan Otonomi Daerah, 2001. Waktu itu eselon saya tetap tapi jabatan berubah menjadi Kepala Seksi Tenaga Teknis di Dinas Kabupaten. Saya yang menentukan formasi guru SMP, SMA, dan SMK sekabupaten.

Pada 2003, saya dipanggil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. Saya diminta untuk menjadi Kepala Cabang Dinas di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Pada Juli 2004 akhirnya saya kembali bekerja di Kecamatan Kraksaan. Saya dilantik sebagai kepala Cabang Dinas Kraksaan. Pangkat saya IIID eselon IVA. Penghasilan saya sampai sekarang Rp1.680.000.

4.3.2 Faktor-faktor yang Mendukung Proses Peningkatan Kesejahteraan

Dari empat pola utama keluar dari kemiskinan di Jawa Timur, Maluku Utara, dan Timor Barat, dapat dilihat bahwa pola-pola tersebut sering tumpang-tindih. Rumah tangga yang pencari nafkah utamanya PNS, misalnya, sering melakukan diversifikasi sumber pendapatan dengan cara melakukan mata pencaharian lain atau ada lebih dari satu pencari nafkah dalam rumah tangga. Jadi, untuk meningkatkan kesejahteraannya seseorang atau suatu rumah tangga bisa melakukan berbagai cara, sekalipun tidak semua cara yang ada bisa dilakukan oleh setiap individu atau rumah tangga. Ada individu atau rumah tangga yang lebih mampu meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan suatu pola tertentu daripada individu atau rumah tangga lain. Oleh sebab itu, dalam bab ini akan ditelusuri lebih lanjut, faktor-faktor apakah yang umumnya mendukung proses peningkatan kesejahteraan.

Data dari survei rumah tangga maupun sejarah hidup menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung proses peningkatan kesejahteraan terdapat baik pada tingkat mikro maupun tingkat makro.

Berikut adalah faktor pendukung pada tingkat mikro.

- a) **Jaringan sosial dan koneksi yang menguntungkan.** Faktor pertama ini khususnya mengacu pada kemampuan individu untuk membangun dan memanfaatkan jaringan sosialnya, khususnya koneksi dengan orang atau kelompok-kelompok yang bisa membantu untuk melakukan mobilitas ke atas (*upward mobility*). Hampir seluruh narasi sejarah hidup menunjukkan bahwa individu mendapat manfaat dari koneksi/aliansinya dengan seseorang yang bisa memberi fasilitas, informasi, dan membuka peluang untuk mulai melakukan pekerjaan atau bisnisnya. Oleh sebab itu, modal sosial yang didapat dari hubungan vertikal (*linking social capital*) menjadi sangat penting.
- b) **Keterampilan/pendidikan yang memadai.** Faktor kedua ini tidak selalu mengacu pada keterampilan yang diperoleh dari pendidikan formal. Narasi sejarah hidup menunjukkan bahwa individu juga banyak belajar dari saudara, teman, tetangga yang memiliki pekerjaan sama atau yang memiliki pengetahuan/keterampilan lebih banyak. Pendidikan formal yang memadai khususnya harus dimiliki oleh mereka yang hendak meningkatkan kesejahteraan melalui jalur PNS.¹⁸

¹⁸Rendahnya pendidikan dan keterampilan adalah salah satu faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab kemiskinan di Kabupaten Bima dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tim Penelitian AKP-SMERU *et al.*, 2006).

- c) **Kondisi kesehatan yang relatif baik.** Arti penting faktor ketiga ini lebih tampak jika membandingkan kelompok yang meningkat kesejahteraannya dengan kelompok yang menurun kesejahteraannya. Dalam bab sebelumnya telah disebutkan bahwa kelompok *mover* umumnya berada pada golongan usia kerja yang produktif dan memiliki kondisi kesehatan yang memungkinkan mereka untuk bekerja penuh. Selain itu, sebagian *mover* memiliki mata pencaharian yang tidak terlalu berat secara fisik (PNS, pedagang) sehingga dapat dijalankan hingga usia yang lebih tua. Di kelompok *faller* salah satu penyebab turunnya kesejahteraan adalah kondisi kesehatan yang memburuk (misalnya, karena usia lanjut) sehingga orang tidak bisa bekerja dan akibatnya pendapatan menurun atau bahkan hilang.
- d) **Kemauan untuk bekerja keras (motivasi).** Faktor ini diidentifikasi oleh sejumlah responden sebagai pendukung proses peningkatan kesejahteraan. Di satu sisi, sangat sulit mengukur dan menentukan sejauh mana suatu keberhasilan untuk meningkatkan keberhasilan ditentukan oleh kemauan individu bekerja keras. Di sisi yang lain, jika mengkaji narasi sejarah hidup dapat dilihat bahwa mereka yang mampu meningkatkan kesejahteraannya adalah mereka yang terus-menerus dan kreatif berupaya mencari pendapatan yang lebih besar atau posisi yang lebih baik. Ini berlaku untuk semua pekerjaan di berbagai sektor dan wilayah.

Faktor-faktor di tingkat mikro tersebut dapat dilihat juga sebagai faktor-faktor agensi individual yang memengaruhi proses peningkatan kesejahteraan. Faktor pertama merupakan kemampuan sosial (*social capabilities*), faktor kedua dan ketiga adalah modal manusia (*human capital*) dan faktor keempat adalah kemampuan psikologis (*psychological capabilities*).¹⁹ Selanjutnya, faktor-faktor pada tingkat mikro atau faktor-faktor agensi individual ini tidak bekerja dalam ruang yang vakum. Bagaimana dan sejauh mana faktor-faktor mikro (agensi individual) tersebut bisa memengaruhi bahkan menentukan proses peningkatan kesejahteraan juga ditentukan oleh faktor-faktor pada tingkat makro (banyak faktor pada tingkat makro tersebut dapat dikategorikan sebagai faktor struktural).

Berikut adalah faktor-faktor pendukung di tingkat makro.

- a) **Adanya peluang-peluang bisnis dan kesempatan kerja.** Pola-pola peningkatan kesejahteraan di tiga wilayah sangat berorientasi pada kegiatan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Oleh sebab itu, kondisi makro yang sangat penting adalah adanya peluang-peluang bisnis dan kesempatan kerja serta iklim usaha yang menguntungkan. Namun, hal-hal tersebut berbeda untuk tiap komunitas dan wilayah. Komunitas (semi) perkotaan yang dekat dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi, cenderung memiliki peluang ekonomi yang lebih besar. Di sini warga relatif lebih mudah melakukan diversifikasi sumber pendapatan atau alih mata pencaharian/usaha daripada di komunitas pedesaan yang terpencil. Kemampuan memanfaatkan peluang bisnis seringkali terkait dengan ketersediaan modal. Di beberapa komunitas, seperti di Palengaan Daja (Jawa Timur), kecilnya akses terhadap kredit untuk modal kerja (baik

¹⁹Secara teoretis, sekalipun terdapat faktor agensi yang bersifat kolektif, baik data survei rumah tangga maupun sejarah individu *tidak* menunjukkan arti penting faktor agensi kolektif dalam proses keluar dari kemiskinan. Sekalipun mayoritas responden (termasuk *mover*) menjadi anggota suatu kelompok atau organisasi, tipe organisasi yang umumnya diikuti adalah organisasi keagamaan yang lebih bertujuan memelihara hubungan baik antarwarga atau integrasi kelompok-kelompok di masyarakat. Organisasi-organisasi seperti ini biasanya kecil dan sangat lokal sehingga tidak bisa menghasilkan agensi kolektif yang mampu memberdayakan anggotanya secara sosial, politik, dan ekonomi.

dari lembaga keuangan maupun dari sumber lain) merupakan hal yang sangat menghambat warga untuk menjalankan mata pencahariannya.

- b) **Adanya akses untuk mendapat pendidikan atau keterampilan yang bisa memperbesar kemampuan orang untuk meningkatkan pendapatan.** Pendidikan dan keterampilan—sekalipun tidak harus melalui jalur formal—adalah hal yang penting dimiliki untuk bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan mengembangkan diri. Namun, tidak semua orang mampu menginvestasikan biaya, waktu, dan tenaga untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan. Di beberapa komunitas pedesaan (misalnya, di Timor Barat dan sebagian Jawa Timur), akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan formal sangat terbatas karena tidak ada biaya dan fasilitas.
- c) **Adanya kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.** Di wilayah Timor Barat, Maluku Utara, dan sebagian Jawa Timur, berbagai program pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh berbagai lembaga nonpemerintah, juga memengaruhi proses peningkatan kesejahteraan warga. Sekalipun demikian, arti penting program pembangunan perlu dilihat secara proporsional karena seringkali hanya program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan. Data survei rumah tangga, FGD, dan wawancara sejarah hidup menunjukkan bahwa masyarakat menganggap beberapa program pembangunan di desanya mampu meningkatkan potensi desa dan kesejahteraan mereka, sekalipun pengaruh positifnya tidak selalu besar.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1 Kesimpulan

Laporan ini mencakup 15 komunitas yang terletak di 3 wilayah (Jawa Timur, Maluku Utara, dan Timor Barat). Topik utama yang dikaji dalam laporan ini adalah berbagai proses peningkatan kesejahteraan, baik yang berhasil melampaui garis kemiskinan maupun yang belum berhasil. Yang menjadi fokus kajian adalah kelompok *mover*, sedangkan kelompok-kelompok transisi lain (*rich*, *faller*, dan *poor*) dikaji sebagai bahan perbandingan. Berikut adalah kesimpulan dari kajian tersebut.

5.1.1 Konteks Kewilayahan Upaya Keluar dari Kemiskinan

Berbagai komunitas dan wilayah yang diteliti memiliki kondisi geografis, sosial, budaya, dan politik yang berbeda. Hal ini menyebabkan peningkatan kesejahteraan terjadi dalam pola-pola yang berbeda dan merupakan suatu proses yang sangat terkait dengan konteks di mana proses itu terjadi. Di antara ketiga wilayah yang diteliti, masalah kemiskinan yang terbesar terdapat di Timor Barat. Di wilayah ini, hambatan bagi individu, rumah tangga, dan kelompok yang berupaya untuk keluar dari kemiskinan bisa lebih besar karena harus melakukan upaya tersebut dalam kondisi yang lebih terbatas daripada di Jawa Timur dan Maluku Utara (misalnya, dari segi kondisi alam, ketersediaan berbagai infrastruktur, fasilitas publik, dan sumber daya manusia).

Di semua komunitas, jumlah rumah tangga yang naik kesejahteraannya lebih besar daripada jumlah rumah tangga yang turun kesejahteraannya. Jadi, secara umum terdapat peningkatan kesejahteraan (terjadi mobilitas naik/*upward mobility*). Sekalipun demikian, mobilitas naik yang tinggi di suatu komunitas, tidak selalu berarti berhasil melewati garis kemiskinan. Di beberapa komunitas terdapat banyak orang miskin yang mengalami perbaikan kondisi hidup, tetapi belum berhasil keluar dari kemiskinan. *Mover* yang belum keluar dari kemiskinan banyak terdapat di komunitas-komunitas pedesaan yang relatif miskin dan hampir seluruh warganya hanya punya mata pencaharian di sektor pertanian. Akibatnya, tingkat kesejahteraan mereka sangat rentan terhadap banyak hal yang bisa menggagalkan panen. Apalagi diversifikasi pendapatan sulit untuk dilakukan karena kurangnya peluang untuk melakukan aktivitas ekonomi di sektor lain.

Komunitas-komunitas (semi) urban memiliki infrastruktur dan fasilitas publik yang lebih baik daripada komunitas-komunitas pedesaan. Selain itu, komunitas-komunitas (semi) urban juga memiliki situasi sosial-ekonomi yang lebih kompleks daripada di komunitas-komunitas pedesaan. Keragaman warganya (dari segi etnisitas, agama, tingkat pendidikan, jenis mata pencaharian, dll.) lebih besar daripada di komunitas-komunitas pedesaan. Heterogenitas ini menyebabkan mobilitas sosial terjadi secara fraksional di berbagai subkelompok dan bukannya perpindahan massal oleh suatu kelompok dari satu jenjang sosial ekonomi ke jenjang yang lain.

5.1.2 Karakteristik Mereka yang Bisa Keluar dari Kemiskinan

Secara umum, *mover* adalah kelompok yang mampu meningkatkan kesejahteraannya. Tetapi *mover* bukanlah suatu kelompok yang homogen karena mereka berada di berbagai komunitas dan terdiri dari berbagai subkelompok yang memiliki karakteristik-karakteristik

yang khusus. Akibatnya, mobilitas naik kelompok *mover* juga terjadi dalam beberapa pola berbeda sesuai dengan konteks lokal dan potensi *mover* yang spesifik.

Secara umum, *mover* memiliki beberapa karakteristik, antara lain, sebagai berikut.

- a) Mayoritas berusia produktif: 31–50 tahun.
- b) Mayoritas pernah mendapat pendidikan formal tingkat dasar dan menengah. Di komunitas-komunitas perkotaan *mover* umumnya mendapat pendidikan menengah. Oleh sebab itu, di perkotaan tingkat pendidikan *mover* lebih tinggi daripada di pedesaan.
- c) Memiliki pendapatan yang stabil terutama karena mereka melakukan diversifikasi sumber pendapatan atau memperoleh gaji tetap. Salah satu cara diversifikasi yang menjaga stabilitas pendapatan *mover* adalah dengan memiliki sumber pendapatan dari luar sektor pertanian. Oleh sebab itu, secara umum kelompok *mover* cenderung punya ketergantungan yang lebih kecil pada sektor pertanian daripada kelompok *faller* dan *poor*.
- d) Memiliki rasa percaya diri yang relatif lebih tinggi daripada kelompok *faller* dan *poor*.
- e) Memiliki tingkat partisipasi sosial relatif tinggi. Tingkat partisipasi sosial ini khususnya dilihat dari keikutsertaan *mover* pada berbagai kegiatan sosial dan organisasi formal di masyarakat.

Sementara itu, karakteristik khusus subkelompok *mover* terkait dengan hal berikut.

- a) **Cara-cara *mover* melakukan diversifikasi sumber pendapatan**
Diversifikasi pendapatan tersebut dilakukan baik di dalam maupun di luar sektor pertanian. Diversifikasi sumber pendapatan di dalam sektor pertanian umumnya dilakukan dengan cara mencari tambahan pendapatan sebagai buruh tani atau menanam beberapa jenis tanaman komersial. Diversifikasi pendapatan di luar sektor pertanian dilakukan dengan melakukan usaha dagang kecil-kecilan atau mengombinasikan gaji tetap dengan penghasilan tambahan dari membuka warung, kios, dan berbagai pekerjaan jasa terlatih maupun tidak terlatih.
- b) **Keterlibatan *mover* dalam hubungan sosial yang menguntungkan (surplus)**
Sebagian *mover* terlibat dalam hubungan sosial yang bisa mendukung upayanya untuk melakukan mobilitas naik. Hubungan sosial yang surplus ini umumnya dibangun dengan orang atau kelompok yang punya posisi sosial-ekonomi yang lebih tinggi, kuat, atau istimewa (*privileged*). Hubungan ini merupakan hubungan vertikal yang bisa membuat orang atau kelompok naik ke jenjang sosial yang lebih tinggi.
- c) **Besarnya mobilitas ke atas yang dicapai *mover***
Seluruh kelompok *mover* bisa meningkatkan kesejahteraannya, tetapi besarnya mobilitas ke atas yang dicapai tidaklah sama. Mereka yang tergolong miskin dan hanya mampu melakukan sedikit peningkatan kesejahteraan, tidak semua berhasil keluar dari kemiskinan. *Mover* seperti ini adalah yang paling rentan, karena peningkatan kesejahteraan mereka mudah terganggu oleh berbagai faktor (gagal panen, tingginya biaya produksi, harga komoditas yang tidak stabil). Subkelompok ini umumnya terdapat di komunitas pedesaan dan sangat tergantung pada sektor pertanian.

5.1.3 Proses Keluar dari Kemiskinan dan Faktor-faktor yang Berpengaruh

Proses peningkatan kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan dapat dikelompokkan dalam beberapa pola, yaitu

- a) **Mengerjakan pekerjaan/mata pencaharian yang sama tetapi memiliki penghasilan yang lebih besar.** Dalam pola pertama ini mata pencaharian yang dilakukan saat ini masih dianggap punya potensi untuk dikembangkan, tetapi perlu dilakukan beberapa perbaikan agar pendapatan bisa meningkat. Khususnya di sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama mayoritas responden, hal-hal yang bisa meningkatkan pendapatan antara lain (i) adanya sistem dan teknologi pengairan yang memungkinkan petani untuk mengairi sawahnya secara memadai; (ii) dilakukannya diversifikasi tanaman; (iii) penggunaan varietas yang lebih unggul; dan (iv) adanya akses yang lebih baik terhadap pasar.
- b) **Mengerjakan pekerjaan/mata pencaharian atau membuka usaha/bisnis lain yang lebih besar atau stabil penghasilannya.** Dalam pola kedua ini mata pencaharian yang dilakukan saat ini dianggap tidak lagi punya potensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan alih pekerjaan atau usaha. Proses ini bisa berjalan jika (i) individu yang bersangkutan punya kemampuan dan kemauan untuk mengerjakan hal-hal baru dan (ii) terdapat peluang ekonomi untuk melakukan alih pekerjaan usaha.
- c) **Memiliki beberapa sumber pendapatan.** Dalam pola ketiga ini, penciptaan beberapa sumber pendapatan dapat dilakukan dengan cara (i) pencari nafkah utama dalam rumah tangga melakukan beberapa pekerjaan dan/atau (ii) dalam satu rumah tangga terdapat beberapa pencari nafkah.
- d) **Memiliki gaji tetap terutama menjadi PNS atau karyawan di sektor formal.** Dalam pola keempat ini peningkatan kesejahteraan terutama didorong oleh adanya keamanan finansial, yaitu pendapatan tetap yang ditambah dengan berbagai tunjangan dan jaminan sosial, seperti yang diperoleh PNS atau karyawan di sektor formal. Untuk itu, dibutuhkan tingkat pendidikan yang memadai dan kemampuan untuk lolos dalam proses seleksi.

Faktor-faktor yang mendukung proses tersebut di atas adalah sebagai berikut.

- a) **Faktor pendukung pada tingkat mikro:**
 - (1) jaringan dan koneksi yang menguntungkan;
 - (2) keterampilan/pendidikan yang memadai/tepat;
 - (3) kondisi kesehatan yang relatif baik; dan
 - (4) kemauan untuk bekerja keras (motivasi).
- b) **Faktor pendukung pada tingkat makro:**
 - (1) adanya peluang-peluang ekonomi dan kesempatan kerja;
 - (2) adanya akses untuk mendapat pendidikan atau keterampilan yang bisa memperbesar kemampuan orang untuk meningkatkan pendapatan; dan
 - (3) adanya kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5.2 Rekomendasi Kebijakan

Proses dan faktor-faktor yang mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan, termasuk untuk keluar dari kemiskinan, yang berhasil dilakukan oleh sekelompok orang (*mover*) terutama terkait dengan isu ekonomi, seperti tentang perbaikan pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Faktor-faktor nonekonomi seperti hubungan sosial, motivasi, tingkat pendidikan, dan kondisi kesehatan juga secara spesifik dilihat dari fungsinya untuk mendukung perbaikan pelaksanaan pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan paling tidak dipengaruhi oleh tiga elemen yang satu sama lain saling terkait, yaitu kapasitas individu atau rumah tangga, kapasitas komunitas, dan konteks lokal serta regionalnya. Ketiga elemen inilah yang perlu dijadikan titik awal (*entry points*) dalam membuat kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, studi ini memberi rekomendasi sebagai berikut.

a) Pengembangan Kapasitas Individual dan Rumah Tangga

(1) Peningkatan pendidikan dan keterampilan

Kemampuan individu (anggota rumah tangga) untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik (lebih besar dan lebih stabil) juga ditentukan oleh adanya pendidikan dan keterampilan yang tepat serta memadai. Pendidikan dan keterampilan tersebut dapat diperoleh di berbagai institusi sosial baik yang formal (sekolah) maupun yang nonformal (keluarga, tetangga, dan kelompok mata pencaharian). Oleh sebab itu perlu dilakukan:

- (a) Perbaikan tingkat pendidikan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Hal ini perlu dilakukan melalui perbaikan sarana serta akses terhadap pendidikan formal tingkat dasar dan menengah. Pendidikan formal di kedua tingkat tersebut harus semakin terjangkau baik dari segi jarak fisik maupun biaya. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur pendidikan perlu disertai dengan fasilitas publik dan subsidi lain yang terutama bisa meringankan beban biaya pendidikan.
- (b) Diseminasi sistematis pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan mata pencaharian/bisnis yang ada dan untuk memanfaatkan peluang melakukan mata pencaharian/bisnis lain. Diseminasi ini terutama perlu dilakukan melalui berbagai institusi sosial yang sudah tersedia di komunitas (misalnya, melalui kegiatan penyuluhan pertanian, kelompok mata pencaharian, kelompok keagamaan, dan kelompok etnis).

(2) Peningkatan kualitas hidup, terutama dalam bentuk perlindungan dari dampak negatif masalah kesehatan.

Kondisi kesehatan yang buruk menghalangi orang untuk bekerja secara penuh dan produktif, mengakibatkan biaya perawatan kesehatan yang tinggi dan oleh karenanya bisa menurunkan kesejahteraan. Untuk itu, perlu adanya jaminan bahwa masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan, baik dalam bentuk pemeliharaan kesehatan rutin maupun perawatan khusus, secara memadai dan terjangkau. Jaminan ini dapat diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan, khususnya bagi mereka yang lebih rentan terhadap masalah kesehatan (*health shocks*), misalnya, mereka yang berpendapatan rendah, lanjut usia, memiliki anggota keluarga anak-anak/balita, dan lain-lain.

- (3) **Peningkatan motivasi kerja.** Berbagai kasus (sejarah hidup individu) menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan dicapai melalui upaya yang berkelanjutan dan kreatif. Oleh sebab itu, motivasi tinggi dan kreatifitas merupakan salah satu aset yang perlu untuk dikembangkan. Peningkatan motivasi kerja dan pengembangan kreatifitas dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan pengembangan dan pendampingan masyarakat, misalnya, yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah. Kegiatan peningkatan motivasi terutama difokuskan pada pembinaan (*coaching*) dalam mengeksplorasi hal-hal baru, menggali potensi, dan memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang ada.

b) **Pengembangan Kapasitas Komunitas (Kolektif)**

Tidak semua hal yang bisa meningkatkan kesejahteraan dapat diupayakan pada tingkat individu/rumah tangga. Ada hal-hal yang hanya bisa atau lebih efektif jika dijalankan oleh kekuatan kolektif pada tingkat komunitas. Kekuatan kolektif yang bisa mendukung upaya keluar dari kemiskinan, misalnya, berupa organisasi yang menyediakan kredit untuk modal kerja atau organisasi yang menjamin penyediaan *input* lebih murah untuk produksi dan mengelola pemasaran *output*nya. Pengembangan kapasitas kolektif ini sedapat mungkin harus sesuai (*compatible*) dengan berbagai jaringan dan kegiatan sosial yang sudah ada di antara berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, perlu pula mendapat pembinaan teknis secara berkala dan berkelanjutan dari lembaga-lembaga yang relevan.

c) **Penciptaan Konteks Lokal dan Regional yang Kondusif untuk Pengembangan Kegiatan Ekonomi Produktif**

Dengan mempertimbangkan kerentanan kegiatan ekonomi di sektor pertanian, maka prioritas perlu diletakkan pada upaya-upaya berikut.

- (1) Penciptaan kesempatan kerja dan peluang usaha yang bisa mengintegrasikan tenaga kerja di sektor pertanian dalam kegiatan ekonomi nonpertanian. Pengintegrasian ini bisa dalam bentuk alih mata pencaharian utama dari sektor pertanian ke nonpertanian maupun dalam bentuk kombinasi mata pencaharian utama di sektor pertanian dengan mata pencaharian tambahan di luar sektor pertanian.
- (2) Peningkatan akses terhadap lembaga-lembaga keuangan yang menyediakan kredit untuk bisnis kecil.
- (3) Penyediaan dan peningkatan akses terhadap informasi, khususnya yang bisa memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan ekonomi (misalnya, informasi tentang ketersediaan dan harga bahan baku, jalur dan jaringan pemasaran, teknologi dan varietas yang lebih unggul, sumber-sumber kredit, perizinan usaha, dll.).

DAFTAR ACUAN

- Anwar, Dewi Fortuna, Hélène Bouvier, Glenn Smith, dan Roger Tol (eds.) (2005) *Violent Internal Conflicts in Asia Pacific: Histories, Political Economies and Policies*. Jakarta: Yayasan Obor, MOST-LIPI, LASEMA-CNRS, and KITLV.
- Barron, Patrick, Rachael Diprose, David Madden, Claire Q. Smith, dan Michael Woolcock (2004) 'Do Participatory Development Projects Help Villagers Manage Local Conflicts? A Mixed Methods Approach to Assessing the Kecamatan Development Project, Indonesia.' CPR Working Paper No. 9 (revised edition). Washington, D.C: World Bank.
- Barron, Patrick dan D. Madden (2004) 'Violence and Conflict Resolution in Nonconflict Regions: The Case of Lampung, Indonesia.' Conflict and Community Development Research and Analytical Program. Indonesia Social Development. Paper No. 2.
- Barron, Patrick, C. Q. Smith, dan M. Woolcock (2004) 'Understanding Local Level Conflict in Developing Countries. Theory, Evidence and Implications from Indonesia.' Social Development Papers. Conflict Prevention and Reconstruction. Paper No. 19.
- Bertrand, Jacques (2004) *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Colletta, Nat J. dan Michelle L. Cullen (2000) 'The Nexus between Violent Conflict, Social Capital, and Social Cohesion: Case Study from Cambodia and Rwanda.' Social Capital Initiative Working Paper No. 23.
- Colombijn, Freek dan J. Thomas Lindblad (eds.) (2002) *Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective*. Leiden: KITLV Press.
- Cramer, Christopher (2001) 'Economic Inequalities and Civil Conflict.' Centre for Development Policy and Research (CDPR) Discussion Paper No. 1501, SOAS: University of London.
- Diamond, Larry (2004) 'Moving Up Out of Poverty: What Does Democracy Have to Do With It?' CDDRL Working Papers. Paper No. 4.
- Dreze, Jean (1990) 'Widows in Rural India.' Department of Economics Research. Program Paper No. 26. London: London School of Economics.
- Dreze, Jean dan P.V. Srinivasan (1997) 'Widowhood and Poverty in Rural India: Some Interferences from Household Survey Data.' *Journal of Development Economics* 54: 217–234.
- Elias, Norbert dan John L. Scotson (1994) *The Established and the Outsiders*. London: Sage Publication.

- Fuwa, Nobuhiko (1999) *The Poverty and Heterogeneity among Female Headed Households Revisited: The Case of Panama*. Chiba University.
- Goodhand, Jonathan (2001) 'Violent Conflict, Poverty and Chronic Poverty.' CPRC Working Paper No. 6.
- Hetler, Carol B. (1990) 'Survival Strategies, Migration, and Household Headship.' Dalam *Structures and Strategies. Women, Works, and Family*. Leela Dube dan R. Rajni Palriwara (eds.) New Delhi: Sage Publication.
- Indonesian Statistics 2005/2006 (2006) Jakarta: BPS.
- Indonesia Human Development Report 2004 (2004) *The Economics of Democracy. Financing Human Development in Indonesia*. Jakarta: BPS, Bappenas, UNDP.
- Krishna, Anirudh (2005) *Accounting for Households' Movements Into and Out of Poverty*. <<http://www.pubpol.duke.edu/krishna/>> [15 Januari 2007]
- Krishna, Anirudh (2004) 'Escaping Poverty and Becoming Poor: Who Gains, Who Loses, and Why?' *World Development* 32 (1): 121–136.
- Krishna, Anirudh, D. Lumonye, M. Markiewicz, A. Kafuko, J. Wegoye, dan F. Mugumya (2004) 'Escaping Poverty and Becoming Poor in 36 Villages of Central and Western Uganda'. Makalah yang tidak dipublikasikan.
- Krishna, Anirudh, P. Kristjanson, M. Radeny, dan W. Nindo (2004) 'Escaping Poverty and Becoming Poor in 20 Kenyan Villages.' *Journal of Human Development* 5.
- Krishna, Anirudh, C. Gibson-Davis, L. Clasen, M. Markiewicz, dan N. Perez (2006) *Escaping Poverty and Becoming Poor in Thirteen Communities in Rural North Carolina*. Terry Sanford Institute of Public Policy Duke.
- Krishna, Anirudh (2006) 'Pathways Out of and Into Poverty in 36 Villages of Andhra Pradesh, India'. *World Development* 34 (2): 271–288.
- Kristjanson, P., Krishna A., Radeny M., Kuan J., Quilca G., Sanchez-Urrelo A., dan Leon-Velarde C. (n.d) 'Poverty Dynamics and the Role of Livestock in the Peruvian Andes'. Makalah yang tidak dipublikasikan.
- Marianti, Ruly (2002) *Surviving Spouses. Support for Widows in Malang, East Java*. Tesis doctoral yang tidak dipublikasikan, Amsterdam University.
- Marianti, Ruly dan Rizki Fillaili (akan dipublikasikan) 'Moving Out of Poverty in West Timor, Understanding Social Mobility and Poverty Dynamics in a Conflict-Affected Area.' Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Narayan, Deepa, Raj Patel, Kai Schafft, Anne Rademacher, dan Sara Koch-Schulte (2000) *Voices of the Poor. Can Anyone Hear Us?* Oxford: Oxford University Press for the World Bank.

- Nelson, Joan M. (1998) 'Poverty, Inequality and Conflict in Developing Countries.' New York: *Rockefeller Brothers Fund Project on World Security*.
- Oey-Gardiner, Mayling dan Soedarti Surbakti (1991) *Strategi Kehidupan Wanita Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- Rahayu, Sri Kusumastuti dan Vita Febriany (2007) 'Moving Out of Poverty: Understanding Freedom, Democracy, Governance and Growth from the Bottom-up. Indonesia Case Study: North Maluku and East Java.' Country Synthesis Report. Final Draft, The SMERU Research Institute.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman (2004) *Modern Sociological Theory*. 6th ed. New York: McGraw-Hill.
- Setyawan, Bayu (2004) *Barriers to Male Participation in Family Planning in West Timor*. <<http://www.unescap.org/>> [15 Januari 2007]
- Sunarto, Kamanto, Melina Nathan, dan Suprayoga Hadi (2005) *Overcoming Violent Conflict*. 1st ed. Vol. 2, Peace and Development Analysis in Nusa Tenggara Timur. Jakarta: CPRU, Lab Sosio, and Bappenas.
- Samuel, Clark (ed.) (2004) 'More Than Just Ownership. Ten Land and Natural Resource Conflict Case Studies from East Java and Flores.' Conflict and Community Development Research and Analytical Program. Indonesia Social Development Paper No. 4. The World Bank: Jakarta.
- Suryahadi, Asep, Daniel Suryadarma, Rima Prama Artha, dan Sudarno Sumarto (2005) 'Reassessment of Inequality and Its Role in Poverty Reduction in Indonesia.' Working Paper. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Suryahadi, Asep, Sudarno Sumarto, dan Lant Pritchett (2003) 'The Evolution of Poverty During the Crisis in Indonesia (Revised Version).' Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Tajima, Yuhki (2004) 'Mobilizing for Violence: The Escalation and Limitation of Identity Conflicts. The Case of Lampung, Indonesia.' Conflict and Community Development Research and Analytical Program. Indonesia Social Development Paper No. 3. Jakarta: The World Bank.
- Tim Penelitian AKP-SMERU, Tim AKP Kabupaten Bima, dan Tim AKP Kabupaten Tapanuli Tengah (2006) 'Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui Analisis Kemiskinan Partisipatoris (AKP).' Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Varshney, A., R. Panggabean, dan M.Z. Tadjoeeddin (2004) Patterns of Collective Violence in Indonesia (1990–2003). UNSFIR Working Paper 04/03.
- Verstegen, Suzanne (2001) 'Poverty and Conflict. An Entitlement Perspective.' Collective Prevention Network (CPN) Briefing Paper.

Wright, Erik Olin (1999). 'Metatheoretical Foundations of Charles Tilly's, Durable Inequality.' Makalah yang dipresentasikan pada panel Charles Tilly's Durable Inequality di Social Science History Conference, Chicago, Illinois, November 20–23.